



MAJALENGKA  
KANTOR PUNTA MAJALENGKA

PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
BPR MAJALENGKA

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan Laporan Tahunan Perumda BPR Majalengka Tahun 2019 dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Penyusunan Laporan Tahunan Perumda BPR Majalengka Tahun 2019 ini didasarkan dan berpedoman pada:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah; dan
- Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka;

dengan cakupan paling sedikit memuat Informasi Umum, Laporan Keuangan Tahunan dan *Management Letter* Perumda BPR Majalengka untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Tujuan penyusunan laporan Tahunan ini untuk memberikan gambaran lengkap mengenai kinerja Perumda BPR Majalengka dalam kurun waktu 1 (satu) tahun untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 terdiri dari:

1. Informasi Umum, yang meliputi antara lain:
  - a. kepengurusan;
  - b. kepemilikan;
  - c. perkembangan usaha;
  - d. strategi dan kebijakan manajemen; dan
  - e. laporan manajemen;
2. Laporan Keuangan Tahunan yang terdiri atas:
  - a. laporan posisi keuangan;
  - b. laporan laba rugi;
  - c. laporan perubahan ekuitas;
  - d. laporan arus kas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan, meliputi:
    - 1) opini dari akuntan publik;
    - 2) ikhtisar kebijakan akuntansi;
    - 3) penjelasan atas pos-pos laporan keuangan;
    - 4) komitmen dan kontijensi;
3. Surat Komentaris (*Management Letter*)

Demikian sebagai pengantar dan semoga Laporan Tahunan Perumda BPR Majalengka Tahun 2019 ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Majalengka, 23 Maret 2020  
PERUMDA BPR MAJALENGKA  
Direksi,



**ATJENG HADIS SUSANTO**  
Direktur Utama

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Pembahasan .....	1
1.3 Maksud dan Tujuan .....	2
1.4 Metode dan Teknik .....	3
1.5 Sistematika Pembahasan .....	3
BAB II INFORMASI UMUM PERUMDA BPR MAJALENGKA	
1.1 Susunan Kepengurusan dan Kepemilikan .....	5
1.2 Perkembangan Usaha .....	6
2.2.1 Riwayat Singkat Pendirian .....	6
2.2.2 Ikhtisar Data Keuangan Utama .....	7
2.2.3 Rasio Keuangan .....	8
2.2.4 Penjelasan <i>No Performing Loan</i> (NPL) .....	9
2.2.5 Perkembangan Usaha yang Berpengaruh Secara Signifikan .....	11
1.3 Strategi dan Kebijakan Manajemen dalam Mengelola dan Mengembangkan Usaha .....	11
BAB III POKOK-POKOK LAPORAN MANAJEMEN PERUMDA BPR MAJALENGKA	
3.1 Struktur Organisasi .....	13
3.2 Kegiatan Usaha Sesuai Anggaran Dasar .....	13
3.3 Teknologi Informasi .....	15
3.4 Perkembangan dan Target Pasar .....	16
3.5 Jumlah, Jenis dan Lokasi Jaringan Kantor .....	17
3.6 Kerjasama dengan Bank atau Lembaga Lain dalam rangka Pengembangan Usaha .....	17

3.7	Kepemilikan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham dalam Kelompok Usaha BPR .....	18
3.8	Keterkaitan antar Pemegang Saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris, antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, dan/atau antara Pemegang Saham dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris .....	18
3.9	Sumber Daya Manusia .....	19
3.10	Kebijakan Pemberian Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas bagi anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris .....	20
3.11	Perubahan Penting Lain yang terjadi di Perumda BPR Majalengka dan/atau di Kelompok usaha yang mempengaruhi Operasional .....	25
BAB IV	POKOK-POKOK LAPORAN KEUANGAN PERUMDA BPR MAJALENGKA	
4.1	Laporan Posisi Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 .....	26
4.2	Laporan Laba Rugi Untuk Tahun Yang Berakhir pada 31 Desember 2019 .....	28
4.3	Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Tahun Yang Berakhir pada 31 Desember 2019 .....	29
4.4	Laporan Arus Kas Untuk Tahun Yang Berakhir pada 31 Desember 2019 .....	30
4.5	Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir pada 31 Desember 2019 .....	31
	4.5.1 Opini dari Akuntan Publik .....	31
	4.5.2 Kebijakan Akuntansi .....	31
	4.5.3 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Keuangan .....	39
	4.5.4 Komitmen dan Kontijensi .....	63
4.6	Surat Komentar ( <i>Management Letter</i> ) .....	63
PENUTUP .....		82
LAMPIRAN		

## LEMBAR PENGESAHAN

Bupati Majalengka yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah, selaku KPM Perumda BPR Majalengka:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perumda BPR Majalengka Tahun 2019 yang paling sedikit memuat Informasi Umum, Laporan Keuangan Tahunan, Opini dari Akuntan Publik, Ikhtisar Kebijakan Akuntansi, Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Keuangan, Komitmen dan Kontijensi, dan Surat Komentar (*Management Letter*) untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebagaimana diatur dan dimanatkan dalam:
  - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR;
  - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah; dan
  - c. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank BPR Majalengka.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perumda BPR Majalengka untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. YATI RUHIYATI yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebagaimana disajikan dalam BAB IV Laporan Tahunan Perumda BPR Majalengka Tahun 2019 terlampir.
3. Menyetujui dan mengesahkan pendelegasian dan pemberian wewenang kepada :
  - a. Dewan Pengawas untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas informasi keuangan historis tahunan Perumda BPR Majalengka untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik serta memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
  - b. Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain serta menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas informasi keuangan historis tahunan Perumda BPR Majalengka untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pendelegasian dan pemberian wewenang tersebut di atas dilakukan dengan pertimbangan teknis dan fleksibilitas serta sesuai dengan pasal 13 ayat (2) POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

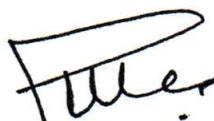
4. Menyetujui dan mengesahkan penggunaan atau pembagian laba Perumda BPR Majalengka setelah dikurangi Pajak Penghasilan (PPH) dan disahkan oleh KPM untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dengan mengacu dan berpedoman pada:
- a. Pasal 82 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah; dan
  - b. Pasal 88 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka;
- dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

**PENGUNAAN LABA TAHUN 2019**

NO.	URAIAN	%	NOMINAL	KETERANGAN
1.	Laba Berjalan Tahun 2019 Taksiran Pajak Penghasilan Laba Bersih setelah Pajak		4.922.075.368 1.255.994.152 3.666.081.216	Disetor ke KAS PEMDA Kabupaten Majalengka
2.	Bagian Daerah	55	2.016.344.669	
3.	CADANGAN • Cadangan Umum • Cadangan Tujuan	<b>20</b>	<b>733.216.243</b> 366.608.122 366.608.121	
4.	Corporate Social Responsibility (CSR)	3	109.982.436	
5.	Tantiem	4	146.643.249	
6.	Jasa Produksi	8	293.286.497	
7.	Dana Kesejahteraan	10	366.608.122	

Demikian lembar pengesahan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majalengka, 23 Maret 2020  
BUPATI MAJALENGKA



**Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd**

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Penyusunan dan penyajian Laporan Tahunan Perumda BPR Majalengka Tahun 2019 dilatarbelakangi oleh ketentuan, tuntutan dan kewajiban yang diamanatkan dalam:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR, tepatnya Pasal 2 ayat (1) huruf a;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah, tepatnya Pasal 50 ayat (1) huruf e; dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka, tepatnya Pasal 53 ayat (1) huruf e.

## 1.2. Identifikasi Pembahasan

Identifikasi pembahasan yang disajikan dalam Laporan Tahunan Perumda BPR Majalengka Tahun 2019 mengacu dan berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam:

- Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR;
- Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah; dan
- Pasal 87 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka;

yang mengatur bahwa Laporan Tahunan paling sedikit memuat:

1. Informasi Umum, yang meliputi antara lain:
  - a. kepengurusan;
  - b. kepemilikan;
  - c. perkembangan usaha;
  - d. strategi dan kebijakan manajemen; dan
  - e. laporan manajemen;
2. Laporan Keuangan Tahunan yang terdiri atas:
  - a. neraca;
  - b. laporan laba rugi;
  - c. laporan perubahan ekuitas;
  - d. laporan arus kas; dan

- e. catatan atas laporan keuangan, meliputi:
- 1) opini dari akuntan publik atas Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit oleh akuntan publik;
  - 2) ikhtisar kebijakan akuntansi;
  - 3) penjelasan atas pos-pos laporan keuangan;
  - 4) komitmen dan kontijensi;

3. Surat Komentaar (*Management Letter*) atas audit Laporan Keuangan Tahunan.

Penyajian secara rinci dalam Laporan Tahunan ini yang paling sedikit mencakup angka 1 s.d angka 3 di atas, disusun dengan mengacu dan berpedoman pada butir II.1 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi BPR, dan angka 3 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2017 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi BPR.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dan penyampaian laporan tahunan ini dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan dan tuntutan sebagaimana diatur dalam:

- Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR;
- Pasal 50 ayat (1) huruf e, Pasal 78 ayat (1), ayat (3), ayat (4) ayat (5) dan ayat (6), serta Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah; dan
- Pasal 53 ayat (1) huruf e, Pasal 85 ayat (1), ayat (3), ayat (4) ayat (5) dan ayat (6), serta Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka.

Tujuan penyusunan dan penyajian laporan tahunan ini untuk memberikan gambaran lengkap mengenai kinerja Perumda BPR Majalngka dalam kurun waktu 1 (satu) tahun untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang antara lain berisi informasi umum dan Laporan Keuangan Tahunan serta hal-hal lain yang terkait dengan laporan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR.

#### 1.4. Metode dan Teknik

Dalam rangka memenuhi maksud dan tujuan penyusunan laporan sebagaimana diuraikan pada angka 1.3 di atas, penyajian laporan tahunan ini didukung dengan data primer dan skunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Direksi, Satuan Pengawas Intern dan Divisi Operasional guna mendapatkan tambahan penjelasan tentang permasalahan yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha beserta upaya yang telah dan akan dilakukan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai tabel rekapitulasi dan informasi lain terkait realisasi pelaksanaan dan perkembangan kegiatan usaha yang disusun oleh Divisi Operasional dan Satuan Pengawas Internal, laporan hasil audit AP dan/atau KAP yang ditunjuk, Laporan Hasil Pemeriksaan Umum dan/atau Pemeriksaan Khusus OJK, dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Selanjutnya berdasarkan data primer dan data skunder dimaksud, dilakukan analisis dengan metode horizontal yaitu dengan menggunakan data perkembangan kondisi keuangan selama 1 (satu) tahun dari posisi 31 Desember 2018 s.d 31 Desember 2019 dan dengan tehnik komparatif serta tehnik perbandingan antara realisasi beberapa komponen utama laporan keuangan 31 Desember 2019 dengan target RBB dan dengan realisasi beberapa komponen utama laporan keuangan 31 Desember 2018.

#### 1.5. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan laporan tahunan ini dijabarkan dalam informasi umum, pokok-pokok laporan manajemen, serta pokok-pokok laporan keuangan tahunan dan hal-hal lain yang terkait dengan laporan keuangan tahunan Perumda BPR Majalengka dengan struktur penulisan dan pembahasan sebagai berikut:

##### 1. Bab I Pendahuluan

Bab ini secara berurutan menguraikan tentang Latar belakang penyusunan laporan tahunan, Identifikasi pembahasan, Penyampaian tujuan dan maksud penyajian sebagai sasaran utama laporan tahunan ini dan uraian tentang Metode dan ublic penyusunan laporan tahunan sebagai upaya agar pemaparan materi laporan dapat dipertanggungjawabkan, kemudian diakhiri dengan Sistematika pembahasan yang merupakan penjelasan global dari cakupan uraian yang dipaparkan dalam laporan tahunan ini.

## 2. Bab II Informasi Umum Perumda BPR Majalengka

Bab ini memaparkan mengenai Susunan kepengurusan, Kepemilikan, Perkembangan usaha yang mencakup riwayat ringkas pendirian, ikhtisar data keuangan penting, Rasio keuangan seperti rasio KAP, KPMM, NPL, PPAP, ROA, BOPO, *cash ratio* dan LDR, penjelasan mengenai NPL termasuk penyebab utama NPL, perkembangan usaha yang berpengaruh secara signifikan terhadap BPR pada periode laporan, dan kemudian dipungkasi dengan Strategi dan kebijakan manajemen dalam mengelola dan mengembangkan usaha BPR termasuk informasi mengenai manajemen risiko.

## 3. Bab III Pokok-Pokok Laporan Manajemen Perumda BPR Majalengka

Bab ini menyajikan informasi mengenai pengelolaan BPR dalam rangka tata kelola yang baik meliputi Struktur organisasi, Bidang usaha sesuai anggaran dasar dan kegiatan utama pada periode laporan, Teknologi informasi, Perkembangan target pasar, Jumlah dan jenis serta lokasi jaringan kantor, Kerjasama BPR dengan bank atau Lembaga lain dalam rangka pengembangan usaha, Kepemilikan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham dalam kelompok usaha BPR dan perubahan kepemilikan dari tahun sebelumnya, Keterkaitan antar pemegang saham, antar anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, antar anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, dan/atau antara pemegang saham dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, Sumber daya manusia, Kebijakan pemberian gaji, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris termasuk bonus, tantiem dan fasilitas lain, dan diakhiri dengan Perubahan penting lain yang terjadi di BPR dan/atau kelompok usaha BPR yang mempengaruhi operasional BPR dalam tahun yang bersangkutan.

## 4. Bab IV. Pokok-Pokok Laporan Keuangan Tahunan Perumda BPR Majalengka

Bab ini berisi pokok-pokok laporan keuangan tahunan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya, paling sedikit meliputi Laporan posisi keuangan, Laporan laba rugi tahun buku yang bersangkutan, Laporan perubahan ekuitas, Laporan arus kas, dan Catatan atas laporan keuangan yang penyajiannya mencakup Opini dari akuntan publik atas Laporan Keuangan Tahunan, Ikhtisar kebijakan akuntansi, Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan, Komitmen dan kontijensi, dan dipungkasi dengan Surat Komentar (*Management Letter*) atas audit Laporan Keuangan Tahunan Perumda BPR Majalengka.

## 5. Penutup

## BAB II

### INFORMASI UMUM PERUMDA BPR MAJALENGKA

#### 2.1. Susunan Kepengurusan dan Kepemilikan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka selanjutnya disingkat Perumda BPR Majalengka adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dan tidak terbagi atas saham.

Susunan kepengurusan yang meliputi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas serta pejabat eksekutif, dan kepemilikan serta kategori modal inti Perumda BPR Majalengka sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

- Dewan Pengawas : Abdul Jamil (Ketua, merangkap Anggota).
- Direksi :
  1. Atjeng Hadis Susanto (Direktur Utama, merangkap Direktur Kepatuhan)
  2. Asep M. Jamaludin (Direktur Operasional).
- Pejabat Eksekutif :
  1. Adin Akhmadin (Kepala Satuan Pengawas Intern)
  2. Ronni D. Isnandi (Kepala Divisi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Umum)
  3. Udin (Kepala Divisi Operasional)
  4. Tisyanto (Kepala Divisi Pemasaran)
  5. Agus Mulyana (Kepala Kantor Pusat Operasional)
  6. Usep Wira Santika (Pemimpin Cabang Rajagaluh)
  7. Nandan Sudiana (Pemimpin Cabang Jatitujuh)
  8. Sunara (Pemimpin Cabang Ligung)
  9. Iis Saenawati (Pemimpin Cabang Kertajati)
  10. Sahidi (Pemimpin Cabang Kadipaten)
  11. Nandan Sudiana, Pjs (Pemimpin Cabang Cikijing)
  12. Edwan Redwan (Pemimpin Cabang Bantarujeg)
  13. Imsan (Pemimpin Cabang Sukahaji)
- Kepemilikan : Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, dengan nominal modal disetor Rp. 7.061.779 ribu (100%) dari modal dasar Rp. 10.000 ribu

- Modal Inti periode : Rp. 19.858.245 ribu, kurang dari atau di bawah  
31 Desember 2019 Rp. 50.000.000 ribu

Ringkasan riwayat hidup anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, serta pejabat eksekutif Perumda BPR Majalengka diuraikan pada Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Tahunan ini.

## 2.2. Perkembangan Usaha

### 2.2.1. Riwayat Singkat Pendirian

Cikal bakal berdirinya Perumda BPR Majalengka berasal dari 8 (delapan) Bank Karya Produksi Desa (BKPD) yang berkedudukan tersebar di 8 (delapan) Kecamatan di wilayah Kabupaten Majalengka yaitu Kecamatan Rajagaluh, Kecamatan Jatitujuh, Kecamatan Ligung, Kecamatan Kertajati, Kecamatan Kadipaten, Kecamatan Cikijing, Kecamatan Bantarujeg dan Kecamatan Sukahaji. Kemudian dengan berlandaskan pada Paket Kebijakan 28 Oktober 1988 (PAKTO 1988) yang dikeluarkan oleh Pemerintah bersama Bank Indonesia, 8 (delapan) BKPD tersebut disesuaikan statusnya masing-masing menjadi PD BPR Rajagaluh, PD BPR Jatitujuh, PD BPR Ligung, PD BPR Kertajati, PD BPR Kadipaten, PD BPR Cikijing, PD BPR Bantarujeg dan PD BPR Sukahaji dengan kepemilikan tunggal (100%) yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.

Perkembangan berikutnya pada tanggal 2 Juli 2008, sebanyak 7 (tujuh) PD BPR dari 8 (delapan) PD BPR dimaksud yaitu PD BPR Rajagaluh, PD BPR Jatitujuh, PD BPR Ligung, PD BPR Kertajati, PD BPR Kadipaten, PD BPR Cikijing dan PD BPR Bantarujeg melakukan merger ke dalam PD BPR Sukahaji berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Sukahajii; dan
2. Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/KEP/DpG/2008 tanggal 3 Mei 2008 tentang Izin Merger 7 (tujuh) PD BPR di Wilayah Kabupaten Majalengka ke dalam PD BPR Sukahaji.

Secara resmi PD BPR Sukahaji berganti nama menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka atau disingkat Perumda BPR Majalengka berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama PD BPR Sukahajii menjadi Perumda BPR Majalengka; dan

89

2. Surat Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 2 Jawa Barat Nomor KEP-34/KR.2/2015 tanggal 14 Agustus 2015.

Selanjutnya dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah serta dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah, maka anggaran dasar Perumda BPR Majalengka sebagaimana tertuang dalam:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Sukahaji; dan
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama PD BPR Sukahaji menjadi Perumda BPR Majalengka;
- disesuaikan melalui penerbitan dan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Daerah BPR Majalengka pada tanggal 25 Oktober 2019.

#### 2.2.2. Ikhtisar Data Keuangan Utama

**PERUMDA BPR MAJALENGKA**  
**IKHTISAR DATA KEUANGAN UTAMA**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019  
 Dengan Pembanding Target Rencana Bisnis Tahun 2019  
 (Ribuan Rupiah)

KOMPONEN KEUANGAN UTAMA	Realisasi 31 Des 2019	Target 31 Des 2019	% Realisasi dari Target
Aset	169.692.121	177.997.425	95.33
Kredit yang diberikan	112.959.574	135.580.045	83.32
Penempatan pada bank lain	54.189.081	34.928.771	155.14
Dana Pihak Ketiga	141.103.358	143.878.329	98.07
a. Tabungan	81.681.668	86.708.227	94.20
b. Deposito	59.421.690	57.170.102	103.94
Simpanan dari bank lain	537.936	184.218	292.01
Pinjaman diterima	4.558.666	4.558.668	100.00
Pendapatan operasional	37.413.980	40.755.032	91.80
Beban operasional	32.493.511	32.189.925	100.94
Pendapatan non operasional	123.823	159.000	77.88
Beban non operasional	122,216	635.600	19.23
Laba sebelum Pajak Penghasilan (PPh)	4.922.075	8.088.507	60.85
Taksiran Pajak Penghasilan (PPh)	1.255.994	1.903.510	65.98
Laba bersih	3.666.081	6.184.997	59.27
Modal inti	19.858.245	24.055.923	82.55

**PERUMDA BPR MAJALENGKA**  
**IKHTISAR DATA KEUANGAN UTAMA**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019  
 Dengan Pembandingan Tahun 2018  
 (Ribuan Rupiah)

KOMPONEN KEUANGAN UTAMA	Realisasi 31 Des 2019	Realisasi 31 Des 2018	Deviasi %
Aset	169.692.121	180.942.488	-6.22
Kredit yang diberikan	112.959.574	118.246.467	-4.47
Penempatan pada bank lain	54.189.081	57.297.128	-5.42
Dana Pihak Ketiga	141.103.358	147.716.064	-4.48
a. Tabungan	81.681.668	80.315.462	1.70
b. Deposito	59.421.690	67.400.602	-11.84
Simpanan dari bank lain	537.936	117.017	359.71
Pinjaman diterima	4.558.666	6.937.716	-34.29
Pendapatan operasional	37.413.980	36.818.518	1.62
Beban operasional	32.493.511	29.442.160	10.36
Pendapatan non operasional	123.823	689.007	-82.03
Beban non operasional	122,216	152.575	-19.90
Laba sebelum Pajak Penghasilan (PPh)	4.922.075	7.912.964	-37.80
Taksiran Pajak Penghasilan (PPh)	1.255.994	1.884.341	-33.35
Laba bersih	3.666.081	6.028.613	-39.19
Modal inti	19.858.245	19.833.181	0.13

2.2.3. Rasio Keuangan

**PERUMDA BPR MAJALENGKA**  
**RASIO KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019  
 Dengan Pembandingan Target Rencana Bisnis Tahun 2019  
 (Dalam Prosentase)

INDIKATOR KEUANGAN UTAMA	Realisasi 31 Des 2019	Target 31 Des 2019	Deviasi
Rasio KPMM	18,84	18,61	0,23
Rasio Modal Inti	18,37	18,11	0,26
Rasio Aset Produktif yg Diklasifikasikan terhadap Aset Produktif (KAP)	5,89	2,41	3,48
Rasio PPAP terhadap PPAP yang Wajib Dibentuk	100	100	-
Rasio Non Performing Loan (NPL)			
a. Gross	10,56	3,30	7,26
b. Netto	6,33	1,14	5,19
Rasio Kredit terhadap Total Aset Produktif	66,57	82,51	-15,94
Rasio Return On Assets (ROA)	3,01	4,71	-1,70
Rasio Net Interest Margin (NIM)	15,75	17,39	-1,64
Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	86,75	78,98	7,77
Cash Ratio (CR)	37,45	20,53	16,92
Loan to Deposit Ratio (LDR)	69,48	80,23	-10,75
Rasio Kredit UMKM terhadap Total Kredit (UMKM)	43,49	47,85	-4,36

80

**PERUMDA BPR MAJALENGKA**  
**RASIO KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019  
 Dengan Pembandingan Tahun 2018  
 (Dalam Prosentase)

INDIKATOR KEUANGAN UTAMA	Realisasi 31 Des 2019	Realisasi 31 Des 2018	Deviasi
Rasio KPMM	18,84	17,58	1.26
Rasio Modal Inti	18,37	17,08	1.29
Rasio Aset Produktif yg Diklasifikasikan terhadap Aset Produktif (KAP)	5,89	2,57	3.32
Rasio PPAP terhadap PPAP yang Wajib Dibentuk	100	100	-
Rasio <i>Non Performing Loan (NPL)</i>			
a. <i>Gross</i>	10,56	4,11	6.45
b. <i>Netto</i>	6,33	1,89	4.44
Rasio Kredit terhadap Total Aset Produktif	68,08	67,98	0.10
Rasio <i>Return On Assets (ROA)</i>	3,01	4,49	-1.48
Rasio <i>Net Interest Margin (NIM)</i>	15,75	16,05	-0.30
Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	86,75	79,97	6.78
<i>Cash Ratio (CR)</i>	37,45	33,57	3.88
Loan to Deposit Ratio (LDR)	69,48	69,14	0.34
Rasio Kredit UMKM terhadap Total Kredit (UMKM)	43,49	46,07	-2.58

2.2.4. Penjelasan *Non Performing Loan (NPL)*

Realisasi rasio NPL *gross* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai 10,56% atau dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis sebesar 3,30% terjadi pelampauan terhadap target yang relatif tinggi yaitu sebesar 7,26%. Sementara dibandingkan dengan realisasi rasio NPL tahun sebelumnya yaitu per tanggal 31 Desember 2018 yang tercatat sebesar 4,11%, terjadi penurunan kualitas kredit yang cukup signifikan sebagaimana tercermin pada peningkatan rasio NPL sebesar 6,45%. Pelampauan terhadap target dan penurunan kualitas kredit atau peningkatan rasio NPL yang relatif tinggi dan cukup signifikan dimaksud dipicu oleh beberapa hal yang terjadi selama periode tahun 2019:

- Realisasi kredit yang diberikan hanya mencapai 83,32% dibanding target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis atau 16,68% di bawah target yang direncanakan;
- Realisasi outstanding kredit yang tergolong non lancar mencapai Rp.12.206.669 ribu dari target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis

sebesar Rp.4.567.138 ribu atau mencapai 267,27% dari target yang direncanakan;

- Menurunnya kredit yang diberikan sebesar 4,47% dibanding posisi 31 Desember 2018 yaitu dari Rp.118.246.467 ribu menjadi Rp.112.959.574 ribu, disertai dengan berkurangnya jumlah debitur sebanyak 226 debitur;
- Meningkatnya outstanding kredit yang tergolong non lancar sebesar 174,22% dari posisi 31 Desember 2018 yaitu dari Rp.4.451.469 ribu menjadi Rp.12.206.669 ribu, disertai dengan penambahan debitur non lancar mencapai 341 debitur. Dominasi 5 (lima) besar jaringan kantor yang memberikan kontribusi peningkatan *non performing loans* tersebut secara berurutan terjadi pada Kantor Cabang Sukahaji (65,83%), Kantor Pusat Operasional (8,64%), Kantor Cabang Rajagaluh (8,31%), Kantor Cabang Jatitujuh (6,63%), dan Kantor Cabang Kadipaten (4,02%).

Pelampauan realisasi kredit non lancar sebesar 167,27% di atas target yang direncanakan dan/atau peningkatan outstanding kredit non lancar sebesar 174,22% dibanding posisi akhir tahun 2018, disebabkan:

1. Kebijakan, rencana dan langkah-langkah strategis dalam rangka perbaikan kualitas kredit dan penurunan NPL, serta peningkatan fungsi intermediasi funding maupun lending sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Bisnis Tahun 2019 dalam pelaksanaannya tidak dilakukan secara memadai, terutama terkait langkah-langkah untuk:
  - a. menurunkan kredit bermasalah melalui berbagai kebijakan pembinaan, pemberian keringanan, restrukturisasi dan penyelamatan kredit, pemantauan terhadap outstanding kredit dan terus melakukan pemberian kredit baik yang bersifat mengganti angsuran dan/atau pelunasan kredit maupun yang bersifat meningkatkan pertumbuhan kredit terutama kredit UMKM, yang disertai dengan perbaikan kualitas penyaluran kredit;
  - b. mengembangkan strategi pemasaran secara bauran marketing, segmentasi pasar dan pengembangan produk funding maupun lending antara lain dengan membangun kemitraan atau kerjasama, sehingga rasio LDR setiap semester menjadi semakin membaik atau semakin meningkat.
2. Dari aspek prosedur serta proses penyaluran kredit dikaitkan dengan kondisi kualitas kredit cenderung mengabaikan azas pemberian kredit yang sehat

dan kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian, sehingga dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kelemahan yang berdampak pada penurunan kualitas kredit dan peningkatan NPL.

3. Upaya perbaikan tingkat kepatuhan, serta peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia belum dilakukan secara memadai, terencana dan berkesinambungan.

#### 2.2.5. Perkembangan Usaha yang berpengaruh secara signifikan

Perkembangan usaha yang berpengaruh secara signifikan seperti penambahan atau pengurangan kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor belum direncanakan dan dilaksanakan dalam periode tahun 2019, sehingga perkembangan kinerja Perumda BPR Majalengka tidak dipengaruhi oleh faktor penambahan atau pengurangan kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor.

#### 2.3. Strategi dan Kebijakan Manajemen dalam Mengelola dan Mengembangkan Usaha

Strategi dan kebijakan manajemen dalam mengelola dan mengembangkan usaha Perumda BPR Majalengka tercermin sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Bisnis tahun 2019, sesuai visi dan misi focus utama pada rencana dan langkah-langkah strategis:

1. Perbaikan kualitas kredit dan penurunan NPL melalui langkah-langkah menurunkan kredit bermasalah dengan berbagai kebijakan pembinaan, pemberian keringanan, restrukturisasi dan penyelamatan kredit, serta melakukan pemantauan terhadap outstanding kredit dan terus melakukan pemberian kredit baik yang bersifat mengganti angsuran dan/atau pelunasan kredit maupun yang bersifat meningkatkan pertumbuhan kredit terutama kredit UMKM, yang disertai dengan perbaikan kualitas penyaluran kredit;
2. Peningkatan fungsi intermediasi funding maupun lending yang dibarengi dengan perbaikan tata kelola dan manajemen risiko melalui langkah-langkah mengembangkan strategi pemasaran secara bauran marketing, segmentasi pasar dan pengembangan produk funding maupun lending antara lain dengan membangun kemitraan atau kerjasama, sehingga rasio LDR setiap semester menjadi semakin membaik atau meningkat;
3. Peningkatan efisiensi dibarengi dengan inovasi dan peningkatan sumber pendapatan alternatif melalui langkah-langkah menurunkan, mengelola dan/atau

mengendalikan komponen BOPO diikuti dengan inovasi dan peningkatan sumber pendapatan alternative sehingga pencapaian ROA semakin optimal.

4. Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM dibarengi dengan perbaikan kesejahteraan pegawai melalui langkah-langkah meningkatkan kompetensi SDM dan menempuh kebijakan promosi, mutasi dan rotasi pegawai yang diikuti dengan perbaikan tingkat kesejahteraan pegawai
5. Perbaikan dan peningkatan sarana, prasarana dan infrastruktur operasional secara bertahap, termasuk penyediaan sarana pengamanan data melalui langkah-langkah memperbaiki dan meningkatkan sarana, prasarana, infrastruktur penunjang operasional secara bertahap, termasuk penyediaan sarana pengamanan data.

Namun demikian mengingat bahwa strategi dan kebijakan manajemen tersebut dalam pelaksanaannya tidak dilakukan secara memadai serta dari aspek prosedur dan proses penyaluran dana dalam bentuk kredit yang diberikan cenderung mengabaikan azas pemberian kredit yang sehat dan kurang memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, maka sasaran dan target strategis yang telah ditetapkan seperti rasio KAP, NPL, BOPO, ROA, *cash ratio* dan LDR sebagian besar tidak tercapai sehingga kinerja Perumda BPR Majalengka dalam periode tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan berada jauh di bawah target yang ditetapkan.

**BAB III**  
**POKOK-POKOK LAPORAN MANAJEMEN**  
**PERUMDA BPR MAJALENGKA**

3.1. Struktur Organisasi



3.2. Kegiatan Usaha sesuai Anggaran Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka, kegiatan usaha Perumda BPR Majalengka meliputi:

8

1. menghimpun dana dari masyarakat dan pemerintah berupa simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melakukan pembinaan terhadap pengusaha yang bergerak pada usaha mikro, kecil dan menengah;
3. menempatkan dana pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
4. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
5. membantu pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
6. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
7. melakukan kegiatan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Selanjutnya atas dasar pengelompokan kegiatan usaha BPR sesuai dengan Modal Inti sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR, Perumda BPR Majalengka tergolong dalam kelompok BPRKU 2 dengan kegiatan usaha yang dapat dilakukan meliputi:

1. penghimpunan dana dalam bentuk:
  - a. simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
  - b. pinjaman yang diterima;
2. penyaluran dana;
3. penempatan dana dalam bentuk:
  - a. giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank umum dan bank umum syariah;
  - b. deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada BPR dan bank pembiayaan rakyat syariah;
  - c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
4. kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR dalam bentuk 8 (delapan) jenis kegiatan pendukung sebagaimana diatur pada pasal 5 ayat (2) huruf b POJK Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti;

5. kegiatan usaha penukaran valuta asing; dan
6. kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR dalam bentuk:
  - a. kegiatan sebagai penerbit Kartu Debet; dan
  - b. kegiatan sebagai penerbit Uang Elektronik.

Kondisi saat ini sampai dengan 31 Desember 2019, kegiatan utama yang dilakukan oleh Perumda BPR Majalengka baru mencakup:

1. penghimpunan dana dalam bentuk:
  - a. simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dari pihak ketiga;
  - b. simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dari bank lain;
  - c. pinjaman yang diterima;
2. penyaluran dana dalam bentuk kredit yang diberikan;
3. penempatan dana dalam bentuk:
  - a. giro, deposito berjangka dan/atau tabungan pada bank umum dan bank umum syariah;
  - b. deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada BPR;
4. beberapa kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha Perumda BPR Majalengka.

Berdasarkan kondisi sebagaimana disebutkan di atas, menunjukkan masih adanya kesenjangan antara normatif kegiatan usaha yang dapat dilakukan sesuai anggaran dasar dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR dengan fakta kegiatan usaha saat ini yang dilakukan oleh Perumda BPR Majalengka. Hal tersebut merupakan tantangan dan kesempatan bagi Perumda BPR Majalengka dalam rangka mengembangkan usahanya di masa-masa yang akan datang.

### 3.3. Teknologi Informasi

Sistem operasional transaksi terhitung sejak tahun 2013 telah dilakukan secara *on-line* dan *realtime* dengan database terpusat di Kantor Pusat Perumda BPR Majalengka. Transaksi sehari-hari dapat dilakukan secara *mobile* di seluruh jaringan kantor, baik di kantor pusat operasional, kantor cabang maupun kantor kas. Meskipun terdapat kendala kurangnya fasilitas data center dan server aplikasi, namun *IBS collect/mobile* masih efektif digunakan. Dari total 20 (dua puluh) perangkat *IBS collect/mobile*



yang beroperasi hanya 13 unit, hal ini dikarenakan 7 unit perangkat printer *mobile* dalam kondisi rusak dan perlu diperbaiki.

Dalam upaya mendukung perbaikan pengelolaan SDM dan peningkatan kinerja, Perumda BPR Majalengka. telah membangun dan mengembangkan:

- Aplikasi Sistem Informasi Karyawan, dengan tujuan utama untuk memudahkan dan memperlancar antara lain terkait kegiatan sosialisasi kebijakan, informasi tingkat kehadiran karyawan, dan data kinerja karyawan baik kinerja secara individual maupun kinerja tim;
- Aplikasi Sistem Manajemen Kredit, yang dilakukan secara online mulai dari pengajuan permohonan kredit, pengecekan pemenuhan persyaratan kredit, analisa kredit, proses dan rekomendasi komite kredit, serta putusan kredit dan diarsipkan dengan format digital.

Terkait kerjasama di bidang Teknologi Informasi, pada tahun 2019 Perumda BPR Majalengka masih melakukan kerja sama dengan:

- PT USSI, terkait penyediaan *Core Banking System*. Hal yang cukup *urgent* yang terjadi pada tahun 2019 adalah dilakukannya update *Exe IBS System* yang mengakomodasi sistem perhitungan PPAP dan Kolektibilitas kredit sesuai POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan PPAP;
- PT. INFOKOM, dalam penyediaan jasa Jaringan Tertutup terkait layanan transaksi antar kantor;
- PT. TELKOM, dalam penyediaan jaringan internet untuk transaksi di Kantor Pusat Pusat Operasional, Kantor Cabang dan Kantor Kas sebagai upaya meningkatkan pengamanan data dan pelayanan prima.

Pada tahun 2019, pengadaan DRC belum dapat dilaksanakan meskipun telah dianggarkan dan ditetapkan dalam Rencana Bisnis. hal ini dikarenakan masih terdapat skala prioritas lain dalam penanganan permasalahan internal Perumda BPR Majalengka. Pengadaan DRC telah dianggarkan dan tetapkan kembali dalam Rencana Bisnis tahun 2020, yang sesuai rencana akan ditempatkan di gedung baru Kantor Cabang Kertajati atau Kantor Cabang Jatitujuh.

#### 3.4. Perkembangan dan Target Pasar

Berdasarkan karakteristik, kondisi dan potensi perekonomian daerah Kabupaten Majalengka, perkembangan pasar yang digarap oleh Perumda BPR Majalengka terkait fungsi intermediaasi *funding* maupun *lending* diperkirakan 54% merupakan rumah

tangga konsumtif dan selebihnya sekitar 46% dikategorikan sebagai sektor UMKM. Dengan kondisi perkembangan pasar yang demikian, target pasar Perumda BPR Majalengka dalam periode tahun 2019 dan tahun-tahun berikutnya mengupayakan peningkatan pangsa pasar sektor UMKM dalam rangka mendukung penguatan pondasi dan meningkatkan pemerataan perekonomian daerah kabupaten Majalengka.

### 3.5. Jumlah, Jenis dan Lokasi Jaringan Kantor

Kedudukan Kantor Pusat Perumda BPR Majalengka beralamat di Jalan KH. Abdul Halim No.388 Majalengka, Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah jaringan kantor terdiri dari 1 (satu) Kantor Pusat Operasional (KPO) dan 8 (delapan) Kantor Cabang yang tersebar di kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Majalengka, yaitu:

- Kantor Cabang Rajagaluh, berlokasi di Kecamatan Rajagaluh;
- Kantor Cabang Jatitujuh, berlokasi di Kecamatan Jatitujuh;
- Kantor Cabang Ligung, berlokasi di Kecamatan Ligung;
- Kantor Cabang Kertajati, berlokasi di Kecamatan Kertajati;
- Kantor Cabang Kadipaten, berlokasi di Kecamatan Kadipaten;
- Kantor Cabang Cikijing, berlokasi di Kecamatan Cikijing;
- Kantor Cabang Bantarujeg, berlokasi di Kecamatan Bantarujeg; dan
- Kantor Cabang Sukahaji, berlokasi di Kecamatan Sukahaji;

serta 7 (tujuh) Kantor Kas dengan rincian:

- Kantor Kas Cigasong, berlokasi di Kecamatan Cigasong;
- Kantor Kas Leuwimunding, berlokasi di Kecamatan Leuwimunding
- Kantor Kas Panjalin, berlokasi di Kecamatan Sumberjaya;
- Kantor Kas Kasokandel, berlokasi di Kecamatan Kasokandel;
- Kantor Kas Jatiwangi, berlokasi di Kecamatan Jatiwangi;
- Kantor Lemahsugih berlokasi di Kecamatan Lemahsugih; dan
- Kantor Kas Maja, berlokasi di Kecamatan Maja.

### 3.6. Kerjasama dengan bank atau lembaga lain dalam rangka pengembangan usaha

Dalam tahun 2019, kerjasama yang dilakukan dengan bank atau lembaga lain dalam rangka pengembangan usaha sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 antara lain kerjasama dengan:

1. Bank Jabar Banten Cabang Majalengka terkait penyelesaian angsuran dan/atau pelunasan skim kredit Sertifikasi Guru ASN/PNS, dan Skim Kredit Pegawai Perumda BPR Majalengka.
  2. Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka terkait Skim Kredit Jasa Pelayanan (Jaspel).
  3. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Majalengka terkait Skim Kredit PNS/ASN.
  4. Value Stream Indonesia terkait dengan pelayanan *Payment Point Online Bank* (PPOB).
  5. PT. USSI Pinbuk terkait penggunaan *System Operation Banking*.
  6. PT. Infokom terkait sewa jaringan tertutup.
  7. Universitas Majalengka terkait penelitian dan pengembangan terhadap operasional bank.
  8. PT. Mutiara Anugrah Mandiri terkait kerja sama Skim Kredit Kepemilikan Los dan Kios di Pasar Desa Cikijing Kabupaten Majalengka.
- 3.7. Kepemilikan oleh Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham dalam kelompok usaha BPR.

Perumda BPR Majalengka sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 tidak memiliki kelompok usaha, hal ini antara lain menyebabkan tidak terdapatnya kepemilikan dalam kelompok usaha dimaksud baik oleh anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas dan/atau Pemegang Saham Perumda BPR Majalengka.

- 3.8. Keterkaitan antar pemegang saham, antar anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, dan/atau antara Pemegang Saham dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Antar Pemegang Saham, antar anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas, antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Pengawas, dan/atau antara Pemegang Saham dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Penagawas tidak memiliki keterkaitan dalam arti tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dan/atau hubungan keuangan dan kepengurusan.

### 3.9. Sumber Daya Manusia

Secara kuantitas, jumlah Sumber Daya Manusia pada Perumda BPR Majalengka sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) orang dengan status hubungan kerja, komposisi dan latar belakang pendidikan terakhir sebagai berikut:

1. Pengurus, terdiri dari 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas dan 2 (dua) orang anggota Direksi dengan latar belakang pendidikan terakhir S1;
2. Pegawai tetap sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) orang dengan rincian latar belakang pendidikan terakhir:
  - 2 (dua) orang S2;
  - 88 (delapan puluh delapan) orang S1;
  - 10 (sepuluh) orang D3;
  - 49 (empat puluh sembilan) orang SLTA; dan
  - 2 (dua) orang SLTP
3. Pegawai dengan status tenaga kontrak sebanyak 14 (empat belas) orang.
4. Dalam rangka pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM, selama tahun 2019 telah dilaksanakan:
  - a. Kebijakan promosi pegawai dalam tahun yang bersangkutan, dan kebijakan mutasi, rotasi dan reposisi pegawai yang dilakukan per semester;
  - b. Penyelenggaraan beberapa program pelatihan dan/atau mengikutsertakan pengurus dan pegawai dalam program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal, diantaranya:
    - Sertifikasi dan Kompetensi Direksi dan Dewan Pengawas;
    - Pelatihan Penyusunan Laporan Audit Intern
    - *Emotional Spiritual dan Quotation* (ESQ)
    - Penerapan Pelaporan Profile Manajemen Risiko Kredit dan Manajemen Risiko Kepatuhan.
    - Workshop Penyelesaian Tunggakan Kredit dan Perbaikan NPL dengan 11 Langkah Efektif sesuai POJK 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan PPAP;
    - Training pembekalan Pejabat Eksekutif Internal Audit dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan & Manajemen Risiko;
    - Penerapan Manajemen Risiko;
    - Sosialisasi Laporan Bulanan Versi OJK;
    - Sosialisasi Penerapan POJK No.33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan PPAP;
    - Pelatihan Administrasi Perkreditan Online;

- *Training Selling Skill for Basic*;
- Pelatihan Peningkatan Keterampilan Penjualan Produk BPR;
- Pelatihan Analisa Kredit berbasis Cash Flow dengan aplikasi Smart Analysis;
- Sosialisasi BPJK Ketenagakerjaan Program Jaminan Pensiun;
- Pelatihan *Character Building* SDM BUMD Kabupaten Majalengka;
- Pelatihan Penyusunan Rencana Bisnis; dan
- Pelatihan Penyesuaian *Core Banking* sesuai POJK 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan PPAP.

### 3.10. Kebijakan Pemberian Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.

Kebijakan pemberian gaji, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas, termasuk tantiem dan fasilitas lain mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah; dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka.

#### 3.10.1. Penghasilan anggota Direksi

Sesuai Pasal 59 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah, dan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka, penghasilan anggota Direksi terdiri atas:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Selanjutnya sesuai Pasal 60 dan Pasal 61 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah, dan Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka diatur lebih lanjut bahwa:

- a. Direksi diberikan gaji pokok yang besarnya:
  - 1) Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) dari gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan

- 2) Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
- b. Direksi diberikan tunjangan, terdiri dari:
    - 1) tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan BPR;
    - 2) tunjangan istri/suami dan anak;
    - 3) tunjangan jabatan yang besarnya 1 (satu) kali gaji pokok;
    - 4) tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan BPR; dan
    - 5) tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan BPR.
  - c. Direksi diberikan fasilitas terdiri dari fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah dan fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan BPR.
  - d. Direksi diberikan tantiem atau insentif pekerjaan bersumber dari penggunaan laba sebesar 4% (empat persen) dengan perbandingan penerimaan anggota Direksi masing-masing 80% dari yang diterima oleh Direktur Utama.
  - e. Direksi dapat diberikan jasa pengabdian pada setiap akhir masa jabatan yang besarnya 5% (lima persen) dari laba sebelum dipotong pajak dari tahun sebelum akhir masa jabatan, dengan perbandingan anggota Direksi paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama. Anggota Direksi yang diperhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapatkan jasa pengabdian secara proporsional, dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
  - f. Setiap bulan Direktur Utama dapat disediakan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.
  - g. Direksi dapat disediakan dana representatif yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan BPR dan dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulia berupa pakta integritas.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan pemberian gaji, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi termasuk pemberian tantiem belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten



Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka. Rincian pelaksanaan kebijakan pemberian penghasilan bagi anggota Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur Operasional selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Komponen penghasilan bulanan terdiri dari:
  - a. gaji pokok, yang seharusnya sesuai anggaran dasar untuk:
    - Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima), namun dengan pertimbangan kemampuan BPR ditetapkan 2,1 (dua koma satu) dari gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai;
    - anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
  - b. tunjangan, meliputi:
    - tunjangan istri paling banyak 5% dari gaji pokok;
    - tunjangan anak paling banyak 5% dari gaji pokok, paling banyak 2 (dua) anak;
    - tunjangan jabatan paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok; dan
    - tunjangan kemahalan paling banyak 10% dari jumlah komponen penghasilan bulanan sebelum memperhitungkan komponen tunjangan ini.

Komponen tunjangan kemahalan digunakan sebagai pengganti tunjangan kinerja yang saat ini belum diperhitungkan, mengingat sesuai anggaran dasar tunjangan kinerja merupakan salah satu komponen penghasilan anggota Direksi dalam kelompok tunjangan.
  - c. fasilitas pengganti sewa rumah atau tunjangan perumahan dan/atau pengganti sewa kendaraan atau tunjangan transportasi, saat ini masing-masing ditetapkan untuk Direktur Utama Rp. 3 juta dan/atau Rp.5 juta per bulan, dan untuk anggota Direksi paling banyak 80% dari yang diterima oleh Direktur Utama, dalam hal BPR belum dapat menyediakan fasilitas rumah dinas dan/atau kendaraan dinas.
2. Komponen penghasilan tahunan dan insidental terdiri dari
  - a. tunjangan hari raya, sesuai kemampuan BPR dan ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan

- b. tunjangan kesehatan, dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan BPR dan ketentuan yang berlaku bagi pegawai;
  - c. jasa pengabdian pada setiap akhir masa jabatan.
3. Komponen penghasilan dari penggunaan laba tahun 2019 dalam bentuk tantiem atau insentif pekerjaan sebesar 4% dari penggunaan laba tahun 2019, dengan perbandingan penerimaan untuk anggota Direksi paling banyak 80% dari yang diterima oleh Direktur Utama.

#### 3.10.2. Penghasilan anggota Dewan Pengawas

Berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah, dan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka, penghasilan anggota Dewan Pengawas terdiri atas:

- a. honorarium;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kinerja.

Selanjutnya sesuai Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah, dan Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka diatur lebih lanjut bahwa:

- a. Dewan Pengawas diberikan honorarium:
  - 1) Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
  - 2) Anggota Dewan Pengawas paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari yang diterima Ketua Dewan Pengawas;
- b. Dewan Pengawas diberikan tunjangan, terdiri dari
  - 1) tunjangan hari raya, sesuai dengan kemampuan BPR; dan
  - 2) tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan, sesuai dengan kemampuan BPR dan dalam hal telah memperoleh tunjangan atau fasilitas kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari status kepegawaian dan/atau jabatannya, maka Dewan Pengawas tidak mendapatkan tunjangan kesehatan.



- c. Dewan Pengawas dapat diberikan fasilitas sesuai ketentuan fasilitas yang berlaku bagi Direksi dengan perbandingan penerimaan untuk ketua dan anggota Dewan Pengawas sesuai perbandingan honorarium sebagaimana dijelaskan pada huruf a di atas.
- d. Dewan Pengawas dapat diberikan tantiem, dengan perbandingan penerimaan untuk ketua dan anggota Dewan Pengawas sesuai perbandingan honorarium sebagaimana diuraikan pada huruf a di atas.
- e. Dewan Pengawas dapat diberikan jasa pengabdian pada setiap akhir masa jabatan dengan perbandingan penerimaan untuk ketua dan anggota Dewan Pengawas sesuai perbandingan honorarium sebagaimana diuraikan pada huruf a di atas

Dalam pelaksanaannya seperti halnya dengan penghasilan anggota Direksi, kebijakan pemberian honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Dewan Pengawas termasuk pemberian tantiem belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka. Rincian pelaksanaan kebijakan pemberian penghasilan bagi anggota Dewan Pengawas yang terdiri dari ketua dan anggota selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, tampak sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Komponen penghasilan bulanan berupa honorarium, untuk:
  - a. ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% dari penghasilan bulanan yang diterima oleh Direktur Utama; dan
  - b. anggota Dewan Pengawas paling banyak 80% dari honorarium yang diterima oleh ketua Dewan Pengawas.

Komponen penghasilan bulanan bagi Direktur Utama terdiri atas sebagaimana dijelaskan dalam pelaksanaan kebijakan pemberian gaji, tunjangan, fasilitas dan/atau tantiem atau insentif pekerjaan bagi anggota Direksi butir 3.10.1. di atas, termasuk fasilitas pengganti sewa rumah atau tunjangan perumahan dan/atau pengganti sewa kendaraan atau tunjangan transportasi. dalam hal BPR belum dapat menyediakan fasilitas rumah dinas dan/atau kendaraan dinas.

2. Komponen penghasilan tahunan dan insidental terdiri dari

- a. tunjangan hari raya, sesuai kemampuan BPR dan ketentuan yang berlaku bagi Direksi; dan
  - a. tunjangan kesehatan, dalam bentuk asuransi kesehatan.
  - b. jasa pengabdian pada setiap akhir masa jabatan.
3. Komponen penghasilan dari penggunaan laba tahun 2019 dalam bentuk tantiem atau insentif kinerja sebesar 4% dari penggunaan laba tahun 2019, dengan perbandingan penerimaan untuk:
- a. ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% dari yang diterima oleh Direktur Utama; dan
  - b. anggota Dewan Pengawas paling banyak 80% dari yang diterima oleh ketua Dewan Pengawas.

3.11. Perubahan Penting Lain yang terjadi di Perumda BPR Majalengka dan/atau di Kelompok Usaha yang mempengaruhi Operasional

Perubahan penting lain yang terjadi di Perumda BPR Majalengka yang mempengaruhi operasional berupa pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka, sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah.

**BAB IV**  
**POKOK-POKOK LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN**  
**PERUMDA BPR MAJALENGKA**

4.1 Laporan Posisi Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

**PERUMDA BPR MAJALENGKA KABUPATEN MAJALENGKA**  
**NERACA**  
**31 Desember 2019**  
**Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2018**  
**(Dinyatakan dalam rupiah)**

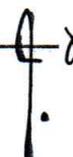
	Catatan	2019	2018
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas	3.	3.548.683.700	4.027.792.500
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	4,2.k.	1.592.699.231	2.003.659.901
Penempatan Pada Bank Lain	5,2.b.	54.189.080.656	57.297.127.601
Penyisihan Kerugian ABA	6,2.d.	(270.945.408)	(214.352.945)
<b>Total</b>		<b>53.918.135.248</b>	<b>57.082.774.656</b>
Kredit Yang Diberikan	7,2.c.	112.959.573.794	118.246.467.128
Penyisihan Kerugian Kredit	8,2.d.	(5.408.527.000)	(3.268.238.000)
<b>Total</b>		<b>107.551.046.794</b>	<b>114.978.229.128</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Aset Tetap	9,2.e.		
Nilai Prolehan		9.332.578.549	9.028.497.949
Akumulasi Penyusutan		(7.716.587.871)	(7.227.926.497)
<b>Nilai Buku</b>		<b>1.615.990.678</b>	<b>1.800.571.452</b>
Aset Tidak Berwujud	10,2.e.		
Nilai Prolehan		865.769.350	832.649.350
Akumulasi Penyusutan		(698.056.546)	(656.232.749)
<b>Nilai Buku</b>		<b>167.712.804</b>	<b>176.416.601</b>
Aset Tidak Lancar Lainnya	11	1.297.853.016	873.044.202
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<b>3.081.556.498</b>	<b>2.850.032.255</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>169.692.121.472</b>	<b>180.942.488.440</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PERUMDA BPR MAJALENGKA KABUPATEN MAJALENGKA**  
**NERACA**  
**31 Desember 2019**  
**Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2018**  
**(Dinyatakan dalam rupiah)**

	Catatan	2019	2018
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>			
<b>KEWAJIBAN LANCAR</b>			
Kewajiban Segera	12, 2.h.	248.733.191	1.003.332.046
Hutang Bunga	13.	786.178.206	723.663.864
Hutang Pajak	14, 2.p.	104.054.000	629.552.355
Simpanan	15.	141.103.358.539	147.716.063.887
Simpanan Dari Bank Lain	16.	537.935.630	177.017.573
Pinjaman Yang Diterima	17, 2.h.	4.558.665.904	6.937.715.884
Kewajiban Lainnya	18, 2.h.	661.911.036	907.048.781
<b>Jumlah Kewajiban Lancar</b>		<b>148.000.836.506</b>	<b>158.094.394.389</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal Dasar	19, 1.c.	10.000.000.000	10.000.000.000
Modal Yang Belum Disetor		(2.938.221.102)	(2.938.221.102)
<b>Modal Yang Sudah Disetor</b>		<b>7.061.778.898</b>	<b>7.061.778.898</b>
Modal Sumbangan		80.989.000	80.989.000
<b>Jumlah modal disetor</b>		<b>7.142.767.898</b>	<b>7.142.767.898</b>
<b>Saldo Laba</b>	20, 2.j.		
Cadangan		10.882.435.851	9.676.713.276
Saldo Laba yang belum ditentukan Tujuannya		3.666.081.215	6.028.612.876
<b>Total</b>		<b>14.548.517.067</b>	<b>15.705.326.152</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>21.691.284.965</b>	<b>22.848.094.051</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>169.692.121.472</b>	<b>180.942.488.440</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari laporan keuangan secara keseluruhan



4.2. Laporan Laba Rugi Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

**PERUMDA BPR MAJALENGKA KABUPATEN MAJALENGKA**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019  
 Dengan Angka Pembandingan Untuk Tahun 2018  
 (Dinyatakan dalam rupiah)

	Catatan	2019	2018
<b>Pendapatan dan Beban Operasional</b>			
<b>Pendapatan Bunga</b>			
Pendapatan Bunga Kontraktual	21.2.k.	30.407.734.453	30.131.849.467
Pendapatan Provisi	22.2.l.	3.540.099.711	3.245.774.028
Biaya Transaksi		(437.180)	(3.028.019)
<b>Total Pendapatan Bunga</b>		<b>33.947.396.984</b>	<b>33.374.595.476</b>
Biaya Bunga	23.2.k.	8.347.722.239	8.362.163.396
<b>Pendapatan Netto</b>		<b>25.599.674.745</b>	<b>25.012.432.080</b>
Pendapatan Operasional Lainnya	24.	3.466.582.683	3.443.922.270
<b>Jumlah Pendapatan Operasional</b>		<b>29.066.257.428</b>	<b>28.456.354.350</b>
<b>Beban penyisihan kerugian/penyusutan</b>			
Beban penyisihan kerugian Aktiva Produktif	26.2.d.	3.438.772.909	1.078.565.383
Beban Pemasaran	27.2.e.	478.660.714	464.285.300
Beban Penelitian dan Pengembangan	28.	-	8.880.000
Beban Umum Dan Administrasi	29.	20.228.355.294	19.528.101.647
<b>Jumlah Beban Operasional</b>		<b>24.145.788.918</b>	<b>21.079.832.330</b>
<b>Laba (Rugi) Operasional</b>		<b>4.920.468.510</b>	<b>7.376.522.020</b>
<b>Pendapatan dan Beban Non Operasional</b>			
Pendapatan Non Operasional	30.	123.823.064	689.007.315
Beban Non Operasional	30.	122.216.207	152.575.581
<b>Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional</b>		<b>1.606.857</b>	<b>536.431.734</b>
<b>Laba (Rugi) Sebelum Pajak</b>		<b>4.922.075.368</b>	<b>7.912.953.754</b>
Taksiran Pajak Penghasilan	31, 2.p.	1.255.994.152	1.884.340.878
<b>Laba (Rugi) Tahun Berjalan</b>		<b>3.666.081.215</b>	<b>6.028.612.876</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

4.3. Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

PERUMDA BPR MAJALENGKA KABUPATEN MAJALENGKA  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019  
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2018  
(Dinyatakan dalam rupiah)

URAIAN	Modal ditempatkan dan disetor	Saldo Laba tidak ditentukan penggunaannya	Saldo laba yang ditentukan penggunaannya	Jumlah
<b>Saldo Awal 2018</b>				
Modal Disetor	7.061.778.898	-	-	7.061.778.898
Modal Sumbangan	80.989.000	-	-	80.989.000
Pembentukan Cadangan	-	9.676.713.276	-	9.676.713.276
Laba tahun berjalan 2018	-	-	6.028.612.876	6.028.612.876
<b>Saldo Per 31 Desember 2018</b>	<b>7.142.767.898</b>	<b>9.676.713.276</b>	<b>6.028.612.876</b>	<b>22.848.094.051</b>
<b>Saldo Akhir</b>				
Tambahan Modal Dasar	-	-	-	-
Modal Sumbangan	-	-	-	-
Pembentukan Cadangan	-	1.205.722.575	-	1.205.722.575
Pengurangan Laba Tahun 2019	-	-	(6.028.612.876)	(6.028.612.876)
Laba tahun berjalan 2019	-	-	3.666.081.215	3.666.081.215
<b>Saldo Per 31 Desember 2019</b>	<b>7.142.767.898</b>	<b>10.882.435.851</b>	<b>3.666.081.215</b>	<b>21.691.284.965</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



4.4. Laporan Arus Kas Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

**PERUMDA BPR MAJALENGKA KABUPATEN MAJALENGKA**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019  
 Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2018  
 (Dinyatakan dalam rupiah)

URAIAN	2019	2018
<b>A. Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
<b>1. Laba Sebelum Pendapatan (Beban) Non Operasional</b>	<b>4.920.468.510</b>	<b>7.376.522.020</b>
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba neto menjadi kas bersih diperoleh dari kegiatan operasi :		
Penyusutan aset tetap	488.661.375	532.076.637
Pendapatan Non Operasional	123.823.064	689.007.315
Beban Non Operasional	(122.216.207)	(152.575.581)
Taksiran Pajak	(1.255.994.152)	(1.884.340.878)
<b>2. Amortisasi :</b>		
Provisi/biaya Transaksi	(148.529.106)	219.022.994
<b>3. Perubahan aset dan kewajiban operasi :</b>		
Pendapatan Ymh Diterima	410.960.670	(340.527.051)
Penempatan Pada Bank Lain	3.108.046.945	(8.183.800.207)
Penyisihan Kerugian ABA	56.592.463	(1.723.613)
Kredit Yang Diberikan	5.435.422.440	(12.578.958.684)
Penyisihan Kerugian Kredit	2.140.289.000	105.202.000
Agunan Yang Diambil alih	-	-
Aset Tetap Tidak Berwujud	8.703.796	47.201.425
Aset lain-lain	(424.808.814)	(351.718.264)
Kewajiban segera	(754.598.855)	778.963.922
Utang Bunga	62.514.342	84.950.972
Utang pajak	(525.498.354)	553.223.801
<b>Simpanan :</b>		
Tabungan	1.366.206.059	7.231.941.402
Deposito berjangka	(7.978.911.407)	13.116.249.190
Simpanan Dari Bank Lain	360.918.057	51.325.927
Pinjaman Yang Diterima	(2.379.049.980)	(2.860.691.980)
Kewajiban lain-lain	(245.137.745)	326.509.285
<b>Arus kas neto dari aktivitas operasi</b>	<b>4.647.862.101</b>	<b>4.757.860.632</b>
<b>B. Arus Kas dari Aktivitas Inventaris</b>		
1. Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris	(304.080.600)	(341.034.610)
<b>Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(304.080.600)</b>	<b>(341.034.610)</b>
<b>C. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
1. Cadangan	1.205.722.575	1.622.611.466
2. Saldo Rugi Tahun Lalu	(6.028.612.876)	(5.408.704.888)
<b>Arus Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(4.822.890.301)</b>	<b>(3.786.093.422)</b>
Kenaikan (Penurunan) Arus Kas	(479.108.800)	630.732.600
Kas dan Setara Kas Awal Periode	4.027.792.500	3.397.059.900
<b>Kas dan Setara Kas Akhir Periode</b>	<b>3.548.683.700</b>	<b>4.027.792.500</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan pokok

#### 4.5. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

##### 4.5.1. Opini dari Akuntan Publik

Menurut opini akuntan publik (Kantor Akuntan Publik Dra. YATI RUHIYATI Nomor Izin : KEP-605/KM.17/1998), laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal material, posisi keuangan Perumda BPR Majalengka tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

##### 4.5.2. Kebijakan Akuntansi

###### a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip berkesinambungan (going concern) serta mengikuti konversi harga historis (historical cost). Kebijakan akuntansi ini diterapkan secara konsisten.

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi dasar akrual (accrual basis), kecuali tagihan bunga atas aktiva produktif yang digolongkan sebagai non-performing dan dicatat secara dasar kas (cash basis).

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) dan Pedoman Akuntansi BPR.

Laporan arus kas menyajikan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

Laporan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung, dimana dalam metode tersebut laba atau rugi neto disesuaikan dengan mengoreksi dampak dari transaksi non kas. Disamping itu dihitung pula penangguhan/akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi masa lalu dan masa depan serta unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.

###### b. Mata Uang Pelaporan, Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Mata uang pelaporan yang digunakan perusahaan adalah mata uang Rupiah, sekaligus sebagai mata uang fungsional. Semua jumlah-jumlah transaksi dan saldo akun disajikan dalam rupiah, kecuali dijelaskan lain.

Pembukuan perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Sedangkan transaksi dalam mata uang asing dijabarkan dalam Rupiah dengan kurs tunai (spot rate) pada saat terjadinya transaksi.

Pada Tanggal pelaporan, saldo aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dibebankan atau dikreditkan pada laporan laba (rugi) tahun berjalan.

c. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai "Aset yang dibatasi penggunaannya" yang kategorikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo yaitu pada saat selesai pembatasan penggunaannya.

d. Penempatan pada Bank Lain

Penempatan pada Bank Lain dinyatakan sebesar nilai nominal penyeteroran atau nilai yang diperjanjikan sesuai jenis penempatan. Saldo Penempatan pada Bank Lain disajikan terpisah dengan Penyisihan Kerugian atas Penempatan pada Bank Lain. Penyisihan tersebut ditetapkan berdasarkan penelaahan terhadap masing-masing saldo penempatan pada akhir periode tertentu.

e. Kredit Yang Diberikan

Kredit yang diberikan dinyatakan berdasarkan jumlah bruto tagihan Bank yang belum dilunasi oleh nasabah setelah dikurangi penyisihan kerugian kredit dan amortisasi provisi kredit serta ditambahi biaya kredit. Kredit yang diberikan dihapusbukukan pada saat piutang tersebut dipastikan tidak akan tertagih dan telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Seluruh penerimaan yang berhubungan dengan kredit diragukan dan macet diakui terlebih dahulu sebagai pengurang pokok kredit. Kelebihan penerimaan dari pokok kredit diakui sebagai pendapatan bunga. Penerimaan dari kredit performing diakui melunasi bunga terlebih dahulu. Akan tetapi, untuk kredit non-performing yang digolongkan diragukan dan macet, penerimaan ini dipergunakan terlebih dahulu untuk mengurangi pokok kredit karena kemungkinan ketertagihannya sangat diragukan.



f. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

Account ini dipergunakan untuk mencatat perhitungan kewajiban penyisihan aktiva produktif yang dibentuk oleh bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, PBI No. 13/26/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011, tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif, dan Peraturan OJK No. 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat, dengan rincian sebagai berikut :

**PPAP Umum**

Aktiva Produktif memiliki Kualitas Lancar 0,5 %

**PPAP Khusus**

Aktiva Produktif memiliki Kualitas Dalam Perhatian Khusus 0,5 %

Aktiva Produktif memiliki Kualitas Kurang Lancar 10 %

Aktiva Produktif memiliki Kualitas Diragukan 50 %

Aktiva Produktif memiliki Kualitas Macet 100 %

untuk ketentuan PPAP Khusus Kualitas Dalam Perhatian Khusus (DPK) sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2020 berlaku sebesar 0,5%, sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2021 berlaku sebesar 1%, dan sejak tanggal 1 Desember 2021 berlaku sebesar 3%.

Penilaian Agunan dalam penilaian Penyisihan Penghapusan aktiva Produktif :

- 100% (seratus persen) dari agunan yang bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang blokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan dan logam mulia yang disertai surat kuasa gadai;
- 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan; 80% (delapan puluh persen) dari nilai hak tanggungan atau fidusia untuk agunan tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia;
- 70% (tujuh puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang;

- 60% (enam puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia;
- 50% (lima puluh persen) dari NJOP berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau surat keterangan NJOP terakhir dari instansi berwenang, atau dari nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen atau instansi berwenang, untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat;
- 50% (lima puluh persen) dari harga pasar, harga sewa, atau harga pengalihan, untuk agunan berupa tempat usaha yang disertai bukti kepemilikan atau surat izin pemakaian atau hak pakai atas tanah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat atau disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lain yang berwenang;
- 50% (lima puluh persen) dari nilai hipotek atau fidusia berupa kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah, yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang;
- 50% (lima puluh persen) untuk bagian dari Kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin Kredit dengan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat; atau
- 30% (tiga puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang

g. Aset Tetap dan Penyusutannya

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan setelah dikurang akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Biaya perolehan meliputi harga beli aset tetap termasuk biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang siap digunakan serta estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi relokasi. Pajak-pajak yang dapat kreditkan dan semua diskon dikurangkan dalam menentukan biaya perolehan. Revaluasi aset tetap tidak diperkenankan, kecuali dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Penyusutan dimulai pada saat aset tetap tersedia untuk digunakan dan berhenti ketika aset tetap dihapuskan. Penyusutan tidak berhenti ketika aset tidak digunakan. Penyusutan diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi, kecuali memenuhi syarat untuk dikapitalisasi sebagai perolehan suatu aset berdasarkan SAK ETAP.

Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	Pengelompokan Aset	Masa Manfaat Ekonomis	Penyusutan Tarif/Tahun
Bangunan dan Gedung		20 Tahun	5 %
Kendaraan Roda 2	Golongan 1	4 Tahun	25 %
Kendaraan Roda 4	Golongan 2	8 Tahun	12,50 %
Peralatan Kantor 1	Golongan 1	4 Tahun	25 %
Peralatan Kantor 2	Golongan 2	8 Tahun	12,50 %

Pengeluaran untuk perbaikan atau perawatan aktiva tetap untuk menjaga manfaat keekonomian masa yang akan datang dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Penyempurnaan yang menambah nilai (kegunaan) dan masa manfaat, dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi. Aktiva tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap berikut akumulasi penyusutan yang bersangkutan dan keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan suatu aktiva tetap diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

Aset Tetap yang terjual dikeluarkan dari kelompok aset yang bersangkutan dan laba atau rugi yang diperoleh dari penjualan tersebut dilaporkan dalam Laporan Aktivitas tahun yang bersangkutan. Aset Tetap yang dibuat

sendiri dan sampai akhir periode akuntansi belum selesai dibukukan ke aset dalam proses.

h. Penurunan Nilai Aset

Perusahaan pada saat tanggal pelaporan menilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset yang bersumber dari informasi internal dan eksternal, yang dilakukan berdasarkan kelompok aset penghasil kas. Jika indikasi tersebut ada, entitas mengestimasi nilai wajar asset dikurangi dengan biaya menjual. Kerugian penurunan nilai aset diakui jika nilai wajar dikurangi biaya menjual lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat. Pemulihan kerugian penurunan nilai asset diakui dalam laporan laba rugi tidak boleh melebihi jumlah tercatat tanpa kerugian penurunan nilai.

i. Agunan yang Diambil Alih

Agunan yang diambil alih merupakan aset Bank yang diperoleh sehubungan dengan penyelesaian kredit bermasalah (disajikan dalam akun "Agunan Yang Diambil Alih" - AYDA).

Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian kredit diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi yaitu nilai wajar agunan setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan.

Selisih antara nilai agunan yang telah diambil alih dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan. Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

j. Biaya Dibayar di Muka

Biaya Dibayar di Muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

k. Kewajiban

Kewajiban merupakan saldo kewajiban/utang masa kini Bank yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya milik Bank yang mengandung manfaat ekonomi.

l. Simpanan

Tabungan dan Deposito dinyatakan sebesar nilai kewajiban bank kepada nasabah. Sertifikat deposito dinyatakan sebesar nilai nominal dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi.

m. Cadangan

Account ini dipergunakan untuk mencatat perkiraan cadangan umum dan tujuan yang berkaitan dengan penyisihan dari laba yang diperoleh pada akhir tahun sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka yang mengatur:

- Bagian laba untuk Daerah	55 %
- Cadangan	20 %
- Tanggungjawab sosial dan lingkungan	3 %
- Tantiem	4 %
- Jasa Produksi	8 %
- Dana kesejahteraan	10 %

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban Bunga

Pendapatan dan beban bunga diakui dengan menggunakan metode akrual. Pendapatan bunga atas aktiva produktif yang digolongkan sebagai nonperforming (kurang lancar, diragukan, dan macet) dicatat sebagai tagihan kontinjensi dan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima secara tunai (cash basis).

Pendapatan bunga yang akan diterima dari kredit dengan kualitas lancar (performing) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Termasuk pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain.

Pendapatan bunga yang ditangguhkan dari kredit yang direstrukturisasi diakui sebagai pendapatan secara proporsional pada saat diterima pembayaran angsuran pokok.

o. Pendapatan Provisi dan Komisi

Pendapatan Provisi dan Komisi yang jumlahnya signifikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan dan/atau mempunyai jangka waktu tertentu ditangguhkan dan diamortisasi berdasarkan metode garis lurus sesuai dengan jangka waktunya. Untuk kredit yang dilunasi sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan provisi dan/atau komisi ditangguhkan, diakui pada saat kredit dilunasi. Pendapatan provisi dan komisi lainnya tidak berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan atau jangka waktu tertentu diakui pada saat terjadinya transaksi.

p. Kewajiban Imbalan Kerja

Perusahaan mengakui kewajiban imbalan pascakerja sebagaimana diatur dalam SAK ETAP Bab 23 "imbalan Kerja". Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut Perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan pascakerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

Kewajiban Imbalan Kerja adalah saldo kewajiban yang timbul dari imbalan kerja. Kewajiban imbalan kerja jangka pendek disajikan dalam pos Kewajiban Segera sebesar jumlah yang terutang dan tidak didiskontokan. Kewajiban imbalan kerja jangka panjang disajikan dalam pos yang didiskontokan.

Kewajiban imbalan kerja diakui pada saat pegawai telah memberikan jasanya kepada BPR dalam suatu periode tertentu.

Kewajiban Imbalan Kerja berkurang pada saat dibayarkan. Kewajiban imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah yang tidak didiskonto (undiscounted amount). Kewajiban imbalan kerja jangka panjang diakui sebesar jumlah yang telah didiskonto (discounted amount).

q. Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Dalam kegiatan usahanya, bank melakukan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang dimaksud dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sesuai dengan SK Direksi BI No.31/61/KEP/DIR adalah sebagai berikut:

- Pemegang saham 10% atau lebih dari modal disetor bank
- Anggota Dewan Komisaris
- Anggota Dewan Direksi
- Keluarga dari pihak-pihak pada huruf (a) s.d. (c)
- Pejabat bank lainnya yang mempunyai fungsi eksekutif.
- Kepemilikannya baik individual maupun keseluruhan 25% (lebih) dari modal disetor perusahaan.

r. Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang belum pasti, perusahaan tidak mengakui kewajiban kontinjensi sebagai kewajiban. Kewajiban kontinjensi diungkapkan pada tanggal pelaporan, uraian dan sifat kewajiban kontinjensi jika praktis dilakukan.

s. Pajak Penghasilan

Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, perusahaan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Perseroan tidak mengakui adanya pajak tangguhan.

Beban pajak kini merupakan pajak penghasilan yang pada laporan laba rugi ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan setelah diadakan penyesuaian antara prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dengan peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku.

4.5.3. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Keuangan

**KAS**

Jumlah saldo kas dengan rincian sebagai berikut:

	31-Des-19	31-Des-18
- Kas	3.548.683.700	4.027.792.500
<b>Jumlah</b>	<b>3.548.683.700</b>	<b>4.027.792.500</b>

**Kas menurut kantor cabang terdiri dari :**

- Kantor Operasional Pusat	624.921.300	761.735.200
- Cabang Rajagaluh	528.377.000	662.689.200
- Cabang Jatitujuh	361.905.300	453.022.300
- Cabang Ligung	382.852.100	463.041.800
- Cabang Kertajati	389.450.100	286.047.800
- Cabang Kadipaten	420.439.100	318.192.400
- Cabang Cikijing	212.985.000	307.482.100
- Cabang Bantarujeg	372.797.500	380.852.600
- Cabang Sukahaji	254.956.300	394.729.100
<b>Jumlah</b>	<b>3.548.683.700</b>	<b>4.027.792.500</b>

**PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA**

Jumlah tersebut merupakan saldo pendapatan yang masih harus diterima, dengan rincian sebagai berikut:

	31-Des-19	31-Des-18
- Bunga Kredit Umum	948.724.490	1.243.922.360
- Bunga Kredit Perak	5.451.335	6.699.298
- Bunga Kredit Karyawan	62.477.201	55.348.084
- Bunga Kredit Pegawai	572.885.147	692.624.219
- Bunga Kredit LPDB	3.161.058	5.065.940
<b>Jumlah</b>	<b>1.592.699.231</b>	<b>2.003.659.901</b>

**PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA (Lanjutan)**

Terdiri dari :

- Kantor Operasional Pusat	260.629.861	339.050.278
- Cabang Rajagaluh	139.839.425	144.147.829
- Cabang Jatitujuh	215.750.560	315.509.644
- Cabang Ligung	230.613.208	227.135.179
- Cabang Kertajati	192.896.882	200.641.863
- Cabang Kadipaten	116.625.841	146.528.604
- Cabang Cikijing	132.069.273	150.051.811
- Cabang Bantarujeg	158.862.115	189.844.627
- Cabang Sukahaji	145.412.066	290.750.066
<b>Jumlah</b>	<b>1.592.699.231</b>	<b>2.003.659.901</b>

Pendapatan yang masih harus diterima diakui berdasarkan dari perhitungan bunga kredit lancar.

**PENEMPATAN PADA BANK LAIN**

Jumlah saldo penempatan pada bank lain, dengan rincian :

**a. Berdasarkan jenis simpanan**

	31-Des-19	31-Des-18
- Grio pada bank lain	7.553.866.233	14.121.449.019
- Tabungan pada bank lain	42.488.214.424	32.278.678.582
- Deposito pada bank lain	4.147.000.000	10.897.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>54.189.080.656</b>	<b>57.297.127.601</b>

**b. Giro berdasarkan jenis bank di Kantor Pusat Operasional :**

- Giro BNI - 304360662 (Kantor Pusat Operasional)	289.181	200.564.181
- Giro BNI - 304357300 (Kantor Pusat Operasional)	-	1.030.104.059
- Giro Bank Danamon (Kantor Pusat Operasional)	-	2.257.736.317
- Giro Bank Jabar Banten (Kantor Pusat Operasional)	5.021.088.067	7.511.196.470
- Giro Bank BRI (Kantor Pusat Operasional)	3.141.333	3.393.333
- Giro Bank Permata (Kantor Pusat Operasional)	299.774.536	2.705.678.125
- Giro Bank Woori Saudara Indonesia 1906 (Kantor Pusat Operasional)	2.173.934.486	-
- Giro Bank Bukopin (Kantor Pusat Operasional)	52.042.299	-
- Giro OK Bank Indonesia (Kantor Pusat Operasional)	3.596.331	412.776.534
<b>Jumlah</b>	<b>7.553.866.233</b>	<b>14.121.449.019</b>

**c. Tabungan berdasarkan jenis bank dan Kantor**

- Bank BRI Cabang Sukahaji	441.429.091	589.797.319
- Bank BNI	9.160.565.029	4.225.270.763
- Bank Mandiri	3.179.849.252	3.262.733.967
- Bank Danamon	-	928.042.298
- Bank Muamalat	6.616.727.589	6.251.186.673
- Bank Jabar Banten KCP Rajagaluh	4.497.152.298	819.826.052
- Bank Jabar Banten KCP Kadipaten	14.336.972	14.265.984
- Bank Saudara	-	83.698.677
- Bank Jabar Banten KC Majalengka	16.202.836.762	10.889.069.833
- Bank BJB SYARIAH	111.932.642	1.040.815.685
- Bank BPR Sri Artha Lestari	372.885	432.885
- BATARA PRIMA / BTN	2.263.011.903	4.173.538.446
<b>Jumlah</b>	<b>42.488.214.424</b>	<b>32.278.678.582</b>

**PENEMPATAN PADA BANK LAIN (Lanjutan)**

<b>Bank BRI</b>		
- Cabang Sukahaji	441.429.091	589.797.319
	<b>441.429.091</b>	<b>589.797.319</b>
<b>Kantor Operasional Pusat</b>		
Bank BJB KCP Rajagaluh	4.497.152.298	819.826.052
Bank BJB SYARIAH	111.932.642	1.040.815.685
Bank Muamalat Indonesia (1360006249)	6.616.727.589	6.005.638.485
Bank Muamalat Indonesia (1360002892)	-	245.548.188
Bank BPR Sri Artha Lestari	372.885	432.885
BATARA PRIMA/ BTN	2.263.011.903	4.173.538.446
	<b>13.489.197.318</b>	<b>12.285.799.741</b>
Bank BJB, Kadipaten		
- Cabang Jatitujuh	14.336.972	14.265.984
	<b>14.336.972</b>	<b>14.265.984</b>
<b>Jumlah penempatan bank dalam tabungan</b>	<b>42.488.214.424</b>	<b>32.278.678.582</b>
<b>d. Deposito berdasarkan jenis bank di Pusat dan Cabang :</b>		
<b><u>Penempatan Dalam Deposito</u></b>		
Bank Danamon Syariah	-	1.000.000.000
Bank Danamon Syariah	-	1.000.000.000
Bank Danamon Syariah	-	1.000.000.000
Bank Danamon Syariah	-	1.000.000.000
PT Bank JTrust Indonesia	-	1.000.000.000
Bank BJB	174.000.000	174.000.000
Bank BJB Cab. Majalengka	123.000.000	123.000.000
Bank BJB Syari'ah	-	1.000.000.000
Bank BJB Syari'ah	-	1.000.000.000
Bank BJB Syari'ah	-	1.000.000.000
Bank BTN	1.000.000.000	-
Bank Bukopin	1.000.000.000	-
PT BPR Wibawa Mukti Jabar	350.000.000	-
PT BPR Intan Jabar	1.000.000.000	1.000.000.000
PT OK Bank Indonesia (Jakarta)	-	1.600.000.000
PT BPR Danatama Artha Mandiri	500.000.000	-
	<b>4.147.000.000</b>	<b>10.897.000.000</b>
<b>e. Deposito berdasarkan jangka waktu :</b>		
- Deposito 1 Bulan	2.297.000.000	8.297.000.000
- Deposito 3 Bulan	1.350.000.000	2.600.000.000
- Deposito 6 Bulan	500.000.000	2.600.000.000
	<b>4.147.000.000</b>	<b>13.497.000.000</b>
<b>f. Tabungan berdasarkan hubungan</b>		
- Pihak ke tiga	42.488.214.424	32.278.678.582
	<b>42.488.214.424</b>	<b>32.278.678.582</b>
<b>g. Simpanan di Bank berdasarkan rata-rata suku bunga per tahun</b>		
- Simpanan tabungan	1 %	2 %
- Simpanan Deposito	5,75 %	6,00 %
<b>h. Simpanan berdasarkan kolektibilitas</b>		
- Lancar	54.189.080.656	57.297.127.601
	<b>54.189.080.656</b>	<b>57.297.127.601</b>

**PENYISIHAN KERUGIAN ANTAR BANK AKTIVA**

	<u>31-Des-19</u>	<u>31-Des-18</u>
Jumlah saldo Penyisihan Kerugian ABA, dengan rincian sebagai berikut:		
Penyisihan Kerugian ABA yang telah dibentuk	<u>(270.945.408)</u>	<u>(214.352.945)</u>
Untuk penyisihan Kerugian ABA yang wajib dibentuk telah dihitung sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).		

**KREDIT YANG DIBERIKAN**

	<u>31-Des-19</u>	<u>31-Des-18</u>
Jumlah saldo kredit yang diberikan sebesar tersebut terdiri dari:		
<b>a. Jenis kredit berdasarkan transaksi :</b>		
<b>Pokok Kredit yang Diberikan</b>		
- Kredit Umum	52.650.927.530	60.330.617.800
- Kredit Perak	237.647.500	331.695.500
- Kredit Karyawan	12.519.573.000	11.071.284.400
- Kredit Pegawai	50.118.447.300	49.155.817.770
- Kredit LPDB	69.618.600	142.220.900
<b>Jumlah Pokok Kredit</b>	<u>115.596.213.930</u>	<u>121.031.636.370</u>
<b>b. Jenis kredit berdasarkan transaksi :</b>		
<b>Provisi Kredit yang Diberikan</b>		
- Kredit Umum	(1.132.391.446)	(1.333.076.744)
- Kredit Karyawan	(119.838.960)	(106.380.227)
- Kredit Pegawai	(1.384.601.646)	(1.345.540.778)
- Kredit LPDB	-	(800.589)
<b>Jumlah Provisi Kredit</b>	<u>(2.636.832.052)</u>	<u>(2.785.798.338)</u>
<b>Biaya Transaksi Kredit yang Diberikan</b>		
- Kredit Umum	-	-
- Kredit Pegawai	191.916	629.096
<b>Jumlah Administrasi Kredit</b>	<u>191.916</u>	<u>629.096</u>
<b>Total Kredit yang Diberikan</b>	<u>112.959.573.794</u>	<u>118.246.467.128</u>

**c. Jenis kredit berdasarkan kolektibilitas :**

Jenis Kredit	31 Desember 2019						Jumlah
	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		
- Kredit Umum	37.353.073.450	4.595.785.000	2.220.690.380	3.897.196.500	4.905.223.200	52.971.968.530	
- Kredit Perak	184.508.000	18.156.000	8.797.000	2.299.000	18.262.500	232.022.500	
- Kredit Karyawan	12.489.165.800	33.600.000	-	-	90.703.700	12.613.469.500	
- Kredit Pegawai	47.857.741.000	853.850.000	192.861.500	65.293.500	768.909.800	49.738.655.800	
- Kredit LPDB	3.666.100	-	-	5.074.000	31.357.500	40.097.600	
<b>Jumlah Pokok Kredit</b>	<u>97.888.154.350</u>	<u>5.501.391.000</u>	<u>2.422.348.880</u>	<u>3.969.863.000</u>	<u>5.814.456.700</u>	<u>115.596.213.930</u>	
Provisi Kredit						(2.636.832.052)	
Biaya Transaksi						191.916	
<b>Total Kredit</b>						<u>112.959.573.794</u>	

**KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)**

**d. Kolektibilitas kredit menurut Kantor Cabang :**

Jenis Kredit	31 Desember 2019					Jumlah
	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
- Kantor Pusat	26.850.053.900	548.265.300	7.959.000	104.913.000	2.277.686.600	29.788.877.800
- Cabang Rajagaluh	9.190.472.000	247.439.500	640.365.680	56.748.000	289.534.000	10.424.559.180
- Cabang Jatitujuh	10.231.544.900	649.087.500	293.263.500	45.107.000	858.916.350	12.077.919.250
- Cabang Ligung	10.799.411.750	1.254.859.600	21.326.500	89.291.500	619.831.900	12.784.721.250
- Cabang Kertajati	10.273.342.200	996.226.100	170.006.400	118.156.100	322.566.150	11.880.296.950
- Cabang Kadipaten	8.654.884.700	312.006.600	241.037.500	56.617.000	267.955.500	9.532.501.300
- Cabang Cikijing	8.743.886.500	394.237.100	43.894.300	-	49.696.500	9.231.714.400
- Cabang Bantarujeg	8.199.829.000	270.791.400	37.863.500	63.487.500	425.355.200	8.997.326.600
- Cabang Sukahaji	4.944.729.400	828.477.900	966.632.500	3.435.542.900	702.914.500	10.878.297.200
<b>Jumlah Pokok Kredit</b>	<b>97.888.154.350</b>	<b>6.501.391.000</b>	<b>2.422.348.880</b>	<b>3.969.863.000</b>	<b>5.814.456.700</b>	<b>115.596.213.930</b>
Provisi Kredit						(2.636.832.052)
Biaya Transaksi						191.916
<b>Total Kredit</b>						<b>112.959.573.794</b>

**Jenis kredit berdasarkan kolektibilitas :**

Jenis Kredit	31 Desember 2018					Jumlah
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		
- Kredit Umum	56.878.705.200	368.151.200	512.938.000	3.123.749.400	60.883.543.800	
- Kredit Perak	307.725.000	4.500.000	9.416.000	4.842.500	326.483.500	
- Kredit Karyawan	10.909.477.200	61.182.700	-	-	10.970.659.900	
- Kredit Pegawai	47.903.994.250	89.924.820	52.676.500	662.132.700	48.708.728.270	
- Kredit LPDB	56.507.400	-	-	85.713.500	142.220.900	
<b>Jumlah Pokok Kredit</b>	<b>116.056.409.050</b>	<b>523.758.720</b>	<b>575.030.500</b>	<b>3.876.438.100</b>	<b>121.031.636.370</b>	
Provisi Kredit					(2.785.798.338)	
Biaya Transaksi					629.096	
<b>Total Kredit</b>					<b>118.246.467.128</b>	

**Kolektibilitas kredit menurut Kantor Cabang :**

Jenis Kredit	31 Desember 2018					Jumlah
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		
- Kantor Pusat	28.102.316.400	229.679.020	175.913.000	1.544.875.100	30.052.783.520	
- Cabang Rajagaluh	9.220.021.500	1.427.500	20.455.500	321.525.500	9.563.430.000	
- Cabang Jatitujuh	11.935.467.150	50.384.000	85.381.000	598.021.100	12.669.253.250	
- Cabang Kertajati	11.853.391.600	53.310.200	41.691.500	265.269.300	12.213.662.600	
- Cabang Ligung	11.949.787.500	76.818.500	149.903.500	374.856.700	12.551.366.200	
- Cabang Kadipaten	9.437.042.000	34.689.000	23.003.000	230.828.900	9.725.562.900	
- Cabang Bantarujeg	8.987.564.900	9.536.000	78.683.000	414.021.500	9.489.805.400	
- Cabang Cikijing	8.370.726.700	-	-	127.040.000	8.497.766.700	
- Cabang Sukahaji	16.200.091.300	67.914.500	-	-	16.268.005.800	
<b>Jumlah Pokok Kredit</b>	<b>116.056.409.050</b>	<b>523.758.720</b>	<b>575.030.500</b>	<b>3.876.438.100</b>	<b>121.031.636.370</b>	
Provisi Kredit					(2.785.798.338)	
Biaya Transaksi					629.096	
<b>Total Kredit</b>					<b>118.246.467.128</b>	

**KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)****e. Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi**

	<b>31-Des-19</b>	<b>31-Des-18</b>
- Perdagangan	34.390.179.030	37.644.737.400
- Jasa-jasa dunia usaha	3.014.866.200	3.180.499.400
- Konstruksi	4.278.522.500	7.372.067.500
- Industri	579.572.500	618.051.400
- Listrik, Gas dan Air	-	127.000.000
- Pertanian	6.630.199.900	6.979.510.400
- Perikanan	62.480.500	46.407.500
- Pengangkutan dan pergudangan	375.405.700	322.467.000
- Jasa Pendidikan	-	36.324.000
- Jasa-jasa sosial	682.229.600	1.133.224.600
- Pertambangan	137.134.500	131.466.000
- Lain-lain	65.445.623.500	63.439.881.170
	<b>116.696.213.930</b>	<b>121.031.636.370</b>

**f. Kredit berdasarkan hubungan**

- Pihak ke tiga	114.122.669.030	119.769.840.070
- Pihak terkait	1.473.544.900	1.261.796.300
	<b>116.696.213.930</b>	<b>121.031.636.370</b>

**g. Kredit berdasarkan rata-rata suku bunga per tahun**

- Kurang dari atau sama dengan 1 tahun	36%	36%
- Lebih dari 1 - 5 tahun	0% - 36%	10% - 48%

**h. Berdasarkan jangka waktu perjanjian kredit**

- Kurang dari atau sama dengan 1 tahun	16.485.370.000	22.384.399.320
- Lebih dari 1 - 5 tahun	77.522.746.930	86.601.477.250
- Lebih dari 5 - 10 tahun	21.588.097.000	12.045.759.800
- Lebih dari 10 tahun	-	-
	<b>116.696.213.930</b>	<b>121.031.636.370</b>

**i. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan :**

- 1) Kredit yang diberikan dijamin dengan deposito, agunan berupa Sertifikat (SHM), AJB, Leter C dan BPKB yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual dan jaminan lain yang umumnya diterima oleh BPR.
- 2) Kredit modal kerja dan konsumsi terdiri dari kredit modal pengembangan usaha, kredit kendaraan bermotor, dan kredit perorangan lainnya.
- 3) Kredit karyawan adalah kredit yang diberikan kepada karyawan untuk membeli kendaraan, rumah, atau keperluan lainnya dengan tingkat bunga sebesar 9% dan jangka waktu dari 1 sampai 8 tahun. Pinjaman dan bunganya dilunasi melalui pemotongan gaji setiap bulan.
- 4) Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Bank memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- 5) Rasio kredit UMKM terhadap kredit yang diberikan adalah 43,49% dan 46,21% masing-masing untuk tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.
- 6) Kredit hapus buku pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing berjumlah Rp.5.124.443.374,00 dengan saldo akhir sebesar Rp.4.881.712.523,00 dan Rp.4.677.413.024,00 dengan saldo akhir sebesar Rp.4.461.242.672,75

**PENYISIHAN KERUGIAN KREDIT**

Jumlah saldo penyisihan kerugian kredit yang diberikan dengan rincian sebagai berikut:

- Penyisihan Kerugian Kredit

**Jumlah****Pembentukan Penyisihan Kerugian Kredit Per Kantor :**

- Kantor Operasional Pusat
- Cabang Rajagaluh
- Cabang Jatitujuh
- Cabang Kertajati
- Cabang Ligung
- Cabang Kadipaten
- Cabang Bantarujeg
- Cabang Cikijing
- Cabang Sukahaji

Penyisihan Kerugian kredit yang telah dibentuk

**Prosentase penyisihan kredit yang telah dan wajib dibentuk**

100%

100%

Untuk penyisihan kerugian kredit yang wajib dibentuk telah dihitung sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian kredit tersebut cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan.

	<u>31-Des-19</u>	<u>31-Des-18</u>
	(5.408.527.000)	(3.268.238.000)
<b>Jumlah</b>	<b>(5.408.527.000)</b>	<b>(3.268.238.000)</b>
<b>Pembentukan Penyisihan Kerugian Kredit Per Kantor :</b>		
- Kantor Operasional Pusat	(1.805.849.000)	(1.187.737.000)
- Cabang Rajagaluh	(254.860.000)	(211.128.000)
- Cabang Jatitujuh	(778.951.000)	(566.432.000)
- Cabang Kertajati	(289.017.000)	(269.268.000)
- Cabang Ligung	(372.289.000)	(308.438.000)
- Cabang Kadipaten	(274.100.000)	(216.587.000)
- Cabang Bantarujeg	(290.563.000)	(276.527.000)
- Cabang Cikijing	(83.711.000)	(146.908.000)
- Cabang Sukahaji	(1.259.187.000)	(85.213.000)
<b>Penyisihan Kerugian kredit yang telah dibentuk</b>	<b>(5.408.527.000)</b>	<b>(3.268.238.000)</b>

**ASET TETAP**

Jumlah saldo aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

**Selasa, 31 Desember 2019**

	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
<b>Nilai Perolehan :</b>				
Tanah	179.951.000	-	-	179.951.000
Bagunan	1.861.378.582	-	-	1.861.378.582
Kendaraan	2.349.795.000	75.925.000	-	2.425.720.000
Inventaris Kantor	4.637.373.367	228.155.600	-	4.865.528.967
<b>Jumlah</b>	<b>9.028.497.949</b>	<b>304.080.600</b>	<b>-</b>	<b>9.332.578.549</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				
Bangunan	(1.462.647.800)	33.275.895	-	(1.495.923.695)
Kendaraan	(1.906.502.125)	165.321.699	-	(2.071.823.824)
Inventaris Kantor	(3.858.776.571)	290.063.781	-	(4.148.840.352)
<b>Jumlah</b>	<b>(7.227.926.497)</b>	<b>488.661.375</b>	<b>-</b>	<b>(7.716.587.871)</b>
<b>Nilai buku</b>	<b>1.800.571.453</b>			<b>1.615.990.678</b>

**Senin, 31 Desember 2018**

	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
<b>Nilai Perolehan :</b>				
Tanah	179.951.000	-	-	179.951.000
Bagunan	1.797.211.582	64.167.000	-	1.861.378.582
Kendaraan	2.349.795.000	-	-	2.349.795.000
Inventaris Kantor	4.360.505.757	276.867.610	-	4.637.373.367
<b>Jumlah</b>	<b>8.687.463.339</b>	<b>341.034.610</b>	<b>-</b>	<b>9.028.497.949</b>

**ASET TETAP (Lanjutan)****Akumulasi Penyusutan**

Bangunan	(1.420.145.576)	42.502.224	-	(1.462.647.800)
Kendaraan	(1.711.246.547)	195.255.578	-	(1.906.502.125)
Inventaris Kantor	(3.564.457.737)	294.318.835	-	(3.858.776.571)
<b>Jumlah</b>	<b>(6.695.849.860)</b>	<b>532.076.637</b>	<b>-</b>	<b>(7.227.926.497)</b>
<b>Nilai buku</b>	<b>2.306.698.376</b>			<b>1.991.613.479</b>

**ASET TETAP TIDAK BERWUJUD**

Jumlah saldo aktiva tetap tidak berwujud dengan rincian sebagai berikut:

	<b>Selasa, 31 Desember 2019</b>			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
<b>Biaya Perolehan :</b>				
Program Software IT	832.649.350	33.120.000	-	865.769.350
<b>Jumlah biaya perolehan</b>	<b>832.649.350</b>	<b>33.120.000</b>	<b>-</b>	<b>865.769.350</b>
<b>Akumulasi Amortisasi</b>				
Program Software IT	(656.232.749)	41.823.796	-	(698.056.546)
<b>Jumlah</b>	<b>(656.232.749)</b>	<b>41.823.796</b>	<b>-</b>	<b>(698.056.546)</b>
<b>Nilai buku</b>	<b>176.416.601</b>			<b>167.712.804</b>

	<b>Senin, 31 Desember 2018</b>			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
<b>Biaya Perolehan :</b>				
Program Software IT	829.680.000	2.969.350	-	832.649.350
<b>Jumlah biaya perolehan</b>	<b>829.680.000</b>	<b>2.969.350</b>	<b>-</b>	<b>832.649.350</b>
<b>Akumulasi Amortisasi</b>				
Program Software IT	(606.061.974)	50.170.775	-	(656.232.749)
<b>Jumlah</b>	<b>(606.061.974)</b>	<b>50.170.775</b>	<b>-</b>	<b>(656.232.749)</b>
<b>Nilai buku</b>	<b>223.618.026</b>			<b>176.416.601</b>

**ASET LAIN-LAIN**

Jumlah saldo aset lain-lain dengan rincian sbb. :

	<b>31-Des-19</b>	<b>31-Des-18</b>
- Uang Muka Pajak PPh Pasal 25	-	-
- Uang Muka Pajak Lainnya	-	-
- Biaya Dibayar Dimuka	289.780.205	312.861.661
- Persediaan Materai	2.329.000	1.783.000
- Persediaan ATK	55.988.350	56.338.750
- Persediaan Promosi	92.446.400	92.922.500
- Payment Point	15.300.668	19.935.265
- Rekening VSI	30.500.000	5.500.000
- Agen BJB Bisa	3.000.000	5.985.300
- Uang Muka	474.185.900	51.600.000
- Premi LPS	3.222.367	-
- Lainnya	331.100.126	326.117.726
<b>Jumlah Aset Lain-Lain</b>	<b>1.297.853.016</b>	<b>873.044.202</b>

- Biaya dibayar dimuka sebesar Rp.289.780.205,00 dan Rp.312.861.661,00 yang merupakan biaya sewa, uang muka pengadaan inventaris, asuransi dan biaya administrasi transaksi pinjaman.

**ASET LAIN-LAIN (Lanjutan)**

- (Lainnya) sebesar Rp. 331.100.126,00 Merupakan penyalahgunaan keuangan yang belum dilakukan penggantian.

**KEWAJIBAN SEGERA**

Jumlah saldo kewajiban segera dengan rincian sbb. :

	<u>31-Des-19</u>	<u>31-Des-18</u>
- Tabungan	194.000	-
- Kiriman Uang	59.316.504	616.335.000
- Pajak Bunga Deposito	63.849.631	69.674.332
- Pajak Bunga Tabungan	35.932.221	39.344.836
- Pajak Lainnya	-	9.325.432
- Titipan Premi Asuransi	48.393	17.537.678
- Titipan Biaya Notaris	33.495.000	475.000
- Titipan Angsuran	16.245.733	27.968.052
- Titipan Gaji	19.500	-
- Titipan Lainnya	39.632.209	222.671.716
	<u>248.733.191</u>	<u>1.003.332.046</u>

**HUTANG BUNGA**

Jumlah saldo Hutang Bunga, dengan rincian sbb :

Hutang Bunga Tabungan :

	<u>31-Des-19</u>	<u>31-Des-18</u>
- Tabungan SIDASI	514.281.531	462.268.740
- Tabungan TAHARA	118.633.029	79.635.713
- Tadabur	7.385.200	4.737.450
- Tapaqur	965.925	934.125
<b>Jumlah Hutang Bunga Tabungan</b>	<u>641.265.685</u>	<u>547.576.028</u>

Hutang Bunga Deposito :

- Deposito 1 Bulan	10.831.010	18.581.791
- Deposito 3 Bulan	32.355.219	34.783.191
- Deposito 6 Bulan	30.687.247	39.107.924
- Deposito 9 Bulan	4.473.948	5.171.638
- Deposito 12 Bulan	52.943.239	63.780.952
- Deposito 24 Bulan	12.975.330	14.662.340
- Deposito ABP	646.528	-
<b>Hutang Bunga Deposito :</b>	<u>144.912.521</u>	<u>176.087.836</u>
<b>Jumlah Hutang Bunga</b>	<u>786.178.206</u>	<u>723.663.864</u>

**HUTANG PAJAK**

Jumlah saldo hutang pajak, dengan rincian sbb :

	<u>31-Des-19</u>	<u>31-Des-18</u>
- Hutang Pajak Pasal 25	103.855.302	629.552.355
<b>Jumlah Hutang Pajak</b>	<u>103.855.302</u>	<u>629.552.355</u>

**SIMPANAN**

Jumlah tersebut merupakan saldo Simpanan, dengan rincian sbb :

	<u>31-Des-19</u>	<u>31-Des-18</u>
- Tabungan	81.681.668.328	80.315.462.269
- Deposito	59.421.690.211	67.400.601.618
<b>Jumlah</b>	<u>141.103.358.539</u>	<u>147.716.063.887</u>

**SIMPANAN (Lanjutan)****a. Rincian Tabungan Menurut Jenis Tabungan :**

- Tabungan Tiara	44.188.665.952	45.668.807.036
- Tabungan Kotak Mas	11.628.632.857	10.572.068.363
- Tabungan Sidas	4.438.384.900	4.483.975.400
- Tabungan Tahara	4.490.611.134	3.507.349.800
- Tabungan Ku	16.874.013.485	16.037.861.669
- Tadabur	49.700.000	37.450.000
- Tapaqur	11.660.000	7.950.000
<b>Jumlah Tabungan</b>	<b>81.681.668.328</b>	<b>80.315.462.269</b>

**b. Rincian Jenis Tabungan Menurut Cabang :**

- Kantor Operasional Pusat	13.337.201.586	14.991.726.972
- Cabang Rajagaluh	13.069.779.722	12.990.999.341
- Cabang Jatitujuh	9.275.074.784	8.248.695.921
- Cabang Kertajati	6.419.396.789	7.060.813.252
- Cabang Ligung	9.707.718.803	9.218.295.002
- Cabang Kadipaten	10.195.809.787	9.172.760.921
- Cabang Cikijing	6.487.131.253	4.993.434.568
- Cabang Bantarujeg	6.169.705.799	6.560.083.845
- Cabang Sukahaji	7.019.849.805	7.078.652.446
<b>Jumlah</b>	<b>81.681.668.328</b>	<b>80.315.462.269</b>

**c. Rincian Tabungan Menurut Jenis Tabungan Percabang**

<b>Tabungan Tiara</b>		-
- Kantor Operasional Pusat	6.869.510.631	9.277.717.292
- Cabang Rajagaluh	6.184.535.343	6.682.721.477
- Cabang Jatitujuh	6.510.997.015	5.701.378.197
- Cabang Kertajati	2.957.604.576	3.561.786.603
- Cabang Ligung	6.413.176.724	5.878.911.525
- Cabang Kadipaten	4.867.958.128	4.581.963.668
- Cabang Cikijing	3.115.052.295	1.999.098.787
- Cabang Bantarujeg	3.563.492.835	3.930.002.808
- Cabang Sukahaji	3.706.338.405	4.055.226.680
<b>Jumlah</b>	<b>44.188.665.952</b>	<b>45.668.807.036</b>

**Tabungan Kotak Mas**

- Kantor Operasional Pusat	2.557.978.713	1.898.320.319
- Cabang Rajagaluh	3.566.694.403	2.985.355.460
- Cabang Jatitujuh	261.395.453	344.174.678
- Cabang Kertajati	823.334.349	852.787.037
- Cabang Ligung	759.808.635	1.167.895.046
- Cabang Kadipaten	829.457.181	670.652.070
- Cabang Cikijing	1.371.096.524	1.178.713.112
- Cabang Bantarujeg	393.094.243	556.249.470
- Cabang Sukahaji	1.065.773.357	917.921.172
<b>Jumlah</b>	<b>11.628.632.857</b>	<b>10.572.068.363</b>

**Tabungan Sidas**

- Kantor Operasional Pusat	814.237.800	621.885.200
- Cabang Rajagaluh	536.899.500	531.085.000
- Cabang Jatitujuh	1.223.735.000	1.418.849.000
- Cabang Kertajati	430.047.300	443.207.700
- Cabang Ligung	116.620.000	111.923.000

**SIMPANAN (Lanjutan)**

- Cabang Kadipaten	321.042.300	346.177.500
- Cabang Cikijing	114.003.000	98.274.000
- Cabang Bantarujeg	203.307.000	213.901.500
- Cabang Sukahaji	678.493.000	698.672.500
<b>Jumlah</b>	<b>4.438.384.900</b>	<b>4.483.975.400</b>

**Tabungan Tahara**

- Kantor Operasional Pusat	948.756.100	740.273.300
- Cabang Rajagaluh	301.718.500	346.435.500
- Cabang Jatitujuh	284.554.400	288.195.500
- Cabang Kertajati	233.124.000	133.481.000
- Cabang Ligung	373.448.134	277.303.600
- Cabang Kadipaten	651.073.700	542.511.300
- Cabang Cikijing	675.210.800	527.183.500
- Cabang Bantarujeg	548.244.000	356.620.500
- Cabang Sukahaji	474.481.500	295.345.600
<b>Jumlah</b>	<b>4.490.611.134</b>	<b>3.507.349.800</b>

**TabunganKu**

- Kantor Operasional Pusat	2.113.118.342	2.428.330.861
- Cabang Rajagaluh	2.479.931.976	2.442.751.904
- Cabang Jatitujuh	994.392.917	496.098.546
- Cabang Kertajati	1.975.286.564	2.068.490.913
- Cabang Ligung	2.028.565.310	1.770.011.832
- Cabang Kadipaten	3.515.678.478	3.029.336.383
- Cabang Cikijing	1.210.708.634	1.188.045.169
- Cabang Bantarujeg	1.461.567.721	1.503.309.567
- Cabang Sukahaji	1.094.763.543	1.111.486.494
<b>Jumlah</b>	<b>16.874.013.485</b>	<b>16.037.861.669</b>

**Tadabur**

- Kantor Operasional Pusat	33.600.000	25.200.000
- Cabang Kertajati	-	-
- Cabang Ligung	16.100.000	12.250.000
- Cabang Kadipaten	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>49.700.000</b>	<b>37.450.000</b>

**Tapaqur**

- Kantor Operasional Pusat	-	-
- Cabang Rajagaluh	-	2.650.000
- Cabang Kertajati	-	1.060.000
- Cabang Ligung	-	-
- Cabang Kadipaten	10.600.000	2.120.000
- Cabang Cikijing	1.060.000	2.120.000
<b>Jumlah</b>	<b>11.660.000</b>	<b>7.950.000</b>

**Keterangan :**

Penempatan dana masyarakat dalam bentuk tabungan per 31 Desember 2019 dan 2018 dengan tingkat suku bunga 0% - 9% Per tahun dari saldo terkecil setiap bulan minimal Rp. 25.000.

**SIMPANAN (Lanjutan)**

	<u>31-Des-19</u>	<u>31-Des-18</u>
<b>d. Deposito Berjangka Menurut Jangka Waktu</b>		
- Deposito 1 Bulan	5.260.000.000	6.690.000.000
- Deposito 3 Bulan	13.941.500.000	14.512.900.000
- Deposito 6 Bulan	11.629.800.000	14.178.700.000
- Deposito 9 Bulan	1.820.500.000	1.867.000.000
- Deposito 12 Bulan	18.625.200.000	21.205.850.000
- Deposito 24 Bulan	8.441.000.000	9.312.000.000
<b>Jumlah</b>	<b><u>59.718.000.000</u></b>	<b><u>67.766.450.000</u></b>
<b>e. Jenis Jangka Waktu Deposito Per Cabang :</b>		
<b>Deposito 1 Bulan</b>		
- Kantor Operasional Pusat	703.000.000	1.572.000.000
- Cabang Rajagaluh	-	-
- Cabang Jatitujuh	136.000.000	307.000.000
- Cabang Kertajati	25.000.000	68.000.000
- Cabang Kadipaten	693.500.000	1.107.000.000
- Cabang Ligung	1.165.000.000	862.000.000
- Cabang Cikijing	142.500.000	154.000.000
- Cabang Bantarujeg	2.395.000.000	2.570.000.000
- Cabang Sukahaji	-	50.000.000
<b>Jumlah</b>	<b><u>5.260.000.000</u></b>	<b><u>6.690.000.000</u></b>
<b>Deposito 3 Bulan</b>		
- Kantor Operasional Pusat	2.495.500.000	3.127.000.000
- Cabang Rajagaluh	1.461.500.000	2.120.000.000
- Cabang Jatitujuh	1.308.000.000	1.932.200.000
- Cabang Kertajati	1.618.500.000	1.014.100.000
- Cabang Kadipaten	762.000.000	1.288.300.000
- Cabang Ligung	3.207.500.000	2.452.800.000
- Cabang Cikijing	1.082.500.000	851.500.000
- Cabang Bantarujeg	1.104.000.000	946.000.000
- Cabang Sukahaji	902.000.000	781.000.000
<b>Jumlah</b>	<b><u>13.941.500.000</u></b>	<b><u>14.512.900.000</u></b>
<b>Deposito 6 Bulan</b>		
- Kantor Operasional Pusat	1.413.000.000	3.480.500.000
- Cabang Rajagaluh	1.880.700.000	1.763.700.000
- Cabang Jatitujuh	1.552.100.000	1.448.500.000
- Cabang Kertajati	2.020.000.000	1.802.000.000
- Cabang Kadipaten	1.044.500.000	1.288.000.000
- Cabang Ligung	1.898.500.000	2.201.500.000
- Cabang Cikijing	429.000.000	547.500.000
- Cabang Bantarujeg	527.500.000	858.500.000
- Cabang Sukahaji	864.500.000	788.500.000
<b>Jumlah</b>	<b><u>11.629.800.000</u></b>	<b><u>14.178.700.000</u></b>
<b>Deposito 9 Bulan</b>		
- Kantor Operasional Pusat	263.500.000	371.000.000
- Cabang Rajagaluh	561.500.000	335.000.000
- Cabang Jatitujuh	185.000.000	260.500.000
- Cabang Kertajati	45.000.000	131.000.000

**SIMPANAN (Lanjutan)**

- Cabang Kadipaten	135.500.000	225.000.000
- Cabang Ligung	-	263.000.000
- Cabang Cikijing	527.500.000	127.000.000
- Cabang Bantarujeg	32.500.000	122.500.000
- Cabang Sukahaji	70.000.000	32.000.000
<b>Jumlah</b>	<b><u>1.820.500.000</u></b>	<b><u>1.867.000.000</u></b>

**Deposito 12 Bulan**

- Kantor Operasional Pusat	3.882.500.000	6.470.900.000
- Cabang Rajagaluh	1.224.500.000	1.126.000.000
- Cabang Jatitujuh	3.139.900.000	2.856.100.000
- Cabang Kertajati	3.652.800.000	3.499.550.000
- Cabang Kadipaten	2.183.600.000	2.389.900.000
- Cabang Ligung	772.500.000	840.500.000
- Cabang Cikijing	211.300.000	358.800.000
- Cabang Bantarujeg	471.000.000	817.500.000
- Cabang Sukahaji	3.087.100.000	2.846.600.000
<b>Jumlah Deposito 12 Bulan</b>	<b><u>18.625.200.000</u></b>	<b><u>21.205.850.000</u></b>

**Deposito 24 Bulan :**

- Kantor Operasional Pusat	1.480.000.000	2.300.000.000
- Cabang Rajagaluh	410.000.000	710.000.000
- Cabang Jatitujuh	1.131.000.000	426.000.000
- Cabang Kertajati	1.526.000.000	1.671.000.000
- Cabang Kadipaten	860.000.000	986.000.000
- Cabang Ligung	1.790.000.000	1.741.000.000
- Cabang Cikijing	330.000.000	526.000.000
- Cabang Bantarujeg	130.000.000	40.000.000
- Cabang Sukahaji	784.000.000	912.000.000
<b>Jumlah Deposito 24 Bulan</b>	<b><u>8.441.000.000</u></b>	<b><u>9.312.000.000</u></b>

**Jumlah Deposito**

<b><u>59.718.000.000</u></b>	<b><u>67.766.450.000</u></b>
------------------------------	------------------------------

Tingkat suku bunga desposito berjangka Per 31 Desember 2019 dan 2018, berkisar antara 1,5 % - 10 %, suku bunga sepenuhnya belum mengacu kepada bunga maksimal yang ditetapkan LPS, masih ada depositan yang diberikan jasa deposito di atas bunga yang ditetapkan LPS.

**f. Biaya Transaksi Deposito**

<b><u>(365.848.382)</u></b>	<b><u>(344.897.572)</u></b>
-----------------------------	-----------------------------

**Jumlah Deposito**

<b><u>59.352.151.618</u></b>	<b><u>67.421.552.428</u></b>
------------------------------	------------------------------

**SIMPANAN DARI BANK LAIN**

Jumlah saldo simpanan dari bank lain dengan rincian sbb. :

	<b><u>31-Des-19</u></b>	<b><u>31-Des-18</u></b>
- Tabungan	187.935.630	177.017.573
- Deposito	350.000.000	-
<b>Jumlah</b>	<b><u>537.935.630</u></b>	<b><u>177.017.573</u></b>

**PINJAMAN DITERIMA**

	<u>31-Des-19</u>	<u>31-Des-18</u>
Jumlah saldo pinjaman diterima dengan rincian sbb. :		
- Bank BJB	4.683.333.329	6.999.999.996
- Biaya Transaksi -/-	(41.334.092)	(62.284.112)
<b>Jumlah Dari Bank Lain</b>	<b><u>4.641.999.237</u></b>	<b><u>6.937.715.884</u></b>
- Pihak ke tiga Bukan Bank		
- LPDB Jakarta	(83.333.333)	-
- Biaya Transaksi	-	-
<b>Jumlah pinjaman diterima lainnya</b>	<b><u>(83.333.333)</u></b>	<b><u>-</u></b>
Provisi Pinjaman	-	-
<b>Jumlah Pinjaman Diterima</b>	<b><u>4.558.665.904</u></b>	<b><u>6.937.715.884</u></b>

1) Pinjaman Lembaga PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, berdasarkan Perjanjian Kredit No. 0701/Mjl-Comm/2016, tanggal 29/06/2016, Jenis Kredit : KMK Installment, Maksimum kredit sebesar Rp. 7.000.000.000,-, Sifat Kredit: Non Revolving Basis, Jangka waktu : 66 Bulan, Suku bunga : 9,55% s/d 30 Juni 2016 ("Program Gempita 55") dan minimal 10,25% setelah "Program Gempita 55" berakhir.

2) Pinjaman Lembaga PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, berdasarkan Perjanjian Kredit No. 0472/Mjl-Comm/2017, tanggal 20/06/2017, Jenis Kredit : KMK Installment, Maksimum kredit sebesar Rp. 10.000.000.000,-, Sifat Kredit: Non Revolving Basis, Jangka waktu : 72 Bulan, Suku bunga :

**KEWAJIBAN LAIN-LAIN**

	<u>31-Des-19</u>	<u>31-Des-18</u>
Jumlah tersebut merupakan saldo kewajiban lain-lain dengan rincian sbb. :		
- Titipan Lainnya (Kantor Pusat)	61.505.335	61.359.449
- Kewajiban Imbalan Kerja (Jangka Pendek)	-	387.664.332
- Kewajiban Imbalan Kerja (Jangka Panjang)	600.405.701	458.025.000
<b>Jumlah Kewajiban Lainnya</b>	<b><u>661.911.036</u></b>	<b><u>907.048.781</u></b>

**MODAL**

	<u>31-Des-19</u>	<u>31-Des-18</u>
Jumlah saldo kepemilikan modal dengan rincian sbb. :		
- Modal Dasar	10.000.000.000	10.000.000.000
- Modal Belum Disetor	(2.938.221.102)	(2.938.221.102)
<b>Modal Yang Telah Disetor</b>	<b><u>7.061.778.898</u></b>	<b><u>7.061.778.898</u></b>
- Modal Sumbangan	80.989.000	80.989.000
<b>Jumlah Modal Disetor</b>	<b><u>7.142.767.898</u></b>	<b><u>7.142.767.898</u></b>

Komposisi kepemilikan modal pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No. 4 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka.

**SALDO LABA**

	<u>31-Des-19</u>	<u>31-Des-18</u>
- <b>CADANGAN</b>		
Jumlah saldo cadangan tahun berjalan dengan rincian sbb:		
- Cadangan Umum	5.242.686.750	4.639.825.462
- Cadangan Tujuan	5.639.749.102	5.036.887.815
<b>Jumlah Cadangan</b>	<b><u>10.882.435.851</u></b>	<b><u>9.676.713.276</u></b>

Jumlah tersebut merupakan akumulasi cadangan umum dan tujuan yang diperoleh dari penyisihan dari laba pada akhir tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Perumda BPR Majalengka No. 04 Tahun 2010.

**SALDO LABA (Lanjutan)****- LABA RUGI TAHUN BERJALAN**

Jumlah saldo laba rugi tahun berjalan dengan rincian sbb:

	<u>31-Des-19</u>	<u>31-Des-18</u>
- Kantor Operasional Pusat	(15.766.102.371)	(16.394.647.795)
- Cabang Rajagaluh	2.951.679.865	2.983.058.433
- Cabang Jatitujuh	2.603.140.003	3.153.218.863
- Cabang Kertajati	3.044.659.552	3.193.163.779
- Cabang Ligung	3.067.047.052	3.158.043.268
- Cabang Kadipaten	2.683.080.651	2.546.721.405
- Cabang Cikijing	2.311.561.635	2.057.020.017
- Cabang Bantarujeg	2.518.491.813	2.302.331.345
- Cabang Sukahaji	1.525.528.054	3.075.346.085
<b>Jumlah Laba Rugi Tahun Berjalan</b>	<b><u>4.939.086.254</u></b>	<b><u>6.074.255.400</u></b>
- Koreksi Audit	<b><u>(15.485.537)</u></b>	<b><u>(45.681.253)</u></b>
<b>Jumlah Laba Rugi Tahun Berjalan</b>	<b><u>4.923.600.717</u></b>	<b><u>6.028.574.147</u></b>

**PENDAPATAN BUNGA**

Jumlah pendapatan bunga tahun berjalan dengan rincian sbb :

**a. Pendapatan Bunga Bank**

	<u>31-Des-19</u>	<u>31-Des-18</u>
- Giro	81.750.550	48.877.791
- Tabungan	496.340.701	632.145.759
- Deposito Berjangka	494.930.914	573.916.122
<b>Jumlah Pendapatan Bunga Dari Bank Lain</b>	<b><u>1.073.022.166</u></b>	<b><u>1.254.939.671</u></b>

**b. Pendapatan Pihak Ketiga Non Bank Menurut Cabang :**

- Kantor Operasional Pusat	5.860.635.559	5.546.917.289
- Cabang Rajagaluh	2.877.364.423	2.883.523.521
- Cabang Jatitujuh	3.058.197.416	3.215.747.139
- Cabang Kertajati	3.415.340.246	3.438.379.812
- Cabang Ligung	3.311.049.084	3.195.139.772
- Cabang Kadipaten	2.872.997.195	2.655.877.313
- Cabang Cikijing	2.347.206.223	2.124.813.875
- Cabang Bantarujeg	2.528.918.678	2.478.985.391
- Cabang Sukahaji	3.063.003.463	3.337.525.684
<b>Sub Jumlah</b>	<b><u>29.334.712.287</u></b>	<b><u>28.876.909.796</u></b>
<b>Jumlah Pendapatan Bunga</b>	<b><u>30.407.734.453</u></b>	<b><u>30.131.849.467</u></b>
- Biaya Transaksi	<b><u>(437.180)</u></b>	<b><u>(3.028.019)</u></b>
<b>Jumlah Pendapatan Bunga</b>	<b><u>30.407.297.273</u></b>	<b><u>30.128.821.448</u></b>

**PENDAPATAN PROVISI DAN KOMISI**

Jumlah pendapatan provisi dan komisi yang diperoleh dengan rincian sbb. :

**Pendapatan Provisi :**

	<u>31-Des-19</u>	<u>31-Des-18</u>
- Kantor Operasional Pusat	787.664.764	630.136.224
- Cabang Rajagaluh	307.775.003	310.505.656
- Cabang Jatitujuh	350.091.118	387.733.030
- Cabang Kertajati	354.322.307	368.193.395
- Cabang Ligung	367.201.987	379.972.454
- Cabang Kadipaten	381.943.987	330.975.604

8

**PENDAPATAN PROVISI DAN KOMISI (Lanjutan)**

- Cabang Cikijing	264.820.134	209.699.758
- Cabang Bantarujeg	342.715.650	274.949.470
- Cabang Sukahaji	383.564.761	353.608.437
<b>Jumlah Pendapatan Provisi</b>	<b>3.540.099.711</b>	<b>3.245.774.028</b>

**BEBAN BUNGA**

	<u>31-Des-19</u>	<u>31-Des-18</u>
Jumlah beban bunga, dengan rincian sbb. :		
<b>Bunga Kepada Pihak Ke Tiga BPR :</b>		
- Bunga Tabungan	10.924.057	8.885.743
- Bunga Deposito	124.806.229	42.500.001
<b>Jumlah</b>	<b>135.730.286</b>	<b>51.385.744</b>

**Beban Kepada Pihak Ketiga Non Bank**

- <b>Beban Bunga Tabungan</b>		
- Tabungan Tiara	1.438.958.864	1.309.522.278
- Tabungan Kotak Mas	380.662.104	329.527.182
- Tabungan SIDASI	329.814.173	328.876.292
- Tabungan TAHARA	216.479.108	156.610.913
- Tabunganku	604.851.640	667.249.480
- Tadabur	2.647.750	1.973.375
- Tapaqur	541.800	1.255.325
<b>Jumlah Beban Bunga Tabungan</b>	<b>2.973.955.439</b>	<b>2.795.014.845</b>

**- Beban Bunga Deposito**

- Bunga deposito 1 bulan	415.121.147	497.670.569
- Bunga deposito 3 bulan	1.001.526.101	766.719.942
- Bunga deposito 6 bulan	719.830.682	749.931.774
- Bunga deposito 9 bulan	100.181.875	120.751.128
- Bunga deposito 12 bulan	1.439.199.410	1.608.065.907
- Bunga deposito 24 bulan	357.026.143	318.259.777
<b>Jumlah Beban Bunga Deposito</b>	<b>4.032.885.358</b>	<b>4.061.399.097</b>

- Biaya Transaksi	379.209.957	361.595.535
<b>Jumlah Beban Bunga Deposito</b>	<b>4.412.095.315</b>	<b>4.422.994.632</b>

- Beban Bunga Lainnya	235.583.631	258.581.900
<b>Jumlah Beban Bunga Lainnya</b>	<b>235.583.631</b>	<b>258.581.900</b>

**Beban Bunga Pinjaman**

- Bunga Pinjaman Dari Bank Lain	590.357.568	822.387.887
- Biaya Bunga Pinjaman Non Bank	-	11.798.388
<b>Jumlah Beban Bunga Pinjaman</b>	<b>590.357.568</b>	<b>834.186.275</b>

<b>Jumlah Beban Bunga</b>	<b>8.347.722.239</b>	<b>8.362.163.396</b>
---------------------------	----------------------	----------------------

**PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA**

	<u>31-Des-19</u>	<u>31-Des-18</u>
Jumlah pendapatan operasional lainnya, dengan rincian sbb. :		
- Pendapatan Adm./Denda Tabungan	398.266.846	382.547.680
- Pendapatan Adm./Denda Deposito	131.711.157	89.030.601
- Pendapatan Adm./Denda Kredit	2.012.144.519	2.090.385.100

**PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA (Lanjutan)**

- Angsuran Kredit Hapus Buku	78.497.350	56.024.148
- Pemulihan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	745.205.596	803.459.246
- Pendapatan Operasional lainnya	100.757.215	22.475.495
<b>Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya</b>	<b>3.466.582.683</b>	<b>3.443.922.270</b>

**BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN ASET PRODUKTIF**

Jumlah beban penyisihan kerugian aktiva produktif, dengan rincian sbb. :

	<u>31-Des-19</u>	<u>31-Des-18</u>
<b>Beban Penyisihan Kerugian</b>		
- Penempatan pada Bank Lain	227.153.059	239.312.633
- Pinjaman Diberikan	3.211.619.850	839.252.750
<b>Jumlah Beban Penyisihan Kerugian</b>	<b>3.438.772.909</b>	<b>1.078.565.383</b>

Beban Penyisihan Kerugian Penempatan pada Bank Lain kekurangan pembentukan untuk Giro sebesar Rp.37.769.331,00 sesuai dengan POJK No. 33 /POJK.03/2018.

**BEBAN PEMASARAN**

Jumlah beban pemasaran, dengan rincian sbb. :

	<u>31-Des-19</u>	<u>31-Des-18</u>
- Beban Promosi	478.660.714	464.285.300
- Beban Lainnya	-	-
<b>Jumlah Beban Pemasaran</b>	<b>478.660.714</b>	<b>464.285.300</b>

**BEBAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jumlah beban penelitian dan pengembangan, dengan rincian sbb. :

	<u>31-Des-19</u>	<u>31-Des-18</u>
- Beban Penelitian dan Pengembangan	-	8.880.000
<b>Jumlah Beban Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>-</b>	<b>8.880.000</b>

**BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM**

Jumlah beban administrasi dan umum, dengan rincian sbb. :

**Beban Tenaga Kerja**

	<u>31-Des-19</u>	<u>31-Des-18</u>
<b>- Beban Gaji, Honor dan Tunjangan :</b>		
- Beban Gaji Pokok	5.696.844.678	5.156.814.180
- Beban Honor Dewan Pengawas	184.643.940	177.581.351
- Beban Honor Pegawai	315.183.123	281.290.308
- Beban Tunjangan Suami/Istri	460.236.552	414.404.105
- Beban Tunjangan Jabatan	949.053.128	916.350.700
- Beban Tunjangan Pangan/Natura	465.000.000	464.350.000
- Beban Tunjangan Kemahalan	992.875.855	504.105.795
- Beban Tunjangan Perumahan	64.740.000	66.600.000
- Beban Tunjangan Lainnya	2.282.025.000	2.332.750.000
- Beban Tunjangan DPLK	21.450.000	-
- Beban Tunjangan Transportasi	-	32.400.000
<b>Jumlah Beban Gaji dan Tunjangan</b>	<b>11.432.052.276</b>	<b>10.346.646.439</b>

**BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM (Lanjutan)**

	<u>31-Des-19</u>	<u>31-Des-18</u>
<b>- Beban Tenaga Kerja Lainnya</b>		
- Beban THR	1.864.804.084	1.726.580.694
- Beban Lembur	22.993.570	11.109.599
- Beban Premi Asuransi (DPLK)	237.850.000	269.550.000
- Beban Jasa Pengabdian	10.851.750	-
- Beban Tunjangan Pendidikan	477.912.000	470.376.000
- Beban Tunjangan PPh 21	162.685.931	101.901.895
- Beban Pesangon	531.178.821	1.119.808.274
- Beban Tunjangan Lainnya	-	223.604.545
<b>Jumlah Beban Tenaga Kerja Lainnya</b>	<u><b>3.308.276.156</b></u>	<u><b>3.922.931.007</b></u>
<b>- Beban Pendidikan</b>		
- Biaya Pendidikan Karyawan	713.478.947	714.023.783
<b>Jumlah Beban Pendidikan</b>	<u><b>713.478.947</b></u>	<u><b>714.023.783</b></u>
<b>Jumlah Beban Tenaga Kerja</b>	<u><b>15.453.807.379</b></u>	<u><b>14.983.601.229</b></u>
<b>- Biaya Premi Asuransi</b>		
- Biaya Asuransi	443.693.498	421.914.122
<b>Jumlah Beban Asuransi</b>	<u><b>443.693.498</b></u>	<u><b>421.914.122</b></u>
<b>- Beban Sewa :</b>		
- Beban Sewa Gedung Kantor	133.114.978	203.463.150
- Sewa Jasa Pengamanan dan Kebersihan	1.243.343.500	1.131.030.204
- Sewa Kendaraan	-	-
- Sewa Lainnya	293.490.180	357.971.100
<b>Jumlah Beban Sewa</b>	<u><b>1.669.948.658</b></u>	<u><b>1.692.464.454</b></u>
<b>- Beban Penyusutan</b>		
- Beban Penyusutan Gedung	33.275.895	42.502.224
- Beban Penyusutan Kendaraan	168.661.282	195.255.578
- Beban Penyusutan Inventaris Kantor	286.515.654	294.318.835
- Beban Amortisasi	42.032.340	50.170.775
<b>Jumlah Beban Penyusutan</b>	<u><b>530.485.171</b></u>	<u><b>582.247.412</b></u>
<b>- Beban Pajak Bukan Penghasilan :</b>		
- Beban Pajak PBB	1.606.173	3.597.223
- Beban Pajak Kendaraan	40.119.500	33.149.750
<b>Jumlah Beban Pajak Bukan Penghasilan</b>	<u><b>41.725.673</b></u>	<u><b>36.746.973</b></u>
<b>- Beban Pemeliharaan dan Perbaikan :</b>		
- Beban Pemeliharaan Gedung	41.962.748	24.606.048
- Beban Pemeliharaan Kendaraan	89.980.105	95.209.966
- Beban Pemeliharaan Inventaris Kantor	22.152.500	36.272.336
- Pemeliharaan Jasa Service	42.457.380	43.456.294
- Beban Pemeliharaan Lainnya	220.850.224	189.020.000
<b>Jumlah Beban Pemeliharaan dan Perbaikan</b>	<u><b>417.402.957</b></u>	<u><b>388.564.644</b></u>

**BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM (Lanjutan)**

	<u>31-Des-19</u>	<u>31-Des-18</u>
- <b>Beban Barang dan Jasa :</b>		
- Beban Listrik dan Air PDAM	240.245.476	225.957.734
- Beban Telepon	145.067.676	143.700.188
- Beban Alat Tulis Kantor dan Cetak	221.382.517	238.858.550
- Beban Perjalanan	58.925.900	52.854.330
- Pembayaran Akuntan	44.000.000	40.000.000
- Biaya Exspedisi surat menyurat	8.295.800	8.699.000
- Biaya Jamuan Tamu	106.094.988	87.844.702
- Biaya Pembelian Tagihan Koran dan Majalah	12.907.600	10.504.500
- Biaya Materai dan Deposito	18.379.000	19.377.000
- Biaya BBM	43.953.489	44.646.614
- Beban Lainnya	288.732.554	305.615.011
<b>Jumlah Beban Barang dan Jasa</b>	<b><u>1.187.985.000</u></b>	<b><u>1.178.057.629</u></b>
- <b>Beban Operasional Lainnya :</b>		
- Beban Operasional Dewan Pengawas	-	-
- Beban Operasional Kredit	110.878.492	120.237.623
- Beban Operasional Dana	4.425.500	5.613.000
- Beban Operasional Lainnya	368.002.967	118.654.561
<b>Jumlah Beban Operasional Lainnya</b>	<b><u>483.306.959</u></b>	<b><u>244.505.184</u></b>
<b>Total beban Administrasi dan Umum</b>	<b><u>20.228.355.294</u></b>	<b><u>19.528.101.647</u></b>

**PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL**

	<u>31-Des-19</u>	<u>31-Des-18</u>
Jumlah pendapatan (beban) non operasional lainnya, dengan rincian sbb. :		
<b>Pendapatan Non Operasional</b>		
- Hasil Penjualan Investasi/Aktiva Tetap	-	-
- Fee/Komisi	111.682.829	171.805.326
- Lainnya	12.140.235	517.201.989
<b>Jumlah Pendapatan Non Operasional</b>	<b><u>123.823.064</u></b>	<b><u>689.007.315</u></b>
<b>Beban Non Operasional</b>		
- Sumbangan-Sumbangan	55.997.436	42.728.000
- Denda dan Finalty	18.735.600	7.798.558
- Beban Non Opr. Lainnya	47.483.171	102.049.023
<b>Jumlah Beban Non Operasional</b>	<b><u>122.216.207</u></b>	<b><u>152.575.581</u></b>
<b>Jumlah pendapatan (beban) non operasional</b>	<b><u>1.606.857</u></b>	<b><u>536.431.734</u></b>

## PAJAK PENGHASILAN

	31-Des-19	31-Des-18
Rekonsiliasi antar laba komersil sebelum pajak penghasilan dengan laba kena pajak untuk tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :		
<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>4.922.075.368</b>	<b>7.912.953.754</b>
Tambah (kurang) beda tetap :		
- Cadangan Pesangon	-	-
- Beban Sumbangan	55.997.436	42.728.000
- Beban Non Operasional Lainnya	45.109.012	96.946.571,85
<b>Jumlah</b>	<b>101.106.448</b>	<b>139.674.572</b>
Laba (rugi) Fiskal	<b>5.023.181.816</b>	<b>8.052.628.326</b>
Tambah (kurang) beda temporer		
- Biaya Penyusutan	-	-
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>5.023.181.816</b>	<b>8.052.628.326</b>
Perhitungan Volume Pendapatan	<b>37.537.802.731</b>	<b>37.507.525.061</b>
Taksiran Penghasilan Kena Pajak	5.023.181.816	8.052.628.326

	Tahun 2019	Tahun 2018		
Pajak Penghasilan	PKP	PKP		
Tarif Fasilitas	-	1.030.529.631	-	128.816.204
<b>Pajak Penghasilan</b>				
Tarif Tanpa Fasilitas	5.023.181.816	7.022.098.695	1.255.795.454	1.755.524.674
<b>Jumlah Taksiran Pajak Penghasilan</b>			<b>1.255.795.454</b>	<b>1.884.340.878</b>
- Pajak dibayar dimuka - PPh Pasal 25 yang telah disetor			(1.228.268.706)	(1.331.117.077)
- Koreksi kelebihan bayar PPh Badan			-	-
- Kekurangan (Kelebihan) PPh Pasal 29			<b>27.526.748</b>	<b>553.223.801</b>
- Kekurangan (Kelebihan) PPh Pasal 29 Menurut BPR			12.041.211	507.542.548
- Perbedaan Perhitungan Taksiran Pajak			<b>(15.485.537)</b>	<b>(45.681.253)</b>

Perhitungan Pajak Badan disesuaikan menurut PMK RI No. 215/PMK.03/2018 Tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat Laporan Keuangan Berkala Dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

## MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

BPR memiliki eksposur terhadap risiko yang mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat di bawah ini:

- Risiko kredit
- Risiko Operasional
- Risiko Kepatuhan
- Risiko Likuiditas

### 1. Risiko Kredit

Salah satu risiko usaha yang dihadapi Bank Perkreditan Rakyat adalah Risiko Kredit atau *Credit Risk* yaitu risiko yang timbul dalam hal debitur gagal memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran pokok ataupun bunga sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kredit; disamping risiko suku bunga, risiko kredit merupakan salah satu risiko utama dalam pelaksanaan pemberian kredit Bank dan hal ini juga akan berpengaruh terhadap kolektibilitas kredit.

## MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Risiko kredit dikelola melalui penetapan kebijakan - kebijakan dan proses-proses yang meliputi kriteria pemberian kredit, origination, dan persetujuan kredit, penetapan pricing, pemantauan, pengelolaan kredit bermasalah dan manajemen portofolio. *Credit Risk Policy* secara *bankwide* digunakan sebagai acuan utama bagi semua lini bisnis dan Entitas Anak dalam menjalankan aktivitas perkreditan. *Credit Risk Policy* direview minimal setahun sekali, untuk menyesuaikan dengan regulasi dan kondisi terkini.

Sistem pengukuran resiko kredit dapat dilakukan dengan mempertimbangkan :

1. Karakteristik setiap jenis transaksi Resiko Kredit,
2. Jangka waktu kredit (*maturity profile*) dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar, khususnya di lingkungan BPR.
3. Aspek jaminan, agunan dan/atau garansi.
4. Potensi terjadinya kegagalan membayar (default), baik berdasarkan hasil penilaian pendekatan konvensional atau historikal.

Manajemen BPR dapat melakukan pendendalian resiko kredit sebagai berikut :

1. Pemisahan Fungsi, Kegiatan pemberian fasilitas kredit hingga pengelolaan Resiko dilakukan oleh bagian yang terpisah sesuai fungsinya, misalnya bagian analisa, memutus serta penagihan kredit macet dilakukan oleh fungsi yang berbeda.
2. Pemantauan Kredit, Pemantauan atas portfolio kredit BPR dilakukan dengan membuat sejumlah laporan secara rutin kepada Manajemen.
3. Persetujuan Kredit, Pemberian kredit harus melalui persetujuan dari pejabat kredit sesuai dengan tingkat otoritas yang dimilikinya.
4. Pengendalian Fisik Agunan, Agunan kredit dikelola oleh unit yang berbeda sesuai fungsinya termasuk proses penyimpanannya yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi tersendiri.

### 2. Risiko Operasional

Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidak cukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi Bank menerapkan kebijaksanaan pembentukan penyisihan penghapusan piutang berdasarkan prinsip kehati-hatian. Bank tidak menetapkan persyaratan yang lebih ringan kepada pemilik/pengurus bank untuk memperoleh fasilitas dari Bank. Pimpinan senantiasa melakukan tindak lanjut secara efektif terhadap temuan hasil pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tujuan manajemen resiko operasional adalah meningkatkan pengawasan operasional melalui pengumpulan data kerugian/kejadian resiko operasional yang berkaitan dengan"aktivitas operasional, selain itu data kerugian/kejadian digunakan untuk memperbaiki proses operasional pada aktivitas pekerjaan masing-masing, dan kemudian mengukur tingkat resiko yang dihitung berdasarkan data tersebut dengan proses sebagai berikut :

1. Identifikasi Resiko Operasional
2. Pengukuran Resiko Operasional
3. Pemantauan Resiko Operasional
4. Pengendalian Resiko Operasional
5. Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

### 3. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan merupakan resiko yang disebabkan BPR tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pada prakteknya resiko kepatuhan melekat pada resiko BPR yang terkait pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti resiko kredit terkait dengan ketentuan, Kualitas Aktiva Produktif dan **Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP)** sesuai PBI No.13/26/PBI/2011, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sesuai SE OJK No. 41/SOJK.03/2017 dan resiko lain yang terkait dengan ketentuan tertentu.

Risiko lain termasuk resiko akibat kelemahan hukum. Kelemahan aspek hukum anatara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipatuhinya syarat syahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

## MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Pemantauan resiko kepatuhan umumnya dilakukan oleh Unit Kerja Kepatuhan dan Unit Manajemen Resiko, meliputi :

1. Pemantauan atas implementasi Manajemen resiko kepatuhan disetiap unit kerja dan melaporkan hasilnya kepada Direktur yang membidangi.
2. Melakukan analisis terhadap trend peningkatan atau penurunan resiko kepatuhan termasuk tindakan dan upaya yang diperlukan dalam meminimalkan terjadinya kerugian yang lebih besar, terutama yang bersifat material dan/atau yang berdampak pada permodalan BPR.
3. Melakukan evaluasi terhadap eksposur resiko kepatuhan dan dilaporkan secara tepat waktu, akurat dan informatif sehingga dapat digunakan oleh pihak pengambil Keputusan, termasuk tindak lanjut yang diperlukan.
4. Pemantauan dilakukan terhadap posisi/eksposur resiko secara keseluruhan, maupun per aktivitas fungsional oleh unit kerja terkait. Misalnya pemantauan atas kepatuhan terhadap Perjanjian Kredit, kepatuhan terhadap limit, dan lain-lain.

### 4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko akibat ketidak kemampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat dipengaruhi, tanpa mengganggu aktifitas dan kondisi keuangan Bank. Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan risiko likuiditas dapat disebabkan:

- a. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari asset produktif maupun yang berasal dari penjualan asset termasuk asset likuid; dan/atau
- b. Ketidak mampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank, dan pinjaman yang diterima.

Ketidakmampuan Bank memperoleh pendanaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat sehingga semakin meningkat risiko likuiditas, dan selanjutnya dapat mempengaruhi aspek-aspek keuangan lainnya yang dapat mengancam kelangsungan usaha Bank. Mengingat permasalahan likuiditas sebagaimana dimaksud diatas dapat memberikan dampak yang signifikan, maka Bank wajib menerapkan manajemen risiko untuk risiko likuiditas secara efektif baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak.

### 4. Risiko Likuiditas

Tujuan utama dari penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas adalah untuk memastikan kecukupan dana secara harian baik pada saat kondisi normal maupun kondisi krisis dalam pemenuhan kewajiban secara tepat waktu dari berbagai sumber dana yang tersedia, termasuk memastikan ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi. Penerapan risiko untuk risiko likuiditas secara efektif paling kurang mencakupi:

- a. Pengawas aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penempatan limit manajemen risiko
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
- d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

## SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Dalam menyusun laporan keuangan, Perusahaan menggunakan basis estimasi dan pertimbangan untuk menentukan saldo-saldo dalam laporan keuangan. Estimasi dan pertimbangan yang digunakan tersebut terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan factor lainnya termasuk ekspektasi dari peristiwa masa depan yang diyakini wajar. Meskipun estimasi dan pertimbangan tersebut disusun berdasarkan pengetahuan terbaik Perseroan atas peristiwa dan kondisi pada saat ini. Hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah estimasi semula. Berikut ini penjelasan sifat beberapa akun yang menggunakan estimasi dan pertimbangan secara signifikan, sedangkan terkait dengan penyajian jumlah dan saldo dapat dilihat pada catatan yang relevan.

### Penyisihan Penurunan Nilai Piutang

Apabila terdapat bukti objektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi atas piutang, Perusahaan mengestimasi penyisihan untuk kerugian penurunan nilai atas piutang yang secara khusus diidentifikasi sebagai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Perseroan telah melakukan penelaahan tingkat penyisihan dengan dasar faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tertagihnya piutang tersebut.

Perseroan menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit pelanggan berdasarkan kualitas pinjaman.

Perusahaan belum membentuk dan mengungkapkan beban dan saldo penyisihan

### Penyusutan

Perseroan mengakui beban penyusutan asset tetap berdasarkan estimasi umur manfaat berdasarkan suatu metode penyusutan sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan. Metode penyusutan ditetapkan berdasarkan ekspektasi pola pemanfaatan ekonomi asset pada masa mendatang. Pada setiap akhir tahun, Perseroan mereviu umur manfaat, nilai sisa, dan metode penyusutan untuk mendapatkan basis estimasi yang paling optimal.

Lihat catatan 3.i dan 9 Aset Tetap yang mengungkapkan besarnya beban dan akumulasi penyusutan.

### Imbalan Pasacakerja

Perusahaan mengakui imbalan pascakerja karyawan berdasarkan ketentuan dalam UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pada saat karyawan berhenti kerja, Perseroan harus membayarkan sejumlah imbalan pada saat karyawan meninggal dunia, pension normal, cacat tetap, atau mengundurkan diri sebesar formula yang ditentukan oleh UU tersebut. Besarnya imbalan yang dibayarkan tergantung pada besaran gaji dan tunjangan tetap pada saat berhenti bekerja, masa kerja, dan jenis peristiwa yang menyebabkan berhentinya hubungan kerja. Perseroan mengakui imbalan pascakerja tersebut sebagai beban pada saat karyawan masih aktif berdasarkan metode *projected unit* dan mengakui keuntungan – kerugian actuarial sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan. Dalam menentukan beban dan kewajiban imbalan pascakerja per tanggal laporan keuangan, Perseroan menggunakan asumsi keuangan dan asumsi actuarial.

Perusahaan telah membentuk dan mengungkapkan kewajiban imbalan pascakerja Tahun 2017 dan 2018.

### TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA

Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan POJK No. 49/POJK.02/2017 Tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR, yaitu tidak melebihi BMPK sebesar 10% dari modal Bank.

### PENGUNGKAPAN LAINNYA

	<u>31-Des-19</u>	<u>31-Des-18</u>
<b>a. TAGIHAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI</b>		
Jumlah saldo tagihan komitmen dan kontijensi, dengan rincian sbb		
:		
<b>Aset Komitmen</b>		
- Fasilitas Pinjaman Yang Diterima Belum Ditarik	-	-
- Lain-Lain	-	-
<b>Jumlah Aset Komitmen</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Aset Kontijensi</b>		
- Bunga Dalam Penyelesaian	3.334.863.269	2.028.052.116
- Aktiva Produktif yang dihapusbukukan	4.881.712.523	4.461.242.673
<b>Jumlah Aset Kontijensi</b>	<u>8.216.575.792</u>	<u>6.489.294.789</u>

## **b. PENJAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK**

Untuk melaksanakan program penjaminan pemerintah atas kewajiban bank dibentuklah Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah (UP3), yaitu sebuah institusi baru menggantikan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Dasar hukum pembentukan UP3 tersebut antara lain adalah:

- a. Keputusan Presiden No. 15/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional,
- b. Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.06/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 179/KMK.017/2000 tentang Syarat, TataCara, dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum,
- c. Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.06/2004 tentang Pembentukan Kedudukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Umum.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan program penjaminan tersebut, pemerintah membentuk lembaga independen yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan program dimaksud yaitu dengan disahkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tanggal 22 September 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) pemerintah menetapkan besarnya premi penjaminan sebesar 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode yang dibayarkan 2 (dua) kali setahun.

## **c. PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME**

Dasar hukum Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme :

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Syariah
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/14/DKBU 2011 perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/37/DPNP 2004 perihal Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Program APU dan PPT merupakan program yang wajib diterapkan oleh BPR dalam melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa BPR/BPRS (baik Nasabah maupun Walk In Customer). Program tersebut antara lain mencakup hal-hal yang diwajibkan dalam Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF), yang dikenal dengan Rekomendasi 40 + 9 FATF sebagai upaya untuk melindungi BPR dan BPRS agar tidak dijadikan sebagai sarana atau sasaran kejahatan baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.

## **PENGUNGKAPAN LAINNYA**

### **c. PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME**

Program APU dan PPT merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian BPR/BPRS dan paling kurang mencakup: a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; b. kebijakan dan prosedur; c. pengendalian intern; dan d. sumber daya manusia dan pelatihan.

Dalam menerapkan Program APU dan PPT, BPR dan BPRS wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup : a. pelaksanaan CDD, yang terdiri dari: 1) permintaan informasi dan dokumen; 2) verifikasi dokumen; dan 3) pengkinian dan pemantauan. b. penatausahaan dokumen; c. pemindahan dana; d. penutupan hubungan dan penolakan transaksi; e. ketentuan mengenai Beneficial Owner; f. ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan PEP; g. pelaksanaan CDD yang lebih sederhana; dan h. pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga.

#### 4.5.4. Komitmen dan Kontinjensi

##### Laporan Komitmen Kontinjensi

(Dalam ribuan rupiah)

POS	Des 2019	Des 2018
TAGIHAN KOMITMEN	0	0
a. Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik	0	0
b. Tagihan Komitmen lainnya	0	0
KEWAJIBAN KOMITMEN	0	0
a. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	0	0
b. Penerusan kredit	0	0
c. Kewajiban Komitmen Lainnya	0	0
TAGIHAN KONTINJENSI	8.216.576	6.710.509
a. Pendapatan bunga dalam Penyelesaian	3.334.863	2.247.510
b. Aset produktif yang dihapus buku	4.881.713	4.462.999
c. Agunan dalam proses penyelesaian kredit	0	0
d. Tagihan Kontinjensi Lainnya	0	0
KEWAJIBAN KONTINJENSI	0	0
REKENING ADMINISTRATIF LAINNYA	0	0

#### 4.6. Surat Komentar (Management Letter)

##### 1. Kekurangan Perhitungan Taksiran Pajak Badan Tahun 2019.

###### Kondisi

Terdapat perhitungan taksiran pajak badan tahun 2019 yang harus memperhitungkan koreksi pajak positif dan negatifnya dan selisih lebih bayar atas uang muka pajak PPh Pasal 25 sesuai dengan UU Pajak No. 36 Tahun 2008.

###### Kriteria

- Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak).
- Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan perlakuan/pengakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak sesuai dengan Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 9 UU no. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

###### Sebab

Bank belum melakukan koreksi fiskal positif dan negatif terhadap pengurangan penghasilan kena pajak dan sebagai dasar perhitungan pajak perusahaan.

## Akibat

- Bank terlalu kecil dalam menghitung taksiran pajak badan tahun 2019 :

Laba Sebelum Pajak	4.922.075.368	7.912.953.754
Tambah (kurang) beda tetap :		
- Cadangan Pesangon	-	-
- Beban Sumbangan	55.997.436	42.728.000
- Beban Non Operasional Lainnya	45.109.012	96.946.572
Jumlah	101.106.448	139.674.572
<b>Laba (rugi) Fiskal</b>	<b>5.023.181.816</b>	<b>8.052.628.328</b>

Tambah (kurang) beda temporer		
- Biaya Penyusutan	-	-
Penghasilan Kena Pajak	5.023.181.816	8.052.826.328

## Perhitungan Volume Pendapatan

	<b>37.537.802.731</b>	<b>37.507.525.061</b>
Pajak Penghasilan Tarif Fasilitas	-	128.816.204
Pajak Penghasilan Tarif Tanpa Fasilitas	1.255.795.454	1.755.524.674
Jumlah Taksiran Pajak Penghasilan	1.255.795.454	1.884.340.878
Pajak dibayar dimuka - PPh Pasal 25 yang telah - disetor	-	-
- Kompensasi kelebihan bayar PPh Badan	-	-
- Kekurangan (Kelebihan) PPh Pasal 29	1.255.795.454	1.884.340.878
Perhitungan Taksiran Pajak Menurut Perumda - BPR	1.240.309.917	1.838.659.625
- Perbedaan Perhitungan Taksiran Pajak	(15.485.537)	(45.681.253)

## Rekomendasi

Manajemen Perumda BPR Majalengka agar menghitung kembali taksiran pajak badan dengan memperhitungkan pula koreksi negatif dan positif.

## 2. PYAD Penempatan Pada Bank Lain.

### Kondisi

BPR belum memperhitungkan PYAD yang bersumber dari penempatan pada bank lain, sebagai berikut :

No. Rekening	Nama Bank	Jangka Waktu			Suku Bng	Jumlah (Ribuan Rupiah)	JK Waktu (hari) 31 Des	Jumlah (Ribuan Rupiah)
		Mulai	Jkw	Jt Tempo				
13000061	BPR Wibawa Mukti Jabar	24/05/2019	3	24/08/2019	10	350.000.000	7	671.233
13000044	PT. Bank Intan Jabar	26/07/2019	3	26/10/2019	8,75	1.000.000.000	5	1.198.630
13000059	PT BPR Danatama Artha Mandiri	14/03/2019	6	14/09/2019	9	500.000.000	17	2.095.890
13000025	Bank Jabar Cab. Majalengka	16/07/2019	1	16/08/2019	5,75	123.000.000	15	290.651
13000011	Bank Jabar Banten	28/07/2019	1	28/08/2019	5,75	174.000.000	3	82.233
13000062	Deposito Bank BTN	19/12/2019	1	19/01/2020	6	1.000.000.000	12	1.972.603
13000058	BANK BUKOPIN	28/07/2019	1	28/08/2019	6,25	1.000.000.000	3	513.699
	<b>Jumlah</b>					<b>4.147.000.000</b>		<b>6.824.938</b>

**Kriteria**

Pedoman akuntansi BPR tentang Pangakuan dan Pengukuran Serta Pengungkapan Pendapatan Yang Akan Diterima (PYAD).

**Sebab**

Sistem komputerisasi yang ada belum mengakomodir atas perhitungan pendapatan bunga yang akan diterima.

**Akibat**

BPR belum memperhitungkan pendapatan yang akan diterima pada tahun 2019 yang berasal dari bunga penempatan deposito di bank.

**Rekomendasi**

BPR harus mengakui pendapatan bunga atas penempatan pada bank lain sebesar Rp 6.824.938,-

**3. Kekosongan Jabatan Anggota Dewan Pengawas Sejak 3 Agustus 2018.****Kondisi**

Anggota Dewan Pengawas Perumda BPR Majalengka yang berakhir tanggal 3 Agustus 2018 masih belum terisi sampai dengan pemeriksaan audit berakhir.

**Kriteria**

- Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007
- POJK Nomor 20/POJK.03/2014 tentang BPR dan
- Struktur Organisasi Perumda BPR Majalengka.

**Sebab**

- Posisi jabatan Anggota Dewan Pengawas sudah berakhir pada tanggal 3 Agustus 2018

**Akibat**

- Pengendalian dan pengawasan pada Perumda BPR Majalengka kurang efektif dan terorganisir dalam pengawasan dikarenakan dirangkap oleh Ketua Dewan Pengawas.
- Adanya pelanggaran terhadap POJK Nomor 20/POJK.03/2014 tentang BPR yang seharusnya masa kekosongan maksimal 120 hari kerja.

**Rekomendasi**

Manajemen Perumda BPR Majalengka agar segera mengkoordinasikan kepada pemilik untuk segera mengisi kekosongan jabatan tersebut karena memiliki peran penting dalam pengawasan Perumda BPR Majalengka.

**4. Penyalahgunaan Keuangan Yang Belum Dilakukan Penggantian di Kantor Cabang Jatitujuh.****Kondisi**

Pada saat pemeriksaan Neraca, tahun buku 2018 sampai dengan tahun buku 2019 penyalahgunaan keuangan di kantor cabang Jatitujuh pada asset lain-lain masih terdapat nilai sebesar Rp. 326.117.726 , yang merupakan pos pemindah bukuan rekening rupa-rupa aktiva ke rekening tabungan. Berdasarkan informasi, belum adanya penyelesaian dan Bank baru memegang bukti kepemilikan tanah (SHM) atas nama orang tuanya.

**Kriteria;**

1. Pedoman Operasional Tabungan Perumda BPR Majalengka.
2. UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 PASAL 49 (1) Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank, Anggota Dewan Komisaris, Direksi/pegawai bank yg dgn sengaja:
  - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu;
  - b. menghilangkan atau tdk memasukkan atau menyebabkan tdk dilakukannya pencatatan;
  - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan, atau dgn sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan/ merusak catatan pembukuan tersebut, dlm pembukuan, laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, rekening suatu bank; diancam dgn pidana penjara min 5 th & max 15 th serta denda min Rp10 M & Max Rp. 200 M.

**Sebab**

Karyawan yang bersangkutan dengan penyalahgunaan keuangan sudah di berhentikan tanpa penyelesaian terlebih dahulu.

**Akibat**

Bank akan mengalami kerugian jika tidak segera dilakukan penyelesaian.

**Rekomendasi**

Manajemen Perumda BPR Majalengka agar segera melakukan langkah-langkah penyelesaian terhadap penyalahgunaan keuangan tersebut dan melakukan eksekusi terhadap sertifikat tanah supaya di tahun buku berikutnya sudah terselesaikan dan tidak menjadi kerugian Bank.

**5. Kurangnya Pengawasan Terhadap Kantor Cabang Sukahaji Atas Pemberian Fasilitas Kredit.****Kondisi**

Pada saat pemeriksaan ditemukan kredit bermasalah dengan jumlah pinjaman dan kesalahan yang sama dalam jangka waktu yang singkat, dan beberapa sample dokumen kredit yang diperiksa terdiri dari:

- a. Debitur dengan nomor rekening 16-K01.001205 atas nama HARIRI baki debit Rp 157.133.000,- Kolektibilitas Macet Debitur memiliki pinjaman ke beberapa Bank Danamon baki debit Rp 30.883.769 Kolek Lancar, PT Permodalan Nasional Madani baki debit Rp 54.599.250 Kolek Lancar, PT. BPR Mitra Harmoni Indramayu Kc Kadipaten baki debit Rp 21.874.999 kolek Lancar, BRI Syari'ah baki debit Rp 98.980.916 kolek Lancar. NPWP Debitur tidak ditemukan pada berkas kredit. Contoh Tanda tangan Debitur dan Avalis tidak terisi. terdapat catatan dari Direktur Operasional untuk Realisasi bertahap, memprioritaskan untuk pelunasan ke bank lain, Jika setelah lunas bukti pelunasan diserahkan ke BPR, setelah itu lakukan pencairan. Namun, ternyata dari beberapa pinjaman pada bank lain yang diserahkan, debitur hanya satu bank saja yang sudah dilunasi dan memberikan bukti pelunasan.
- b. Debitur dengan nomor rekening 16-K01.001809 atas nama M TARDI NURJAMALUDIN baki debit Rp 60.000.000,- Kolektibilitas Macet dalam dokumen kredit tidak ditemukan formulir Analisa kredit, SiLK OJK tertanggal update 07 Oktober 2018 Debitur memiliki kredit pada Bank lain: Bank Sinarmas Kc. Bandung-

- a RIVAI. Baki Debet Rp 20.395.173 dengan kolek Lancar, Bank Danamon Kc Bandung- Merdeka Rp 5.917.197 Kolek Lancar, Bank Mandiri Kc Cirebon- Y. Sudarso Baki Debet Rp 79.422.611 tertanggal update 11 Oktober 2018 dengan kolek Lancar. SLIK OJK tertanggal update 12 Oktober 2018 Avalis terdapat pinjaman ke Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syaria'ah Kc Bandung Rp 17.566.275 kolek Lancar. Identitas debitur dan Avalis tidak ditemukan dalam berkas kredit terbaru.
- c. Debitur dengan nomor rekening 16-K01.001593 atas nama AMIRULLAH baki debet Rp 35.000.000,- Kolektibilitas Macet tidak ditemukan Surat Ijin Usaha (SKU atau SIUP) dari Debitur, tidak terdapat foto Usaha Debitur, Laporan keuangan nasabah tidak ditemukan dalam berkas kredit. SPK tidak ditemukan dalam berkas kredit..
- d. Debitur dengan nomor rekening 16-K01.001913 atas nama SISWANTO baki debet Rp 35.000.000,- Kolektibilitas Macet dalam dokumen kredit pada contoh tanda tangan selaku Debitur dan Avalis tidak terisi. SLIK OJK tertanggal 10 Februari 2019 Debitur memiliki Pinjaman ke Bank lain: BRI Kc Majalengka dengan Baki Debet Rp 57.985.609,- dengan kolek Lancar. NPWP Tidak ditemukan dalam berkas kredit. Surat pernyataan dan copyan yang menyatakan debitur adalah dari kepolisian tidak ada. Foto terbaru tidak ada baik Debitur maupun Avalis, foto Agunan dan tempat tinggal Debitur tidak ada. Keterangan ijin usaha,SKU,SIUP,TDP tidak ditemukan dalam berkas kredit.
- e. Debitur dengan nomor rekening 16-K01.001914 atas nama TITI SRI JUNENGSIH baki debet Rp 35.000.000,- Kolektibilitas Macet dalam dokumen kredit Tidak terdapat foto Usaha dan Foto Agunan, SLIK OJK tidak ditemukan pada berkas kredit, Berita pemeriksaan atau laporan survey Debitur ataupun Agunan tidak ada. Contoh tanda tangan Debitur ataupun Avalis tidak ada, Kepemilikan Usaha tercatat a/n Avalis bukan Debitur, setiap berkas Selaku Avalis tidak memberikan tandatangan.
- f. Debitur dengan nomor rekening 16-K01.001902 atas nama MAMAN USMAN baki debet Rp 35.000.000,- Kolektibilitas D dalam dokumen kredit terdapat perbedaan Agunan antara pihak BPR dengan Bukti Fisik Agunan. Surat Keterangan mengenai Surat Keterangan Tidak Dalam Proses Sertifikat dan Surat Keterangan Riwayat Tanah dan Bebas Sengketa dari Pemerintah Kabupaten Majalengka Kecamatan Sukahaji dari Kantor Kepala Desa Jayi tidak disertakan tanda tangan Pemilik Jaminan dan Kepala Desa Jayi serta tidak terdapat cap resmi. Pada SP3K, Laporan Hasil Penilaian Tanah dan Bangunan,Laporan Hasil Penilaian Kendaraan Pimpinan Cabang saat itu tidak memberikan otorisasi.pada surat pernyataan Kesediaan Debitur tidak memberikan tandatangan dan Materai 6.000. Terdapat Contoh tanda tangan yang tidak sesuai dengan tanda tangan yang tertera didalam KTP Debitur dan Avalis. Tidak ditemukan bukti survey lapangan untuk melihat agunan,rumah, dan tempat usaha Debitur.
- g. Debitur dengan nomor rekening 16-K01.001910 atas nama BAHRUDIN baki debet Rp 35.000.000,- Kolektibilitas Macet dalam dokumen kredit Tidak ditemukan Laporan Survey Lapangan. Sampai akhir pemeriksaan tidak ditemukan Agunan, Surat Ijin Usaha tidak ada, Foto Agunan,rumah,dan Usaha Debitur tidak ada. Tidak terdapat BI Checking/ SLIK OJK didalam berkas kredit..
- h. Debitur dengan nomor rekening 16-K01.001911 atas nama MOHAMAD SUDRAJAT baki debet Rp 31.500.000,- Kolektibilitas D dalam dokumen kredit Pada SLIK OJK debitur memiliki pinjaman pada Bank Lain seperti Bank Mandiri Kc Cirebon- Y Sudarso Baki Debet Rp 5.911.913 Kolek Diragukan, BJB sebesar Rp 239.538.265 Kolek Lancar, tertanggal Update 8 Februari 2019 PD BPR Majalengka Kc Sukahaji dengan Baki debet Rp 35.000.000 kolek Lancar. Tidak ada Surat Izin Usaha. Foto

Q 8

Agunan dan Tempat tinggal Debitur Tidak ada. NPWP Tidak ditemukan dalam berkas kredit.

- i. Debitur dengan nomor rekening 16-K01.001947 atas nama DEDE ASTUTI baki debit Rp 35.000.000,- Kolektibilitas Kurang Lancar dalam dokumen kredit SPPT tidak terbaru terdapat SPPT per tahun 4 Januari 2016. Terdapat SKU yang tidak terisi "...pada Usaha di bidang". Agunan dengan A/n Ita Casmita dan Rohmah tidak disertai Surat Pemberian Kuasa.
- j. Debitur dengan nomor rekening 16-K03.001789 atas nama WATI PURWATI baki debit Rp 26.812.500,- Kolektibilitas DPK dalam dokumen kredit Data Nasabah tidak diperbaharui terlihat dalam berkas kredit data administrasi per 2017.
- k. Debitur dengan nomor rekening 16- K01.001871 atas nama TATA RUKINTA baki debit Rp 26.612.500,- Kolektibilitas DPK dalam dokumen kredit SKU tidak ditemukan didalam berkas kredit.
- l. Debitur dengan nomor rekening 16-K01.001879 atas nama OMON baki debit Rp 23.865.500,- Kolektibilitas DPK dalam dokumen kredit Di dalam Surat Keterangan Agunan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Majalengka Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka No: 593/75/DS/2019 Pemilik Jaminan tidak menyertakan tandatangannya. Tidak terdapat Laporan survey berupa foto kunjungan kepada Debitur, Poto Rumah, Tempat Usaha, dan juga agunan..
- m. Debitur dengan nomor rekening 16-K01.001926 atas nama JUNAEDI baki debit Rp 19.998.000,- Kolektibilitas DPK dalam dokumen kredit Laporan untuk kunjungan kepada Debitur tidak ditemukan foto agunan, foto usaha, dan foto rumah debitur.
- n. Debitur dengan nomor rekening 16-K03.001959 atas nama JUJU JUARIAH baki debit Rp 73.798.000,- Kolektibilitas L dalam dokumen kredit Hj. Nanih Nurhasanah belum menandatangani sebagai Kepala Bagian Operasional pada Surat Disposisi Permohonan Pencairan Kredit. Pada Aplikasi Kredit Online Bank BPR Majalengka selaku Analisa Kredit Pusat A/n Bambang Susanto belum menandatangani berkas tersebut. pada SLIK OJK Selaku Avalispun memiliki pinjaman ke Bank lain: Mandiri Syari'ah Kc Cirebon baki debit Rp 12.232.656,- kolek Macet, NPWP debitur tidak ditemukan didalam berkas kredit.
- o. Debitur dengan nomor rekening 16-K03.001943 atas nama LELI MAULIDAH HILAL baki debit Rp 63.750.000,- Kolektibilitas Lancar dalam dokumen kredit Surat SP3K tidak ditandatangani oleh Pimpinan Kantor Cabang Sukahaji Hj. Feti Fatimah. SPK Sertifikasi tidak ditandatangani oleh Pimpinan Kantor Cabang Sukahaji Hj. Feti Fatimah.
- p. Debitur dengan nomor rekening 16-K01.001456 atas nama DEDE YUSUP baki debit Rp.20.416.500,- Kolektibilitas D, tanggal realisasi 30 Agustus 2018 dan tanggal jatuh tempo 30 Agustus 2021, dalam dokumen kredit berkas permohonan tidak lengkap, Nota penerusan ajuan permohonan kredit tidak ditanda tangan Kabag Pemasaran, Laporan hasil penilaian tanah dan bangunan tidak menerangkan kondisi bangunan seperti tercantum dalam SPK, Surat keputusan kredit disetujui sebesar Rp. 21.000.000, tidak dibubuhkan tanggal, nama debitur, penanggung, tujuan penggunaan, sektor ekonomi, cara pengembalian, besarnya angsuran, jangka waktu, bunga pertahun, agunan, Dalam berita acara survey dan analisa kredit serta analisa kredit sdr. AGUS MAY MANIK MAYA tidak menandatangani, SID tidak ada diduga tidak dibuat, Bank tidak konsisten pada surat pernyataan kesediaan pada lampiran di SPK ayat 1 sampai 4. Berkas kredit tidak sesuai dengan SOP dan ketentuan sehingga berkesan asal-asalan dibuat dan kredit merupakan kredit yang masih relatif baru direalisasikan akan tetapi kolektibilitas D serta selama kurun waktu 9 bulan baki debit kredit hanya berkurang sebesar Rp. 580.500 atas dasar hal ini kredit tersebut disinyalir

- merupakan kredit pembaruan dari kredit yang sebelumnya bermasalah dengan tujuan memperbaiki NPL sementara. Berdasarkan pemeriksaan serta kemiripan berkas serta alamat debitur, kredit tersebut merupakan kredit pembaruan/pengalihan dari kredit atas nama UJANG SOBANA, SPK No. 16-K01.000955 pelunasan tanggal 31/08/2018 dengan jaminan yang sama dengan jaminan kredit a/n DEDE YUSUP yaitu berupa sebidang surat tanah berupa AJB No: 104/2013 a/n SATINI. Hal yang hampir serupa terjadi pula pada atas nama;
- ROSAD, SPK No. 16.K01.001384 alamat Garawastu merupakan pembaruan dari kredit a/n ROSYID MAULANA, SPK No. 16.K01.000990 alamat Cikaracak.
  - YOYOH RODIAH, SPK No. 16.K01.001452 alamat Jayi merupakan pembaruan dari kredit a/n KECON NURHASAN, SPK No. 16.K01.000752 alamat Cikaracak.
  - EGI GINANJAR, SPK No. 16.K01.001032 alamat Sukasari merupakan pembaruan dari kredit a/n RINA NOVITA, SPK No. 16.K08.000001 alamat Sukasari.
  - TITIN, SPK No. 16.K01.001702 alamat Cikaracak merupakan pembaruan dari kredit a/n MUSTARI, SPK No. 16.K01.000761 yang merupakan suami debitur.
  - INAH TARSINAH, SPK No. 16.K01.001384 alamat Kutamunggu merupakan pembaruan dari kredit a/n HARJA, SPK No. 16-K01.000990 yang merupakan suami debitur.
  - YATI NURHAYATI, SPK No. 16-K01.001506 alamat Rajagaluh Lor merupakan pembaruan dari kredit a/n SRI MULYATI, SPK No. 16-K01.000760 alamat Jamblang.
  - CICIH, SPK No. 16-K01.001507 alamat Tonjong merupakan pembaruan dari kredit a/n DADANG, SPK No. 16-K01.000863 yang merupakan suami debitur.
  - TARMIDI, SPK No. 16-K01.001506 alamat Palasari merupakan pembaruan dari kredit a/n ROHMAN, SPK No. 16-K01.000831 alamat Palasari.
- q. Debitur dengan nomor rekening 16-K01.001249 atas nama YUYUN YUNENSIH baki debit Rp.4.897.400,- Kolektibilitas KL, tanggal realisasi 16 Maret 2018 dan tanggal jatuh tempo 16 Maret 2021, dalam dokumen kredit berkas Permohonan tidak lengkap, tanda tangan marketing dan supervisor tidak ada tertanggal 15/03/2018, Surat kuasa pinjam agunan tidak ada tanggalnya hanya tertera tahun 2017, Tertera pengrajin bata merah tertanggal 30/01/2017, tidak sesuai dengan peruntukan kredit SPK No. 16-K01.0001249, Surat keputusan kredit terkesan ragu-ragu dengan tidak adanya isi tujuan penggunaan, sektor ekonomi, dan cara pengembalian tertanggal 16/03/2018, Dalam analisa sangat jelas disebutkan untuk tambahan modal bata merah, dan SID tidak ada.
- r. Debitur dengan nomor rekening 16-K01.001504 atas nama APANG baki debit Rp.19.848.000,- Kolektibilitas M, tanggal realisasi 05 Februari 2018 dan tanggal jatuh tempo 05 Agustus 2021, Dalam dokumen kredit tidak ditemukan Surat Perjanjian kredit, Berdasarkan keterangan petugas analisa, kredit digunakan untuk membeli kendaraan yang pada saat ini jadi jaminan atas pinjaman. Debitur akan memulai usaha jasa angkutan dengan modal kendaraan tersebut, akan tetapi dalam nota analisa dikatakan bahwa debitur telah melakukan usahanya selama lebih kurang 25 tahun dalam bisnis jasa angkutan dan jual beli batu pasir dan batu belah, akan tetapi pada saat ini debitur tidak lagi dapat menggansur pinjaman dikarenakan kendaraan Truk yang menjadi sarana utama dalam pembayaran pinjaman tersebut ditahan pihak Kepolisian karena digunakan dalam praktik ilegal loging. Atas dasar hal tersebut informasi dan perhitungan yang terdapat dalam Nota Analisa diragukan kebenarannya, Dalam hal ini pihak bank dalam kegiatannya memberikan kredit mengabaikan prinsip kehati-hatian perihal menilai serta menggali informasi kemampuan calon debitur.

- s. Debitur dengan nomor rekening 16-K01.001810 atas nama WAWAN DARWANTO baki debit Rp. 100.000.000,- Kolektibilitas KL, tanggal realisasi 25 Januari 2019 dan tanggal jatuh tempo 25 Januari 2020, Dalam dokumen kredit komite kredit tidak lengkap, hanya ada 2 orang di lembaran komite, tanpa divisi oprasional dan pimpinan cabang serta kabag pemasaran, Bukti penerimaan pinjaman dan kwitansi provisi tidak di tanda tangan pinca. Hendaknya bagian BO kredit melakukan pemberkasan Spk dengan baik dan tertib sebelum diarsipkan.
- t. Debitur dengan nomor rekening 16-K01.001364 atas nama YAYA SUPRIA baki debit Rp.17.216.000,- Kolektibilitas M, tanggal realisasi 08 Juni 2018 dan tanggal jatuh tempo 08 Juni 2021, dari riwayat kredit sebelumnya, spk no.16-ko1.000779 Rp. 20.000.000, kol D. tapi di realisasi yg kedua masih sama. Ada indikasi untuk perbaikan kolek kredit dibarukan tanpa melalui prosedur yang baik.
- u. Debitur dengan nomor rekening 16-K01.001217 atas nama NUNUNG NURJANAH baki debit Rp. 12.732.000,- Kolektibilitas M, tanggal realisasi 23 Februari 2018 dan tanggal jatuh tempo 23 Februari 2020, dalam dokumen kredit tidak ada tanda tangan pinca dalam surat keputusan. Penjamin suaminya Rudianto punya kredit kolektibilitas KL di bank lain. Seharusnya menjadi bahan pertimbangan untuk pemberian kredit tersebut.
- v. Debitur dengan nomor rekening 16-K01.001372 atas nama NARTO SWITO baki debit Rp.9.332.000,- Kolektibilitas KL, tanggal realisasi 29 Juni 2018 dan tanggal jatuh tempo 29 Juni 2021, Dalam dokumen kredit tidak ada Slik, Realisasi spk awal no. 16-ko1.001055 plapond Rp. 15.000.000, riwayat kredit ada tunggakan tiga bulan, namun di akhir kontrak seolah2 untuk perbaikan kolek dibuatkan spk baru dengan plapond Rp.14.000.000.
- w. Debitur dengan nomor rekening 16-K01.001574 atas nama DIDIN JAENUDIN baki debit Rp. 7.783.000,- Kolektibilitas M, tanggal realisasi 29 Oktober 2018 dan tanggal jatuh tempo 29 Oktober 2019, Dalam dokumen kredit belum ditandatangani kepala bagian pemasaran dan bo kredit. Data slik ada kolek 5 (macet) di bank umum. Seharusnya untuk menjadi bahan penolakan kepada calon debitur.
- x. Debitur dengan nomor rekening 16-K01.001358 atas nama WAWAN HERWANTO baki debit Rp.27.150.000,- Kolektibilitas M, tanggal realisasi 07 Juni 2018 dan tanggal jatuh tempo 07 Juni 2020, Dalam dokumen kredit pada komite dan surat keputusan SP3K ,serta disposisi pencairan kredit. Ada perbedaan nilai plapond yaitu Rp.35.000.000. Dilihat dari riwayat kredit spk sebelumnya no. 16-k01.000961 plapond Rp.15.000.000, pada tgl 07 juni 2018 diindikasikan untuk memperbaiki kolek dibuatkan spk baru dengan kenaikan plapond 100%, padahal riwayatnya sudah tidak layak.
- y. Debitur dengan nomor rekening 16-K01.001317 atas nama AI NANDAR HIDAYAT baki debit Rp.65.450.000,- Kolektibilitas D, tanggal realisasi 27 April 2018 dan tanggal jatuh tempo 27 April 2021, Dalam dokumen Kredit pada pengajuan kredit peruntukannya untuk pembelian rumah tetapi dianalisa dan persetujuannya untuk modal usaha, sehingga debitur tersebut tidak jelas Penganggunannya. Apakah untuk modal usaha atau Konsumtif.

### Kriteria

- Dalam kebijakan Manajemen umum Kredit terdapat prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, sebagai berikut:

Guna menjaga kualitas kredit agar tetap sehat, Bank wajib melaksanakan kebijakan kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian, yang meliputi kebijakan pokok dalam perkreditan, meliputi:

- Standar dan kriteria untuk melakukan seleksi dan penilaian kelayakan pinjaman dan kelompok pinjaman
- Standar dan kriteria untuk penetapan batas/limit pemberi kredit.
- Sistem pemantauan terhadap pemberian kredit
- Sistem tatacara penilaian kualitas kredit.

Analisa harus menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan calon debitur, mulai dari pendekatan, pengumpulan informasi, karakter debitur, kondisi keuangan (usaha), jaminan, prospek usaha yang dijalankan serta kemampuan melakukan pembayaran.

- POJK No. 33 Tahun 2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat.

**Sebab**

Kurangnya pengawasan yang berjenjang dari setiap bagian baik dicabang maupun kantor pusat.

**Akibat**

Beban penyisihan kerugian kredit semakin besar dibandingkan dengan tahun lalu.

**Rekomendasi**

Manajemen Perumda BPR Majalengka agar segera melakukan langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah secara intensif dan berkesinambungan serta meningkatkan pengawasan terhadap pemberian fasilitas kredit yang diberikan di seluruh Kantor Pusat dan Cabang.

**6. Pemeriksaan Kredit Kredit untuk Badan Usaha Yang Fasilitas lebih dari Satu SPK**

Terdapat debitur yang memiliki 2 rekening pinjaman yang belum dilengkapi dengan pedoman operasional dan kebijakan Direksi.

**Debitur a.n. CV VISTA INTI PERSADA QQ FAJAR RIDWANULLAH**

- Sampai dengan pemeriksaan terhadap kredit, terdapat debitur dengan nomor rekening 02-K01.009568 atas nama CV WIBISANA PUTRA QQ ANI RUHAENI tanggal realisasi 03 Juli 2019 jumlah pinjaman Rp495.000.000 dengan baki debit Rp491.000.000 kolektibilitas KL. Mengalami perpanjangan waktu kredit menjadi tiga kali angsuran dan memiliki tunggakan pokok Rp491.000.000 tunggakan bunga Rp.4.424.999
- Sampai dengan pemeriksaan terhadap kredit, terdapat debitur dengan nomor rekening 01-K01.007707 atas nama CV VISTA INTI PERSADA QQ FAJAR RIDWANULLAH tanggal realisasi 20 April 2018 dengan Plafond Rp 350.000.000,- dan baki debit Rp 253.000.000,- kolektibilitas M. Dalam dokumen kredit foto Agunan Mobil Tidak terlampir dalam Berkas Kredit. Terdapat perjanjian One Obligore.

**Kriteria**

Dalam kebijakan Manajemen umum Kredit terdapat prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, sebagai berikut:

Guna menjaga kualitas kredit agar tetap sehat, Bank wajib melaksanakan kebijakan kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian, yang meliputi kebijakan pokok dalam perkreditan, meliputi:

- Standar dan kriteria untuk melakukan seleksi dan penilaian kelayakan pinjaman dan kelompok pinjaman
- Standar dan kriteria untuk penetapan batas/limit pemberi kredit.
- Sistem pemantauan terhadap pemberian kredit

- Sistem tatacara penilaian kualitas kredit.

Analisa harus menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan calon debitur, mulai dari pendekatan, pengumpulan informasi, karakter debitur, kondisi keuangan (usaha), jaminan, prospek usaha yang dijalankan serta kemampuan melakukan pembayaran.

**Sebab**

Proses analisa kredit belum menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan calon debitur yang menyangkut, karakter debitur, kondisi keuangan (usaha) dan prospek usaha yang dijalankan serta kemampuan melakukan pembayaran.

**Akibat**

Sesuai dengan kondisi diatas maka lembaga masih harus melengkapi kelengkapan administrasi.

**Saran/Rekomendasi**

Berdasarkan kriteria diatas mejelaskan tujuan dan fungsi kelengkapan administrasi pembiayaan dan analisa Kredit terhadap calon nasabah, maka dari itu lembaga lebih memperhatikan lagi terhadap kelengkapan dokumen dan analisa Kredit.

**7. Prinsip Kehatian-hatian Dalam Pemberian Kredit**

**Kondisi**

Ditemukan dari hasil pemeriksaan sample dokumen kredit ditemukan beberapa debitur yang dokumen kreditnya belum sesuai dengan yang dibutuhkan sebagai bahan dalam melaksanakan analisa kredit, diantaranya :

- Analisa kredit belum sesuai dengan kondisi dan kemampuan debitur dalam menyelesaikan kewajibannya.
- Terdapat debitur yang memiliki 2 rekening pinjaman yang belum dilengkapi dengan pedoman operasional dan kebijakan Direksi.
- Dokumentasi berupa photo jaminan, lokasi peminjam dan aktivitas usaha belum ada dalam dokumen administrasi kredit.
- Nilai biaya hidup dan kebutuhan hidup nasabah rata-rata dibawah kewajaran, contohnya biaya hidup nasabah per bulan hanya Rp. 600.000,- dan Rp. 300.000,-
- BPR masih dapat memberikan Fasilitas terhadap Debitur yang memiliki kolektibilitas Macet di bank lain.
- Dalam analisa tidak dimasukan jumlah pinjaman kepada Pihak Lain (Bank) dari pencetakan SID Debitur yang berpengaruh kepada cicilan dan kemampuan debitur dalam menyelesaikan kewajibannya.

**1) Pemeriksaan Kredit KPO**

1. Sampai dengan pemeriksaan terhadap kredit, terdapat debitur dengan nomor rekening 01-K01.007675 atas nama Oding Rosadi tanggal realisasi 2 Maret 2018 dengan Plafon Rp 20.000.000,- dengan baki debet Rp 6.400.000,- kolektibilitas D. Dalam dokumen kredit tidak terdapat Surat Perjanjian Kredit, pada Lembar SiLK OJK tertera bahwa Debitur memiliki pinjaman pada Bank Umum dengan Kolektibilitas "Dalam Pengawasan Khusus".
2. Sampai dengan pemeriksaan terhadap kredit, terdapat debitur dengan nomor rekening 01-K01.007665 atas nama Suharna tanggal realisasi 20 Februari 2018 dengan Plafon Rp 10.000.000,- dengan baki debet Rp 3.012.000,- kolektibilitas D. Dalam dokumen kredit Pada SLIK OJK Nasabah memiliki pinjaman ke Bank BRI KC Majalengka dengan Baki Debet Rp 29.167.000,-. Tidak terdapat Surat Kuasa atas nama Resan Karayunan kepada Nasabah untuk diagunkan.

3. Sampai dengan pemeriksaan terhadap kredit, terdapat debitur dengan nomor rekening 01-K01.007781 atas nama Juhari dengan Plafond Rp 60.000.000,- dengan baki debit Rp 36.019.500,- kolektibilitas DPK. Dalam berkas kredit tidak ditemukan SPK ataupun Keterangan dari Notaris bahwa SPK dan Agunan sedang dalam proses.
4. Sampai dengan pemeriksaan terhadap kredit, terdapat debitur dengan nomor rekening 01-K01.007949 atas nama HERI KUSWANTO tanggal realisasi 14 Januari 2019 dengan Plafond Rp 30.000.000,- dan baki debit Rp 22.498.500,- kolektibilitas DPK. Dalam berkas kredit terdapat perbedaan Agunan yang belum ter-Update dari Motor Kawasaki menjadi Mobil Mitsubishi Colt T120 SS. Tidak terlampirnya Surat kuasa agunan dari pemilik yaitu Supingi kepada Heri Kurwanto.

## **2) Pemeriksaan Kredit KC Rajagaluh**

1. Sampai dengan pemeriksaan terhadap kredit, terdapat debitur dengan nomor rekening 02-K01.008488 atas nama JAJAN FAUZAN tanggal realisasi 02 Maret 2017 tanggal jatuh tempo 02 Maret 2019 jumlah pinjaman Rp 20.000.000 dengan baki debit Rp9.815.000 kolektibilitas M. Dalam dokumen kredit tidak terdapat Agunan berupa BPKB Honda beat Tahun 2014 no polisi E3325XI no mesin JFD2E2885101 no rangka MH1JFD229EK885488 atas nama NUNUNG NURJANA karena telah di ambil dan dijual oleh debitur untuk pelunasan tunggakan.
2. Sampai dengan pemeriksaan terhadap kredit, terdapat debitur dengan nomor rekening 02-K01.008531 atas nama SATRA SETIAWAN tanggal realisasi 22 Maret 2017 tanggal jatuh tempo 22 Maret 2018 jumlah pinjaman Rp15.000.000 dengan baki debit Rp7.500.000 kolektibilitas M. Dalam dokumen kredit tidak terdapat dokumen BI Cheking/Trade Cheking/Informasi Debitur dari OJK.
3. Sampai dengan pemeriksaan terhadap kredit, terdapat debitur dengan nomor rekening 02-K01.008597 atas nama ABIDIN tanggal realisasi 09 Mei 2017 tanggal jatuh tempo 09 Mei 2019 jumlah pinjaman Rp10.000.000 dengan baki debit Rp7.199.000 kolektibilitas M. Dalam dokumen kredit tidak terdapat dokumen BI Cheking/Trade Cheking/Informasi Debitur dari OJK.
4. Sampai dengan pemeriksaan terhadap kredit, terdapat debitur dengan nomor rekening 02-K03.004119 atas nama DIDIN ROHIDIN tanggal realisasi 07 Oktober 2019 jumlah pinjaman Rp113.000.000 dengan baki debit Rp110.309.000 kolektibilitas L. Ada tunggakan di bank danamon kc bandung merdeka selama 22 hari frekuensi tunggakan 1 bulan tunggakan pokok Rp.2.327.203 tunggakan bunga Rp.899.664 kolektibilitas DPK.

## **3) Pemeriksaan Kredit KC Jatitujuh**

1. Sampai dengan pemeriksaan terhadap kredit, terdapat debitur dengan nomor rekening 03-K01.006479 atas nama Diding Sunardi dengan jumlah pinjaman Rp 200.000.000,- dengan baki debit Rp 179.700.000,- kolektibilitas M. Dalam dokumen kredit terdapat Perjanjian Addendum Kredit Nomor :03/BPR-MJL/JTH/X/2018, TDP yang dimiliki Debitur sudah lewat dari masa berlaku, tercatat tanggal berlaku s/d tanggal 28 Maret 2018. NPWP Atas Nama Diding Sunardi tidak ditemukan pada Berkas Kredit.
2. Sampai dengan pemeriksaan terhadap kredit, terdapat debitur dengan nomor rekening 03-K03.000960 atas nama Nani Sumarni tanggal realisasi 22 Maret 2017 dengan plafon Rp 30.000.000,- dengan baki debit Rp 9.875.000,- kolektibilitas D. Tidak tercatatnya agunan berupa SK Kepegawaian A.n Nani Sumarni pada Nominatif, Tidak terlampirnya foto suami/istri penanggung, tidak terlampir fotocopy SK Kepegawaian.

3. Sampai dengan pemeriksaan terhadap kredit, terdapat debitur dengan nomor rekening 03-K01.006903 atas nama IIS tanggal realisasi 25 Januari 2019 dengan plafon Rp 60.000.000,- dengan baki debit Rp 46.664.000,- kolektibilitas DPK. Dalam dokumen kredit SPPT yang dilampirkan tanggal 3 Januari 2017 sehingga tidak terdapat SPPT terbaru, Tidak ada dalam berkas kredit mengenai Surat Kuasa pemilik agunan memberikan kuasa kepada Debitur.
4. Sampai dengan pemeriksaan terhadap kredit, terdapat debitur dengan nomor rekening 03-K01.006728 atas nama Agus tanggal realisasi 14 Agustus 2018 dengan Plafon 25.000.000,- dengan baki debit Rp 18.328.000,- kolektibilitas KL, One Obligore.
5. Sampai dengan pemeriksaan terhadap kredit, terdapat debitur dengan nomor rekening 03-K03.001129 atas nama Lia Komalia dengan plafon Rp 128.000.000,- dengan baki debit Rp 128.000.000,- kolektibilitas L. Dalam berkas kredit tidak ditemukan identitas Avalis, Pada SLIK OJK ditemukan Debitur memiliki Kolek 5 dengan Baki Debet sebesar Rp 14.831.325,- pada BPR Wahana Sentra Artha.

#### **4) Pemeriksaan Kredit KC Ligung**

Sampai dengan pemeriksaan terhadap kredit, terdapat debitur dengan nomor rekening 04-K06.000256 atas nama Dian Novita tanggal realisasi 16 Januari 2018 tanggal jatuh tempo 16 Januari 2019 jumlah pinjaman Rp 5.000.000 dengan baki debit Rp 4.078.000 kolektibilitas M. Tidak ada agunan, dan debitur sudah pindah domisili.

#### **5) Pemeriksaan Kredit KC Kertajati**

1. Sampai dengan pemeriksaan terhadap kredit, terdapat debitur dengan nomor rekening 05-K03.001086 atas nama Mamat Rahmat dengan jumlah pinjaman Rp 18.000.000,- dengan baki debit Rp 12.650.000,- kolektibilitas M. Dalam dokumen kredit Avalis memiliki pinjaman di bank lain pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Kc Cirebon baki debit Rp 54.422.705,- BTPN KC Bandung Baki Debet Rp 1.138.642,- Kolek Macet, serta tidak terdapat bukti Survey Lapangan.
2. Sampai dengan pemeriksaan terhadap kredit, terdapat debitur dengan nomor rekening 05-K03.001191 atas nama Yuyun Yunengsih tanggal realisasi 18 Desember 2018 dengan jumlah pinjaman Rp 150.000.000,- dengan baki debit Rp 112.500.000,- kolektibilitas L. Dalam dokumen kredit pada Momerandum Komite Kredit tidak terdapat otorisasi dari Divisi Operasional, Pimpinan Cabang, dan Kabag Pemasaran.
3. Sampai dengan pemeriksaan terhadap kredit, terdapat debitur dengan nomor rekening 05-K01.021216 atas nama Leli Laeliah Dengan Jumlah Pinjaman Rp 40.000.000,- dengan baki debit Rp 33.642.500,- kolektibilitas D. Dalam dokumen kredit pada Laporan Hasil Survey Lapangan Analisa Kredit tidak terisi. SPPT yang dilampirkan tidak di update.
4. Sampai dengan pemeriksaan terhadap kredit, terdapat debitur dengan nomor rekening 05-K01.021505 atas nama Titi Nurhayati dengan jumlah pinjaman Rp 150.000.000,- dengan baki debit Rp 143.708.000,- kolektibilitas DPK. Dalam dokumen kredit Debitur memiliki Pinjaman lain ke PT. BFI Finance Indonesia Kc. Majalengka Baki Debet Rp 78.367.503,- Kolek Dalam Pengawasan Khusus. Selaku Avalis juga memiliki Pinjaman ke PD. BPR Majalengka Kc Kertajati dan KPO masing- masing memiliki Baki Debet Rp 88.471.800,- kolek Lancar dan Rp 2.337.500,- dengan kolek Lancar. Pada Memorandum Komite Kredit Tanda

Tangan Pengesahan pejabat Komite Kredit Kepala Bagian Pemasaran tidak memberikan persetujuannya. Berita Acara Survey dan Analisa Kredit Kabag Pemasaran Tidak memberikan tanda tangan.

#### **6) Pemeriksaan Kredit KC Kadipaten**

1. Sampai dengan pemeriksaan terhadap kredit, terdapat debitur dengan nomor rekening 06-K01.006904 atas nama JAMSA tanggal realisasi 13/03/2019 dengan jumlah pinjaman Rp 25.000.000 baki debet Rp 17.300.600 Kolektibilitas DPK dalam dokumen kredit ditemukan SPK tidak di waarmedking.
2. Sampai dengan pemeriksaan terhadap kredit, terdapat debitur dengan nomor rekening 06-K01.006850 atas nama ADE AHMADI tanggal realisasi 04 Jan 2019 dengan jumlah pinjaman Rp 20.000.000 dengan baki debet Rp 13.332.000 Kolektibilitas DPK DPK dalam dokumen kredit ditemukan SPK tidak di waarmedking.
3. Sampai dengan pemeriksaan terhadap kredit, terdapat debitur dengan nomor rekening 06-K03.006724 atas nama BUDI SIGIT PRAYUDI tanggal realisasi 08 Februari 2019 dengan jumlah pinjaman Rp40.000.000 baki debet Rp34.165.500 kolektibilitas DPK. Dalam dokumen kredit ditemukan kolek 5 pada Bank Negara Indonesia Syariah kcr fatmawati baki debet Rp. 3.564.563 macet selama 8 bulan, jumlah hari tunggakan adalah 180 hari dengan tunggakan pokok Rp3.564.563, bunga Rp1.219.955 dihapus bukukan, alasan macet karena itikat tidak baik.
4. Sampai dengan pemeriksaan terhadap kredit, terdapat debitur dengan nomor rekening 06-K03.006786 atas nama NUNUNG CUHAENI tanggal realisasi 04 Oktober 2019 jumlah pinjaman Rp100.000.000 dengan baki debet Rp109.000.000 Kolektibilitas L. dalam dokumen kredit Tidak terlampir BI Cheking/Trade Cheking/Informasi Debitur dari OJK
5. Sampai dengan pemeriksaan terhadap kredit, terdapat debitur dengan nomor rekening 06-K01.006869 atas nama ASIH KURNIASIH tanggal realisasi 05 Maret 2018 dengan jumlah pinjaman Rp35.000.000 baki debet Rp27.465.500 kolektibilitas M. Dalam dokumen kredit ditemukan kolektibilitas Macet pada MayBank kcr Jakarta Mangga Dua baki debet Rp. 189.476.874 dengan tunggakan pokok Rp14.508.658, bunga Rp6.123.732
6. Debitur atas nama IRMA NURMILATI No. 06-K01.007003, Tanggal Realisasi pinjaman 10/09/2019 dengan jatuh tempo 10/12/2019 dengan jumlah pinjaman Kredit sebesar Rp50.000,000,- dan Baki Debet sebesar Rp50.000.000,- memiliki kolektibilitas Kurang Lancar dengan jaminan Sebidang Tanah Darat Seluas 512 M2 Yang Terletak Di Blok Kebon Nangka Desa Jatipamor Panyingkiran Yang tercantum Dalam AJB No 67/2017 An David Rosidi pada persyaratan Administratif PBB tidak menggunakan yang ter-update.

#### **7) Pemeriksaan Kredit KC Cikijing**

1. Sampai dengan pemeriksaan terhadap kredit, terdapat debitur dengan nomor rekening 07-K01.003833 atas nama NONO SUKARNA tanggal realisasi 31 Januari 2017 tanggal jatuh tempo 31 Januari 2018 jumlah pinjaman Rp2.300.000 dengan baki debet Rp1.246.000 kolektibilitas M. Dalam dokumen kredit tidak terdapat dokumen BI Cheking/Trade Cheking/Informasi Debitur dari OJK.
2. Sampai dengan pemeriksaan terhadap kredit, terdapat debitur dengan nomor rekening 07-K01.004331 atas nama UUS SUNARDI tanggal realisasi 28 Juni 2019 jumlah pinjaman Rp35.000.000 dengan baki debet Rp. 30.707.500 kolektibilitas DPK. Ada tunggakan di Bank Rakyat Indonesia kc Majalengka

kolektibilitas KL selama 113 hari dengan tunggakan pokok Rp.23.495.264 Tunggakan bunga Rp.13.019.565.

3. Sampai dengan pemeriksaan terhadap kredit, terdapat debitur dengan nomor rekening 07-K01.004350 atas nama ELSA SYAWALLINDA tanggal realisasi 29 Juli 2019 jumlah pinjaman Rp35.000.000 dengan baki debet Rp. 31.182.500 kolektibilitas DPK. Ada tunggakan di Top finance selama 25 hari Kolektibilitas DPK dengan tunggakan pokok Rp.2.286.627 bunga Rp.4.971, serta tunggakan di wahana ottomitra multiatrha kolektibilitas DPK dengan tunggakan pokok Rp.4.168.593 Tunggakan bunga Rp.268.515.
4. Sampai dengan pemeriksaan terhadap kredit, terdapat debitur dengan nomor rekening 07-K01.004228 atas nama YAYAT SUDRAJAT tanggal realiasi 31 Desember 2018 jumlah pinjaman Rp6.500.000 dengan baki debet Rp5.033.000 kolektibilitas KL. Ada tunggakan pokok di Bank Rakyat Indonesia kc ciamis selama 232 hari Kolektibilitas dengan tunggakan pokok Rp.2.500.500 tungga bunga Rp.604.715

#### **8) Pemeriksaan Kredit KC Bantarujeg**

1. Sampai dengan pemeriksaan terhadap kredit, terdapat debitur dengan nomor rekening 08-K01.006324 atas nama Jaja Karja baki debet Rp 25.000.000,- Kolektibilitas D dalam dokumen kredit Surat Pemberian Kuasa kepada Debitur tidak ditemukan.
2. Sampai dengan pemeriksaan terhadap kredit, terdapat debitur dengan nomor rekening 08-K01.006309 atas nama Lumyadin tanggal realisasi 30 November 2018 dengan jumlah pinjaman Rp 7.000.000,- dengan baki debet Rp 2.332.000,- kolektibilitas D. Dalam dokumen kredit ditemukan kolektabilitis DPK di Bank Mandiri KC JKT-TBT Supomo.
3. Sampai dengan pemeriksaan terhadap kredit, terdapat debitur dengan nomor rekening 08-K01.006402 atas nama Munir tanggal realisasi 22 Maret 2019 dengan jumlah pinjaman Rp 13.000.000,- dengan baki debet Rp 9.749.500,- kolektibilitas KL. Dalam dokumen kredit tidak ditemukan foto debitur, agunan, Surat Keterangan Usaha, dan Foto tempat tinggal Debitur.
4. Sampai dengan pemeriksaan terhadap kredit, terdapat debitur dengan nomor rekening 08-K01.006401 atas nama UCUP BANGBANG SUPRIYADI dengan baki debet Rp 3.000.000,- kolektibilitas DPK. Dalam dokumen kredit tidak dilampirkan foto survey lapangan untuk melihat agunan, foto usaha debitur tidak ditemukan, serta SPPT yang dilampirkan tidak update.
5. Sampai dengan pemeriksaan terhadap kredit, terdapat debitur dengan nomor rekening 08-K03.001074 atas nama ENTIS SUTISMAN tanggal realisasi 28 oktober 2019 dengan jumlah pinjaman Rp 123.000.000,- dengan baki debet Rp 120.071.000,- kolektibilitas L. Pada momerandum komite kredit terdapat kolom Kepala Divisi Pemasaran Pusat dan Kepala Divisi Operasional Pusat yang tidak terisi mulai dari nama, jabatan, keterangan dan otorisasi. Avalis atas nama Lilis Suryani memiliki Kolektibilitas Kurang Lancar pada Bank BRI Kc Majalengka dengan Baki Debet sebesar Rp. 20.833.800,-.

#### **Kriteria**

- SOP Kredit yang diterbitkan oleh Perumda BPR Majalengka
- Surat Edaran Bank Indonesia No.14/ 26 /DKBU Tanggal 19 September 2012 Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat

#### **Sebab**

- BPR kurang memperhatikan kelengkapan dokumen sesuai dengan kondisi diatas, dan melakuka evaluasi atas kelengkapan administrasi kredit.
- Kebijakan kredit terhadap Debitur yang memiliki Kolek 5 di Bank Lain.

**Akibat**

Dokumen kredit debitur tersebut tidak lengkap sesuai dengan SPO Kredit dan PKPB yang berdampak kepada proses putusan pemberian kredit.

**Saran/Rekomendasi**

Berdasarkan kriteria diatas menjelaskan tujuan dan fungsi kelengkapan administrasi pembiayaan dan analisa Kredit terhadap calon nasabah, maka dari itu lembaga lebih memperhatikan lagi terhadap kelengkapan dokumen dan analisa Kredit.

**8. Pemeriksaan Kelengkapan Deposito Di Kantor Pusat dan Kantor Cabang Kondisi**

- Deposan yang belum menyertakan NPWP terutama nominal diatas Rp. 100.000.000.
- Deposan yang di sample pada umumnya belum mencatat nama yang dikuasakan atau ahli warisnya.
- Deposan Lembaga / intansi yang di sampel pada umumnya belum melampirkan photo copy surat akta pendirian usaha atau keputusan dinas intansi dan surat kuasa penunjukan pada pejabat pemegang rekening
- Bunga diatas LPS tidak membuat surat Pernyataan tidak dijamin LPS.

**Kriteria**

- Dalam dokumen SOP pembukaan rekening, meliputi :
  - 1) Permohonan pembukaan rekening oleh nasabah harus dilengkapi dengan data dan identitas nasabah yang lengkap, benar serta masih berlaku. Meliputi : nama, tanda-tangan, alamat, nomor telepon, NPWP, serta pihak yang berwenang untuk mewakili nasabah dan untuk nasabah Lembaga / intansi di lampirkan foto copy surat keterangan akta pendirian usaha atau keputusan dinas, surat kuasa penunjukan pada pejabat pemegang rekening.
  - 2) Rekening dapat dibuka dan selanjutnya dapat dioperasikan berdasarkan permintaan tertulis dari nasabah sepanjang nasabah telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank dan tunduk pada ketentuan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) serta ketentuan lain yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- Surat Keputusan Direksi Nomor : 50 tahun 2014 tanggal 14 November 2014 tentang Ketentuan Deposito Berjangka PD BPR Sukahaji.
- Surat Keputusan OJK Kepala Regional 2 Jawa Barat Nomor : KEP.34/KR.2/2015 tanggal 11 Agustus 2015.
- UU No. 24 tahun 2004 tentang LPS, Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2008 tgl 13 Oktober 2008 tentang Besaran nilai yang dijamin LPS dan Surat Penetapan tingkat bunga Penjaminan periode september 2016 Nomor : PRESS-26/SEKL/IX/2016 tanggal 13 September 2016).

**Sebab**

BPR belum optimal dalam penerapan kebijakan dan operasional terkait deposito yang sesuai dengan ketentuan dalam SK Direksi dan SOP tentang Deposito.

**Akibat**

Masih terdapat ketidaksesuaian dengan pedoman kebijakan dan prosedur operasional, SK Direksi dan SK OJK terkait deposito dan tabungan.

**Rekomendasi**

Manajemen Perumda BPR Majalengka agar meninjau kembali terhadap kantor Pusat dan Kantor Cabang mengenai penerapan SOP, SK Direksi dan SK OJK dan berkoordinasi kembali dengan nasabah untuk melengkapi kekurangan dokumen dan membuat surat pernyataan tidak dijamin LPS atau menyesuaikan suku bunga LPS.

## 9. Kelemahan dalam pengelolaan Aset Tetap Kondisi

- a. Belum dilakukan lagi pengecekan kembali terhadap barang yang sudah tidak terpakai, rusak, Hilang dan habis nilainya untuk kemudian dipertimbangkan dilakukan penghapusbukuan, diantaranya:

Nama Aktiva Tetap & Inventaris	Kantor	Tgl Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
<b>Kendaraan</b>						
Sepeda Motor Honda Supra X	04	21/11/2011	Rp15.425.000	Rp15.425.000	Rp -	hilang
Motor Suzuki Thunder	06	14/03/2007	Rp15.000.000	Rp14.999.999	Rp 1	rusak
<b>Inventaris Lainnya</b>						
1 Unit Notebook Intel celeron	04	08/01/2007	Rp0	Rp0	Rp -	rusak
Laptop Toshiba & Acer	04	02/03/2009	Rp16.762.500	Rp16.762.499	Rp 1	rusak
Note Book Acer 4740	07	23/04/2010	Rp7.250.000	Rp7.249.999	Rp 1	rusak
Printer HP Laser Jet P1102	04	16/09/2011	Rp1.150.000	Rp1.149.999	Rp 1	rusak
Mesin Hitung Uang Top Counter 9600	03	12/09/2013	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp -	rusak
Kursi Tamu	04	26/06/1995	Rp750.000	Rp749.999	Rp 1	rusak
Stel Kursi Tamu	04	25/09/1998	Rp1.000.000	Rp999.999	Rp 1	rusak
Kursi Lipat Chitose	04	19/05/2003	Rp1.500.000	Rp1.499.999	Rp 1	rusak
Gorden Gedung Cab Ligung	04	28/11/2006	Rp2.300.000	Rp2.299.999	Rp 1	rusak
1 Dispenser merk. NIPONT	04	07/06/2007	Rp1.050.000	Rp1.049.999	Rp 1	rusak
15 Kursi CHITOSE	04	07/06/2007	Rp5.304.250	Rp5.304.249	Rp 1	rusak
Meja Rapat	04	31/12/2007	Rp750.000	Rp749.999	Rp 1	rusak
Taman & Pot-pot Bunga	04	24/03/2009	Rp5.000.000	Rp4.999.999	Rp 1	rusak
Kursi Chitose Lipat	04	30/10/2009	Rp600.000	Rp599.999	Rp 1	rusak
Gorden	04	30/12/2009	Rp2.000.000	Rp1.999.999	Rp 1	rusak
UPS	04	14/04/2010	Rp1.875.000	Rp1.874.999	Rp 1	rusak
CCTV	04	07/06/2012	Rp8.312.500	Rp8.312.499	Rp 1	rusak
UPS ACE	04	12/12/2012	Rp2.550.000	Rp2.550.000	Rp 1	rusak
Kursi Chitose	07	10/03/2006	Rp980.000	Rp979.999	Rp 1	rusak
UPS 600 VA Power	07	26/07/2007	Rp2.400.000	Rp2.399.999	Rp 1	rusak
UPS Prolink	07	30/12/2010	Rp700.000	Rp699.999	Rp 1	rusak
6 Unit kursi Vios untuk cabang Kadipaten	06	28/08/2014	Rp1.200.000	Rp1.200.000	Rp 1	rusak 2
WIRELESS BELL BOX ALARM SYSTEM	06	13/05/2015	Rp1.199.000	Rp1.198.999	Rp 1	rusak
WIRELESS BELL BOX ALARM SYSTEM	07	13/05/2015	Rp1.199.000	Rp1.198.999	Rp 1	rusak
1 Unit UPS Cikijing	07	25/11/2015	Rp425.000	Rp424.999	Rp 1	rusak
Printer Passbook Tally Genicom 5040 untuk Cab Jatitujuh	03	22/08/2016	Rp13.750.000	Rp11.744.778	Rp 2.005.222	rusak

- b. Dalam daftar inventaris tidak tercantum keterangan yang jelas/spesifik dan tidak ada label untuk setiap barang inventaris, sehingga sulit dilakukan identifikasi.

- c. BPR belum mempertimbangkan untuk mengasuransikan kendaraan bermotor roda dua untuk memitigasi risiko operasional. Selain itu, belum ada ketentuan intern terkait asuransi kendaraan bermotor roda dua/empat.

**Kriteria**

SAK-ETAP Bab 15. Aset Tetap merupakan Aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode.

**Sebab**

Bank belum maksimal dalam tertib administrasi pengelolaan aset tetap dan mematuhi SAK ETAP dan aturan yang telah ditetapkan oleh Direksi.

**Akibat**

Terdapat penyajian aktiva tetap yang sudah rusak atau tidak dipergunakan lagi akan tetapi masih tercatat dalam kelompok aset tetap.

**Rekomendasi**

Melaksanakan inventarisasi aset tetap dalam 1 (satu) atau 2 (dua) periode, dan melakukan koreksi terhadap aktiva tetap dimaksud sesuai dengan yang diuraikan SAK ETAP dan Kebijakan Direksi.

**10. Administrasi Bilyet Deposito dan Buku Tabungan**

**Kondisi**

Masih terdapat kelemahan dalam penatausahaan administrasi bilyet deposito dan buku tabungan yaitu sebagai berikut:

- a. BPR telah memiliki buku registrasi deposito dan tabungan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat bilyet deposito dan tabungan yang telah diserahkan kepada nasabah bersangkutan, namun belum membubuhkan tanda tangan buku register deposito sebagai bukti bahwa nasabah telah menerima bilyet deposito dan tabungan.
- b. Buku tabungan belum dibuat nomor register, hal ini diperlukan untuk menghindari risiko penyalahgunaan.

**Sebab**

BPR masih belum optimal dalam penerapan buku registrasi deposito dan tabungan.

**Rekomendasi**

BPR harus memiliki buku registrasi deposito untuk menghindari risiko penyalahgunaan.

**11. BPR Masih Belum Melakukan Revaluasi aset Tanah di Kantor cabang**

**Kertajati**

**Kondisi**

Tanah Bangunan Kantor Cabang Kertajati berkurang akibat terkena pelebaran jalan dan telah mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 514.830.790,-, dengan adanya penurunan luas tanah bangunan kantor tersebut masih belum melakukan revaluasi.

**Kriteria**

**SAK ETAP BAB 15 Tentang Aktiva Tetap**

**Pengakuan dan Pengukuran Penurunan Nilai**

15.24 Entitas harus menerapkan Bab 22 *Penurunan Nilai Aset* untuk menentukan apakah aset tetap telah mengalami penurunan nilai dan (jika terjadi penurunan nilai) bagaimana mengakui dan mengukur kerugian penurunan nilai. Bab 22 menjelaskan kapan dan bagaimana entitas mengkaji-ulang jumlah tercatat aset, bagaimana

menentukan jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset, kapan mengakui kerugian penurunan nilai atau pemulihannya.

**Sebab**

BPR masih belum melakukan penilaian kembali atas penurunan luas tanah bangunan Kantor Cabang Kertajati akibat terkena pelebaran jalan (penggusuran).

**Akibat**

Luas tanah yang tercatat dalam dokumen kepemilikan BPR akan berbeda dengan luas tanah yang ada saat ini.

**Saran/Rekomendasi**

Berdasarkan kriteria diatas, maka BPR harus segera melakukan penilaian ulang dengan melakukan appraisal tanah sisa tanah yang masih ada, sebagai bahan untuk perbaikan dokumen kepemilikan atas asset tanah tersebut.

## 12. Pengelompokan Tabungan Pasif

**Kondisi**

BPR masih belum memiliki kebijakan tentang tabungan pasif yang ditetapkan oleh SK Direksi tentang ketentuan yang menjelaskan secara rinci besaran tabungan minimum atau tabungan yang dapat dikategorikan tabungan pasif;

- 1) Tabungan Kantor KPO
  - a. Jumlah : 57 Nasabah
  - b. Tabungan Nominal dari 0,- a.s. 4.931,-
- 2) Tabungan Kantor Cabang Rajagaluh
  - a. Jumlah : 52 Nasabah
  - b. Tabungan Nominal dari 0,- a.s 4.955,-
- 3) Tabungan Kantor Cabang Jatitujuh
  - a. Jumlah : 28 Nasabah
  - b. Tabungan Nominal dari 0,- a.s 4.776,-
- 4) Tabungan Kantor Cabang Ligung
  - a. Jumlah : 90 Nasabah
  - b. Tabungan Nominal dari 0,- a.s 4.993,-
- 5) Tabungan Kantor Cabang kadipaten
  - a. Jumlah : 35 Nasabah
  - b. Tabungan Nominal dari 0,- a.s 4.919,-
- 6) Tabungan Kantor Cabang Cikijing
  - a. Jumlah : 54 Nasabah
  - b. Tabungan Nominal dari 963,- a.s 4.968,-
- 7) Tabungan Kantor Cabang Kertajati
  - a. Jumlah : 99 Nasabah
  - b. Tabungan Nominal dari 0,- a.s 4.927,-
- 8) Tabungan Kantor Cabang Jatitujuh
  - a. Jumlah : 36 Nasabah
  - b. Tabungan Nominal dari 1.000,- a.s 4.839,-
- 9) Tabungan Kantor Cabang Bantarujeg
  - a. Jumlah : 66 Nasabah
  - b. Tabungan Nominal dari 1.005,- a.s 4.906,-
- 10) Tabungan Kantor Cabang Sukahaji
  - a. Jumlah : 33 Nasabah
  - b. Tabungan Nominal dari 1.124,- a.s 4.992,-

### Sebab

Dari data tabungan pada masing-masing cabang ditemukan saldo tabungan yang nominalnya dibawah Rp. 5.000,- dan sudah tidak ada aktivitas penyimpanan maupun penarikan.

### Rekomendasi

- BPR harus memiliki kebijakan tentang tabungan pasif yang ditetapkan oleh SK Direksi ketentuan yang menjelaskan secara rinci besaran tabungan minimum tabungan dapat dikategorikan pasif;
- Dengan ada ketentuan tentang tabungan pasif maka petugas BPR secara otomatis akan menutup rekening tabungan tersebut,

## 13. Perbedaan Saldo Sub Buku Besar dengan Saldo Per Produk Pada Nominatif.

### Kondisi

Terdapat perbedaan saldo sub buku besar kredit yang diberikan dengan saldo perincian per produk pada nominatif kredit, saldo kredit secara total sudah sama.

Produk Kredit	Saldo Menurut Neraca	Saldo Menurut Nominatif	Selisih
Kredit Umum	52.650.927.530	52.952.018.530	(301.091.000)
Kredit Karyawan	12.519.573.000	12.613.469.500	(93.896.500)
Kredit Pegawai	50.118.447.300	49.738.655.800	379.791.500
Kredit PNM	-	19.950.000	(19.950.000)
Kredit Perak	237.647.500	232.022.500	5.625.000
Kredit LPDB	69.618.600	40.097.600	29.521.000
Jumlah	<b>115.596.213.930</b>	<b>115.596.213.930</b>	-

### Kriteria

- Saldo sub buku besar antara neraca dengan saldo per produk menurut nominatif kredit.
- SOP Kredit BPR.

### Sebab

- *Back Office* Kredit kurang dalam mencantumkan kode produk dan kode integrasi pada saat registrasi.
- Masih kurangnya pengawasan dari bagian-bagian yang terlibat dalam administrasi kredit.

### Akibat

Perbedaan saldo perincian per produk kredit, sehingga memberikan informasi yang kurang akurat.

### Rekomendasi

Bagian yang terlibat dalam administrasi kredit harus hati-hati dan pemeriksaan yang teliti pada proses registrasi kredit.

Harus melakukan jurnal reklasifikasi pada sub buku besar produk kredit.

Jurnal Koreksi :

Dr. Kredit Pegawai	Rp. 379.791.500	
Dr. Kredit Perak	Rp. 5.625.000	
Dr. Kredit Perak	Rp. 29.521.000	
Cr. Kredit Umum		Rp. 301.091.000
Cr. Kredit Karyawan		Rp. 93.896.500
Cr. Kredit PNPM		Rp. 19.950.000

## PENUTUP

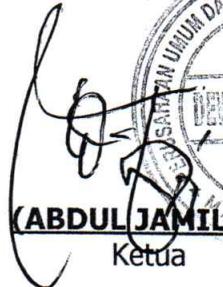
Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamiin, kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT bahwasannya Laporan Tahunan Perumda BPR Majalengka Tahun 2019 ini telah dapat diselesaikan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Laporan Tahunan ini disusun, disajikan dan disampaikan sebagai bentuk pelaksanaan salah satu tugas dan tanggung jawab dalam pengurusan dan pengelolaan Perumda BPR Majalengka selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebagaimana diatur dan diamanatkan dalam:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah; dan
- Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka.

Kami menyadari bahwa isi dan materi yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini tentunya masih terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kami berharap saran dan masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan penyusunan dan penyajian laporan yang sama di masa yang akan datang.

Demikian laporan tahunan ini disusun dan disampaikan, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Mengetahui/Menyetujui  
DEWAN PENGAWAS

  
**(ABDUL JAMIL, SE)**  
Ketua



Majalengka, 23 Maret 2020  
PERUMDA BPR MAJALENGKA  
DIREKSI,

  
**(ATJENG HADIS SUSANTO, SE)**  
Direktur Utama



# LAMPIRAN

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Abdul Jamil, SE  
Jabatan : Ketua Dewan Pengawas  
Tempat/Tgl. Lahir : Pemalang 19 Maret 1960  
Jenis kelamin : Pria  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Kawin  
Alamat Rumah : a. Dusun Cibiru, RT 002 RW 012, Kelurahan/Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat (sesuai alamat/KTP istri).  
b. Jl. Pahlawan No. 47 RT 002 RW 005, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat (sesuai KTP)

### RIWAYAT PENDIDIKAN

- S1 Ekonomi Perusahaan/Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta Tahun 1984
- Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri, Pemalang Tahun 1979
- Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) Negeri 2, Pemalang Tahun 1976
- Sekolah Dasar (SD) Negeri, Desa Asemdayong, Taman, Pemalang Tahun 1973

### PENGALAMAN PEKERJAAN

- A. Pengalaman Kerja di Luar Bank Indonesia
- Staf Pengajar pada Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA), Semarang (1985 – 1987)
- B. Pengalaman Kerja di Bank Indonesia
1. Kantor Bank Indonesia (KBI) Banjarmasin, Seksi Statistik Ekonomi/Perbankan dan Seksi Pengawasan/Pemeriksaan Bank (1988 – 1992)
  2. Kantor Bank Indonesia (KBI) Pekanbaru, Seksi Statistik Ekonomi/Perbankan (1992 – 1994)
  3. Urusan Devisa, Bagian Penelitian dan Pengembangan Devisa, Seksi Administrasi, Anggaran dan Logistik (1994 – 1996)
  4. Urusan Devisa, Bagian Administrasi Devisa, Seksi Penyelesaian Transaksi Devisa I (2000 – 2003)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : ATJENG HADIS SUSANTO, SE  
Jabatan : Direktur Utama  
Tempat/Tgl. Lahir : Ciamis, 10 April 1967  
JenisKelamin : Laki - Laki  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Kawin  
Alamat : Blok Jum'at RT. 10/01 Desa Ligung Kecamatan Ligung  
Kabupaten Majalengka  
Tempat Tinggal : Jl. Manggis No. 52 RT 02 RW 03 Perum BTN Munjul  
Indah Majalengka Kulon

### Riwayat Pendidikan :

- Tahun 1981 SDN 1 Ciamis, Lulus Berijazah
- Tahun 1983 SLTPN 2 Ciamis, Lulus Berijazah
- Tahun 1986 SMAN 1 Ciamis, Lulus Berijazah
- Tahun 1989 D3 Akademi Manajemen Yogyakarta, Lulus Berijazah
- Tahun 2004 S1 Universitas Garut Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen, Lulus Berijazah

### Riwayat Pekerjaan :

- Tahun 1990 s.d. 1991 Penerimaan dan Pendidikan Calon Staff Pegawai di Pusdiklat Bank BTN Kantor Pusat Jakarta.
- Tahun 1991 s.d. 1994 ditetapkan di Bank BTN Cabang Tasikmalaya Unit Akunting.
- Tahun 1994 s.d. 1996 ditetapkan di Bank BTN Unit Pelayanan Kredit Cabang Tasikmalaya.
- Tahun 1996 s.d. 1997 ditetapkan di Unit Pelayanan Nasabah / Customer Service Bank BTN Cabang Tasikmalaya.
- Tahun 1997 s.d. 1999 Mutasike Bank BTN Cabang Bandung Unit Loan Recovery.
- Tahun 2001 s.d. 2007 Mutasi ke Bank BTN Kantor Cabang Pembantu Garut Unit Manager Operasional Retail.
- Tahun 2007 s.d. 2008 Pendidikan Kompetensi Calon Pimpinan dengan On The Job Training di Bank BTN Cabang Batam
- Tahun 2008 s.d. 2009 mutasi ke Bank BTN Cabang Bandung Unit Transaction Proceasing.
- Tahun 2009 s.d. 2011 mutasi/rotasike Bank BTN Cabang Ujung Berung Bandung Unit Operasional.
- Tahun 2011 s.d 2012 Direktur Umum PD. BPR Sukahaji
- Tahun 2012 s.d.sekarang Direktur Utama PD. BPR Sukahaji / Perumda BPR Majalengka

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : ADIN AKHMADIN  
Jabatan : Ketua Satuan Pengawas Intern  
Tempat, Tanggal Lahir : Majalengka, 12 September 1967  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Kawin  
Alamat : Desa Kalapa Dua RT 09/03 Kecamatan Lemahsugih  
Kabupaten Majalengka

## RIWAYAT PENDIDIKAN

- SDN PANIIS Lulus Berijazah Tahun 1980
- SMPN BANTARUJEG Lulus Berijazah Tahun 1983
- SMAN TALAGA Lulus Berijazah Tahun 1987
- UNIVERSITAS MAJALENGKA Lulus Berijazah Tahun 2006

## PENGALAMAN PEKERJAAN

- |                                   |                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| - Staff Dana                      | 1992 s/d 1993     | BKPD Lemahsugih   |
| - Kabag Dana                      | 1993 s/d 1994     | BKPD Lemahsugih   |
| - Staf Dana                       | 1994 s/d 1999     | BKPD Bantarujeg   |
| - Kabag Kredit                    | 1999 s/d 2008     | BKPD Bantarujeg   |
| - Pimpinan Cabang Bantarujeg      | 2008 s/d 2012     | Cabang Bantarujeg |
| - Pimpinan Cabang Rajagaluh       | 2012 s/d 2014     | Cabang Rajagaluh  |
| - Biro Operasional                | 2014 s/d 2016     | Kantor Pusat      |
| - Ketua SPI                       | 2016 s/d 2017     | Kantor Pusat      |
| - Kepala Divisi Kepatuhan         | 2017 s/d 2018     | Kantor Pusat      |
| - Kepala Satuan Pengawas Internal | 2018 s/d Sekarang | Kantor Pusat      |

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : UDIN  
Jabatan : Kepala Divisi Operasional  
Tempat/Tanggal Lahir : Majalengka, 10 Mei 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Kawin  
Alamat : Blok Panjalin RT.07 RW.03 Desa Biyawak Kecamatan  
Jatitujuh Kabupaten Majalengka

## RIWAYAT PENDIDIKAN

- SD NEGERI 1 SUKASARI Lulus Berijazah Tahun 1993  
- SMP NEGERI 1 ARGAPURA Lulus Berijazah Tahun 1995  
- SMU NEGERI 1 MAJA Lulus Berijazah Tahun 1997  
- STIE STMY MAJALENGKA Lulus Berijazah Tahun 2009

## PENGALAMAN PEKERJAAN

- Tenaga Honorer 1992 – 2000 PD.BPR BKPD Kertajati  
- Staf Tabungan 2000 – 2004 PD.BPR BKPD Kertajati  
- Subag Pembukaan 2004 – 2006 PD.BPR BKPD Kertajati  
- Kabag Umum 2006 – 2008 PD.BPR BKPD Kertajati  
- Kabag TI 2008 – 2012 PD.BPR Sukahaji  
- Kabag TI dan Pelengkapan 2012 – 2013 PD.BPR Sukahaji  
- Kabag TI 2013 – 2015 PD.BPR Sukahaji  
- Pimpinan Cabang 2015 - 2016 PD.BPR Sukahaji KC Jatitujuh  
- KaBiro Operasiona 2016 - Sekarang

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : EDWAN REDWAN  
Jabatan : Pimpinan Cabang Bantarujeg  
Tempat, Tanggal Lahir : Majalengka, 28 Februari 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status Pernikahan : Menikah  
Alamat : Komplek Puspa Indah RT 22/02 Kelurahan Cigasong  
Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka

### RIWAYAT PENDIDIKAN

- SDN II CIGASONG Lulus Berijazah Tahun 1992  
- SMPN 2 CIGASONG Lulus Berijazah Tahun 1995  
- SMAN 2 MAJALENGKA Lulus Berijazah Tahun 1998  
- UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Lulus Berijazah Tahun  
2004

### PENGALAMAN PEKERJAAN

- Staff 2005 s/d 2007 BKPD Kadipaten  
- Staff Kredit 2007 S/D 2009 BKPD Kadipaten  
- Kasubag Supervisi Kredit 2009 S/D 2009 BKPD Kadipaten  
- Kasubag Analisa Kredit 2009 S/D 2013 KC. Rajagaluh  
- Kabag Pemasaran 2013 S/D 2017 KC. Kadipaten  
- Kabag Pemasaran 2017 S/D 2018 KPO  
- Pimpinan Cabang 2018 S/D Sekarang KC. Bantarujeg

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : HJ. IIS SAENAWATI  
Jabatan : Pimpinan Cabang Kertajati  
Tempat, Tanggal Lahir : Majalengka, 3 Agustus 1966  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status Pernikahan : Menikah  
Alamat : Dusun Sukamaju RT 007/003 Desa Babakan  
Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka

### RIWAYAT PENDIDIKAN

- SDN BABAKAN	Lulus Berijazah Tahun 1979
- SMPN JATITUJUH	Lulus Berijazah Tahun 1982
- SMAPGRI 1 MAJALENGKA	Lulus Berijazah Tahun 1985
- UNIVERSITAS MAJALENGKA	Lulus Berijazah Tahun 2001

### PENGALAMAN PEKERJAAN

- Kredit	1987 S/D 1992	BKPD Kertajati
- Kasir	1992 S/D 1995	BKPD Kertajati
- Kabag Keuangan	1995 S/D 2000	BKPD Kertajati
- Kabag Dana	2000 S/D 2001	BKPD Kertajati
- Kabag Administrasi	2001 S/D 2002	BKPD Kertajati
- Kabag Umum	2002 S/D 2004	BKPD Kertajati
- Direktur BPR Kertajati	2004 S/D 2008	PD. BPR Kertajati
- Pimpinan Cabang Kertajati	2008 S/D 2010	KC. Kertajati
- Pimpinan Cabang Ligung	2010 S/D 2011	KC. Ligung
- Pimpinan Cabang Kertajati	2011 S/D 2012	KC. Kertajati
- Pimpinan Cabang Jatitujuh	2012 S/D 2013	KC. Jatitujuh
- Pimpinan Cabang Kadipaten	2013 S/D 2013	KC. Kadipaten
- Kepala Biro Operasional	2013 S/D 2014	Kantor Pusat Manajemen
- Ketua SPI	2014 S/D 2016	Kantor Pusat Manajemen
- Pimpinan Cabang Sukahaji	2016 S/D 2017	KC Sukahaji
- Ketua SPI	2017 S/D 2018	Kantor Pusat Manajemen
- Pimpinan Cabang Kertajati	2018 S/D Sekarang	Kantor Pusat Manajemen

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : SUNARA  
Jabatan : Pimpinan Cabang Ligung  
Tempat Dan Tanggal Lahir : Majalengka, 23 Desember 1967  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status Pernikahan : Menikah  
Alamat : Dusun 02 Rt/Rw:003/016 DesaCiborelang Kecamatan Jatiwangi kabupaten Majalengka

## RIWAYAT PENDIDIKAN

- SDN II LIGUNG 2 Lulus Berijasah Tahun 1981  
- SMPN LIGUNG Lulus Berijasah Tahun 1984  
- SMAN JATIWANGI Lulus Berijasah Tahun 1987  
- UNIVERSITAS TERBUKA Lulus Berijasah Tahun 2009

## PENGALAMAN PEKERJAAN

- Staf 1987 s.d 1990 BKPD Ligung  
- Kepala Bagian Kredit 1990 s.d 1996 BKPD Ligung  
- Kepala Bagian Dana 1996 s.d 1998 BKPD Ligung  
- Kabag. Kredit 1999 s.d 2004 BKPD Ligung  
- Kabag.Pembukuan 2005 s.d 2008 BKPD Ligung  
- Kabag.Oprasional 2008 s.d 2009 KC Ligung  
- Kepala Kantor Kas Jatiwangi 2009 s.d 2010 KC Ligung  
- Pimpinan Cabang Kadipaten 2010 s/d 2011 KC Kadipaten  
- Pimpinan Cabang Ligung 2011 s.d 2012 KC Ligung  
- Pimpinan Cabang Kertajati 2012 s.d 2013 KC Kertajati  
- Pimpinan Cabang Jatitujuh 2013 s.d 2014 KC Jatitujuh  
- Pimpinan Cabang Rajagaluh 2014 s.d 2016 KC Rajagaluh  
- Kepala Divisi Umum,Kepatuhan dan Manajemen Risiko 2016 s.d 2018 Kantor Pusat  
- Kepala Divisi Pemasaran 2018 s.d 10 2019 Kantor Pusat  
- Pimpinan Cabang Ligung 2019 s.d Sekarang KC Ligung

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : USEP WIRA SANTIKA  
Jabatan : Pimpinan Cabang Rajagaluh  
Tempat Tanggal Lahir : Majalengka, 14 Februari 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status Pernikahan : Menikah  
Alamat : Komplek Griya Wana Lestari 003/001 Desa Liangjulung  
Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka

## RIWAYAT PENDIDIKAN

- SDN GANGGALAKSANA	Lulus Berijasah Tahun 1986
- SMPN 2 MAJALENGKA	Lulus Berijasah Tahun 1989
- SMA PGRI 1 MAJALENGKA	Lulus Berijasah Tahun 1992
- FAKULTAS EKONOMI UNMA	Lulus Berijasah Tahun 2004

## PENGALAMAN PEKERJAAN

- Staf Kredit	1993.s.d 1994	BPR BKPD Leumahsugih
- Staf Kredit	1994.s.d 2002	BPR BKPD Rajagaluh
- Kasubag KUK & PHBK	2002.s.d 2005	BKPD Rajagaluh
- Kasubag Analisa Kredit	2005.s.d 2009	BPR KC Rajagaluh
- Kabag Pemasaran	2009.s.d 2013	BPR KC Cikijing
- Pimpinan Cabang Cikijing	2013.s.d 2016	KC Cikijing
- Pimpinan KPO	2016.s.d 2018	Kantor Pusat Operasional
- Pimpinan Cabang Ligung	2018.s.d 2019	KC Ligung
- Pimpinan Cabang Rajagaluh	2019,s.d sekarang	KC Rajagaluh

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : NANDAN SUDIANA  
Jabatan : Pimpinan Cabang Jatitujuh  
Tempat / Tanggal Lahir : Majalengka, 07 Pebruari 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status Pernikahan : Menikah  
Alamat : Lingkungan Margahayu Rt.12/04 Kelurahan Cicurug  
Kabupaten Majalengka

## RIWAYAT PENDIDIKAN

- SDN Babakan Koda	Lulus Berijasah Tahun 1990
- SMPN I Majalengka	Lulus Berijasah Tahun 1993
- SMAN 2 Majalengka	Lulus Berijasah Tahun 1996
- Perguruan Tinggi UNISBA	Lulus Berijasah Tahun 2001

## PENGALAMAN PEKERJAAN

- Staf Kredit	2001 S/D 2007	BKPD Kadipaten
- Kasubag ADM Kredit	2007 S/D 2008	PD.BPR BKPD Kadipaten
- Kasubag Pembinaan Nasabah	2008 S/D 2009	KC Kadipaten
- Kasubag Analisa Kredit	2009 S/D 2009	KC Kadipaten
- Kepala Kantor Kas Dawuan	2009 S/D 2012	KC Kadipaten
- Kabag Kepegawaian	2012 S/D 2012	Kantor Pusat Manajemen
- Kabag Operasional	2012 S/D 2013	KC Kadipaten
- Kabag Kepegawaian	2013 S/D 2015	Kantor Pusat Manajemen
- Anggota SPI	2015 S/D 2016	Kantor Pusat Manajemen
- Pimpinan Cabang Kadipaten	2016 S/D 2018	KC Cikijing
- Pimpinan Cabang Jatitujuh	2018 S/D Sekerang	KC Jatitujuh

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : H. SAHIDI  
Jabatan : Pimpinan Cabang Kadipaten  
Tempat, Tanggal Lahir : Majalengka, 9 Mei 1968  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status Pernikahan : Menikah  
Alamat : Blok Minggu RT 06/03 Desa Bantarjati Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka

## RIWAYAT PENDIDIKAN

- SDN I JATITUJUH Lulus Berijazah Tahun 1981  
- SMPN JATITUJUH Lulus Berijazah Tahun 1984  
- SMAN MAJALENGKA Lulus Berijazah Tahun 1987  
- IKOPIN JATINAGOR SUMEDANG Lulus Berijazah Tahun 1993

## PENGALAMAN PEKERJAAN

- Staff Dana 1995 S/D 1996 BKPD MAJA  
- Staff Kredit 1998 S/D 2000 BKPD Lemahsugih  
- Kabag Dana 2000 S/D 2003 BKPD Kertajati  
- Kabag Kredit 2004 S/D 2008 BKPD Kertajati  
- Kabag Pemasaran Kertajati 2008 S/D 2009 PD. BPR Sukahaji KC.  
- Kepala Kantor Kas Kasokandel Kertajati 2009 S/D 2012 PD. BPR Sukahaji KC.  
- Kabag Operasional Kertajati 2012 S/D 2013 PD. BPR Sukahaji KC.  
- Kabag Pemasaran Kertajati 2013 S/D 2014 PD. BPR Sukahaji KC.  
- Pimpinan Cabang Kertajati 2014 S/D 2016 KC. Kertajati  
- Pimpinan Cabang Ligung 2016 S/D 2016 KC. Ligung  
- Pimpinan Cabang Jatitujuh 2016 S/D 2017 KC. Jatitujuh  
- Pimpinan Cabang Kertajati 2017 S/D 2018 KC. Kertajati  
- Pimpinan Cabang Kadipaten 2018 S/D sekarang KC. Kadipaten

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : AGUS MULYANA  
Jabatan : Kepala Kantor Operasional Pusat  
Tempat, Tanggal Lahir : Majalengka, 11 Februari 1968  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Kawin  
Alamat : Dusun Raksadipa RT 002/005 Desa Karayunan  
Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka

### RIWAYAT PENDIDIKAN

- SD SINDANG KERTA Lulus Berijazah Tahun 1981  
- SMPN 1 MAJA Lulus Berijazah Tahun 1984  
- SMAN 1 MAJALENGKA Lulus Berijazah Tahun 1987  
- STIE STMY Lulus Berijazah Tahun 2011

### PENGALAMAN PEKERJAAN

- Staf Dana 1990 S/D 2005 BKPD Ligung  
- Kasubag Kredit 2005 S/D 2006 BKPD Ligung  
- Kasubag Analisa Kredit 2006 S/D 2008 BKPD Ligung  
- Kabag Pemasaran 2008 S/D 2013 PD. BPR Sukahaji Cabang Ligung  
- Kabag Pemasaran 2013 S/D 2014 PD. BPR Sukahaji KC.  
Jatitujuh  
- Pimpinan Cabang 2013 S/D 2016 PD. BPR Sukahaji KC.  
Kadipaten  
- Pimpinan Cabang 2016 S/D 2016 PD. Sukahaji KC. Rajagaluh  
- Kepala Biro Pemasaran 2016 S/D 2018 Kantor Pusat BPR  
Majalengka  
- Kepala Kantor Pusat Operasional 2018 S/D Sekarang KantorPusat BPR  
Majalengka

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : RONNI DHIANA ISNANDI  
Jabatan : Kepala Divisi Kepatuhan,Manajemen Risiko dan Umum  
Tempat/Tgl. Lahir : Majalengka, 16 Oktober 1973  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Kawin  
Alamat : Jl. Bhayangkara No.783 Kecamatan Majalengka Kabupaten  
Majalengka

### Riwayat Pendidikan

- Tahun 1986 SDN 4 Majalengka, Lulus Berijazah
- Tahun 1989 SMPN 1 Majalengka, Lulus Berijazah
- Tahun 1992 SMAN 1 Majalengka, Lulus Berijazah
- Tahun 1997 Fakultas Hukum Universitas Prahyanan Bandung, Lulus Berijazah
- Tahun 2003 FISIP Universitas Terbuka Bandung, Lulus Berijazah
- Tahun 2010 Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Pasundan Bandung, Lulus Berijazah

### Riwayat Pekerjaan

- Honorer PD. BPR Cikijing (2001 s/d 2001)
- Calon Pegawai PD. BPR Cikijing (2001 s/d 2002)
- Staf PD. BPR Cikijing (2002 s/d 2003)
- SPI PD. BPR Cikijing (2003 s/d 2004)
- Kabag PD. BPR Cikijing (2004 s/d 2005)
- Direktur PD BPR Kadipaten (2005 s/d 2008)
- Anggota SPI (2008 s/d 2010)
- Kepala Biro Perencanaan (2010 s/d 2012)
- Ketua SPI (2012 s/d 2013)
- Staf Kantor Pusat Operasional (2013 s/d 2014)
- Anggota Tim Khusus Manajemen (2014 s/d 2015)
- Kasubag CS Kantor Pusat Operasional (2015 s/d 2016)
- Anggota SPI (2016 s/d 2018)
- Kepala Divisi Kepatuhan,Manajemen Risiko dan Umum {2018 s/d Sekarang}

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : **ASEP M. JAMALUDIN**  
Jabatan : Direktur Operasional  
Tempat/Tgl. Lahir : Majalengka, 12 Maret 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Kawin  
Alamat : Perum Andir Purnajaya RT.002/003 Desa Karyamukti  
Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka

## Riwayat Pendidikan

- Tahun 1988 SDN 2 Kadipaten, Lulus Berijazah
- Tahun 1991 SMPN 1 Kadipaten, Lulus Berijazah
- Tahun 1994 SMAN 2 Majalengka, Lulus Berijazah
- Tahun 2008 Universitas Majalengka, Lulus Berijazah

## Riwayat Pekerjaan

- Staff BKPD Kadipaten (1995 s/d 1997)
- Kasubag Kas BKPD Kadipaten (1997 s/d 1998)
- Pjs Kabag Dana BKPD Kadipaten (1998 s/d 1998)
- Kasubag Analisa Kredit BKPD Kadipaten (1998 s/d 2000)
- Kasubag Umum BKPD Kadipaten (2000 s/d 2003)
- Kabag Operasional PD. BPR Cabang Kadipaten (2008 s/d 2011)
- Pimpinan Cabang Kadipaten (2011 s/d 2013)
- Pimpinan Cabang Kertajati (2013 s/d 2014)
- Pimpinan Kantor Pusat Operasional (2014 s/d 2016)
- Kepala Divisi Pemasaran (2016 s/d 2016)
- Direktur Operasional Perumda BPR Majalengka (2016 s/d Sekarang)